

# **Politik benazir bhutto dalam perebutan kekuasaan di Pakistan tahun 1979-1988**

Oleh :

**Nyadang Sri Murni**

**NIM K.4403043**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pakistan merupakan republik yang terletak di Barat Laut India, tepatnya di tepi Laut Arab. Negara Pakistan berbatasan dengan Afganistan di Barat Laut dan Utara, Cina di Timur Laut, India di sebelah Timur, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arab (Rachmat Bratamidjaja, 1990: 193). Republik Islam Pakistan yang berpenduduk 110 juta jiwa (tahun 1989), lebih dari 97 % masyarakatnya beragama Islam. Bermacam-macam budaya dan agama telah masuk ke Pakistan, namun pengaruh Islamlah yang paling mengakar. Agama dan pandangan hidup telah memberi Pakistan suatu identitas khusus (Dhuroruddin Mashad, 1996: 1).

Pakistan yang secara resmi menggunakan nama Republik Islam Pakistan sejak terbentuknya negara pada 14 Agustus 1947, mengukir sejarah baru dengan terpilihnya Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri. Benazir Bhutto adalah wanita pertama yang menjadi kepala pemerintahan di negara Islam pada abad modern ini. Benazir Bhutto juga merupakan kepala pemerintahan termuda dengan menjadi Perdana Menteri dalam usia 35 tahun, sekaligus merupakan lambang Islam atas persamaan dan *pragmatisme* (M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar dan Happy Bone Zulkarnain, 1993: 195).

Persamaan hak politik di Pakistan secara nasional diberikan pada tahun 1956, berkat perjuangan Madam Lia Quat Ali Khan pemimpin dari *All Pakistan Women's Conggres* (Soetomo .S Honggowongso, 1990: 30).

Dalam kenyataan di Pakistan, seorang wanita sangat dibatasi dan tidak boleh terlihat mencolok dimuka umum. Di sejumlah wilayah pedesaan sampai sekarang masih berlaku ketentuan kerabat seorang gadis berhak memukul si gadis jika kedapatan berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrimnya (*Tempo*, 26 November 1988: 74). Untuk mengajukan kredit di bank, wanita Pakistan harus mempunyai muhrim laki-laki yang menjaminkannya. Hal ini didasarkan anggapan dari masyarakat Pakistan, bahwa wanita tidak mampu menanggung dirinya sendiri (Hetty Siregar, 1990: 60). Di masyarakat seperti itulah justru muncul seorang wanita sebagai pemimpin negara.

Benazir Bhutto adalah putri mending P.M. Zulfikar Ali Bhutto. Benazir Bhutto lincah, cerdas, cantik dan memiliki pesona pribadi, tubuhnya semampai, bergaya aristokrat, dan seorang orator berbakat. Benazir Bhutto berasal dari keluarga tuan tanah yang kaya di propinsi Sind. Kakek Benazir Bhutto adalah Sir Shahnawaz yang merupakan tokoh masyarakat yang disegani pada masa penjajahan Inggris (*Angkatan Bersenjata*, 23 Maret 1989: 4).

Dalam usia 16 tahun, Benazir (dalam bahasa Urdu berarti: tiada duanya) dikirim ke *Harvard* (Amerika Serikat) dan kemudian ke *Oxford* (Inggris) untuk belajar ilmu Politik, Ekonomi, Filsafat dan Hubungan Internasional (*Tempo*, 26 November 1988: 73). Di Pakistan pendidikan merupakan barang mewah, bahkan dari seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 1981, baru sekitar 26 % penduduk yang bebas dari buta huruf (Rachmat Bratamidjaja, 1990: 199). Namun Benazir Bhutto yang seorang wanita telah mampu mengenyam pendidikan yang tinggi di negara-negara Barat.

Selama berada di dua perguruan tinggi bergengsi tersebut, Benazir Bhutto menjadi salah satu aktivis mahasiswa yang terkemuka dengan menjadi ketua forum perdebatan *Oxford (Oxford Union)* dan sering ikut dalam demonstrasi yang diantaranya demonstrasi anti perang Vietnam (Dhuroruddin Mashad, 1996:9). Ketika Zulfikar Ali Bhutto terpilih sebagai Perdana Menteri Pakistan bulan Desember 1971, Benazir Bhutto masih belajar di *Oxford*.

Zulfikar Ali Bhutto mempunyai obsesi mendalam agar Benazir Bhutto menjadi penggantinya, sebagaimana Indira Gandhi menggantikan ayahnya, Jawaharlal Nehru. Apalagi, kedua putra Zulfikar Ali Bhutto, yakni Murtaza dan Shahnawaz, tidak secerdas Benazir. Impian Zulfikar Ali Bhutto segera hancur ketika Jendral Zia ul-Haq

menggulingkan pemerintahan Zulfikar Ali Bhutto melalui kudeta pada bulan juni 1977. Dua tahun kemudian, Zulfikar Ali Bhutto dieksekusi di tiang gantungan oleh Jendral Zia ul-Haq atas tuduhan terlibat dalam suatu kasus pembunuhan politik. Suatu tuduhan yang tidak pernah menjadi lebih jelas sampai sekarang (*Tempo*, 24 September 1988: 1).

Sejak kematian Zulfikar Ali Bhutto, kehidupan Benazir Bhutto bersama ibu dan saudara-saudaranya menjadi penuh tantangan. Benazir Bhutto mulai mengenal dinginnya terali besi sejak tahun 1978, atas tuduhan menghina pihak penguasa dalam pidato-pidato politiknya. Setahun kemudian Benazir Bhutto ditahan kembali karena melakukan rapat gelap, di samping tuduhan menimbulkan kerusuhan dan berbuat makar. Pada tahun 1981, Benazir Bhutto dijebloskan kembali ke dalam penjara setelah kelompok Al Zulfikar (kekuatan anti pemerintah yang dibentuk dua adik laki-laki Benazir Bhutto di pengasingan) membajak pesawat milik Pakistan. Peristiwa pembajakan pesawat ini, mengakibatkan Zia ul-Haq harus melepaskan beberapa tahanan politik untuk menolong sandera (*Tempo*, 26 November 1988: 73-75).

Di dalam penjara, Benazir Bhutto berharap bisa bertemu dengan tahanan politik lain yang sejak awal pemerintahan Jend. Zia ul-Haq dijebloskan ke dalam penjara oleh pengadilan hukum militer karena melakukan aktivitas politik menentang pemerintahan darurat militer. Benazir Bhutto berharap dapat menyusun kekuatan politik dari dalam penjara bersama para politisi yang lain. Namun pemerintah mengetahui maksud dari Benazir Bhutto dan memberikannya pada sel tersendiri yang panasnya mencapai 49<sup>0</sup>C. Selain sering keluar-masuk penjara, Benazir Bhutto juga sering dikenakan tahanan rumah. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menghindarkan Benazir Bhutto dalam memobilisir massa menentang pemerintah. Dan akhirnya tahun 1984 Benazir Bhutto mengasingkan diri ke Inggris untuk mengobati infeksi telinganya yang parah dan untuk memobilisir kekuatan di luar negeri.

Hari-hari di Inggris, Benazir Bhutto memanfaatkan sebaik mungkin untuk rapat-rapat politik dengan para politisi Pakistan yang banyak mengasingkan diri ke Inggris sejak pemerintahan Zia ul-Haq. Benazir Bhutto cermat membaca kesempatan, dengan memanfaatkan undangan-undangan teman semasa kuliahnya di Amerika Serikat untuk kunjungan politik ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Benazir Bhutto menemui Senator Pell dan Edward Kennedy untuk membahas persoalan politik Pakistan. Bulan

April 1986, Benazir Bhutto kembali dari pengasingan di Inggris untuk menghidupkan kembali perlawanan rakyat Pakistan terhadap pemerintahan Zia ul-Haq (Dhuroruddin Mashad, 1996: 16-18).

Benazir Bhutto menjadi simbol perjuangan demokrasi di Pakistan. Benazir Bhutto adalah orang pertama yang menyuarakan mengenai penegakkan demokrasi di Pakistan. Hal ini tampak dari setiap aksi politik Benazir Bhutto yang dalam pidato selalu mengusung tema demokrasi dengan menuntut pemerintah segera melaksanakan pemilu untuk membentuk pemerintahan sipil. Benazir Bhutto memperjuangkan agar partai politik dapat ikut serta dalam pemilu sehingga demokrasi di Pakistan dapat dilaksanakan. Selama 11 tahun pemerintahan Zia ul-Haq, partai-partai politik tidak diikutsertakan dalam pemilihan umum. Menurut Zia ul-Haq “Tak ada partai politik di Pakistan, yang ada cuma *Pressure Groups* yang mewakili kepentingan-kepentingan tertentu, bukan kepentingan rakyat. Karena itu partai politik tidak layak ikut pemilu” (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 32).

Benazir Bhutto menilai keputusan Zia ul-Haq inkonstitusional, sehingga mengajukan persoalan tersebut ke meja pengadilan. Keluhan Benazir Bhutto dimenangkan Mahkamah Agung Pakistan secara resmi pada 2 Oktober 1988 dengan dibatalkannya Dekrit almarhum Zia ul-Haq yang meniadakan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum (*Angkatan Bersenjata*, 23 Maret 1989: 4). Dalam demokrasi terdapat kebebasan untuk mengajukan berbagai filosofi karena diragukan bahwa seseorang atau beberapa orang memiliki nilai-nilai yang tepat dan dapat melakukan penilaian tentang kebenaran yang tepat yang akan diperuntukkan bagi rakyat. Berhubung dengan itu dalam demokrasi akan dijumpai kesempatan yang luas untuk tumbuhnya partai-partai. Dalam demokrasi sebenarnya terdapat partai-partai yang berkompetisi secara terbuka memperebutkan suara dari pemilih (S. Pamudji, 1994: 22).

Karena *politics is the art and science of government*, maka setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menentukan tujuan pemerintah, haluan pemerintah, dan dasar pemerintah. Tidak boleh ada seorangpun yang mempunyai hak *prerogatif* untuk menolak hak orang lain untuk ikut serta dalam pemerintahan. Setiap orang mempunyai hak untuk menduduki jabatan tertinggi dalam negara atau dengan kata lain menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Oleh karena itu sistem

pemerintahan menurut ajaran Islam bukan sistem kerajaan tetapi sistem republik (Sukarna, 1990: 114).

Sebagai politisi dengan pengalaman puluhan tahun, Zia ul-Haq tidak kekurangan akal untuk menghadapi protes Benazir Bhutto. Terbukti segera setelah pengadilan memenangkan tuntutan Benazir Bhutto, Zia ul-Haq menurunkan kebijakan *Islamic Legal Code* (tanggal 15 Juni 1988) sebagai hukum tertinggi di Pakistan (Dhuroruddin Mashad, 1996: 35). *Islamic Legal Code* artinya Syariah yang berorientasi pada Al-Qur'an dan Al-Hadist merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagai norma dasar dan penuntun bagi semua pembuatan kebijakan negara. Kebijakan baru Zia ul-Haq, menimbulkan ketidaksenangan dari kaum fundamentalis Islam yang menganggap *Islamic Legal Code* hanya sebagai "kosmetik" bagi pemerintahan Zia ul-Haq dan berakibat pada membeloknya haluan JI (*Jamaat Islami*) yang selama ini sebagai pendukung utama pemerintah menjadi oposan (Dhurorudin Mashad, 1996: 37).

Pada masa pemerintahan Zia ul-Haq para politisi banyak yang dijebloskan ke dalam penjara selama bertahun-tahun oleh pengadilan-pengadilan hukum darurat militer karena tindakan-tindakan politik dan karena menentang rejim militer. Banyak politisi yang mengasingkan diri ke luar negeri karena alasan yang sama. Pada masa pemerintahan Zia ul-Haq terjadi pembelengguan media massa terutama pemberitaan mengenai politik dan berita dari pihak oposisi. Mahasiswa-mahasiswa tidak diperbolehkan berorganisasi selain itu universitas-universitas dijaga dengan ketat oleh militer (*Angkatan Bersenjata*, 23 Maret 1989:4).

Presiden yang saat itu dijabat oleh Zia ul-Haq berhak membubarkan parlemen dan memecat Perdana Menteri. Hal ini telah dibuktikan Zia ul-Haq dengan pembubaran parlemen hasil pemilu tahun 1985 dan pemecatan terhadap Perdana Menteri Khan Junejo pada tahun 1988 (Dhuroruddin Mashad, 1996: 30).

Pada masa pemerintahan Zia ul-Haq banyak muncul oposan dengan oposan terdepan adalah Benazir Bhutto yang telah menjadi oposan selama 11 tahun pemerintahan Zia ul-Haq. Dan kini ditambah dengan munculnya oposan dari Mohammad Khan Junejo yang sakit hati setelah dipecat dari kedudukannya sebagai Perdana Menteri oleh Zia ul-Haq serta oposan dari *Jamaat Islami* yang selama ini sebagai pendukung utama pemerintahan Zia ul-Haq.

Pada tanggal 17 Agustus 1988 Jendral Zia ul-Haq tewas dalam kecelakaan pesawat. Kematian Zia ul-Haq tidak sertamerta mempermudah jalan Benazir Bhutto menuju puncak kekuasaan di Pakistan. Para pendukung dan fanatik Zia ul-Haq yang mengaku meneruskan cita-cita politik Zia ul-Haq “Ziaisme” dengan tokoh utama Nawaz Sharif muncul sebagai pesaing baru dalam perebutan kekuasaan. Lengkap sudah perjuangan berat Benazir Bhutto dalam mencapai puncak pimpinan dengan persaingan antar oposisi yang begitu ketat dan kini ditambah oleh fanatik Zia ul-Haq.

Benazir Bhutto mampu meyakinkan para oposan untuk bergabung. Bagaimana Benazir Bhutto akhirnya mampu meyakinkan para politisi ini untuk bergabung dibawah kepemimpinannya bahkan JI (*jamaat Islami*) yang beraliran fundamentalis dan tidak menyetujui wanita sebagai pemimpin. Terbentuklah persatuan oposisi di bawah kepemimpinan Benazir Bhutto sehingga mencapai kemenangan dalam pemilu dengan sistem partai pada bulan November 1988.

Kemenangan dalam pemilu tidak langsung mengantarkan Benazir Bhutto ke kursi Perdana Menteri. Meskipun berhasil meraih suara terbanyak, *Pakistan People's Party* (PPP) pimpinan Benazir Bhutto gagal mendapat suara mayoritas mutlak yang diperlukan agar bisa membentuk pemerintahan tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain. Dalam sistem parlementer yang berlaku di Pakistan, sebuah kekuatan politik hanya bisa membentuk pemerintahan jika didukung oleh, sekurang-kurangnya 119 wakil di Majelis Nasional. Dengan 92 kursi yang berhasil diraih *Pakistan People's Party* (PPP), berarti Benazir Bhutto memerlukan dukungan tambahan dari sedikitnya 27 anggota non *Pakistan People's Party* (PPP) di parlemen. Akhirnya Benazir Bhutto mampu mendapatkan dukungan tambahan dan mendapat mosi kepercayaan dari Majelis Nasional untuk menjadi Perdana Menteri di Pakistan. Bagaimana akhirnya Benazir Bhutto berhasil mendapatkan dukungan tambahan sehingga pada tanggal 1 Desember 1988 Benazir Bhutto mendapatkan mosi kepercayaan dari Majelis Nasional untuk memimpin Pakistan. Dan secara resmi Benazir Bhutto dilantik sebagai Perdana Menteri Pakistan pada 2 Desember 1988.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti tentang permasalahan di atas dalam penulisan skripsi dengan judul “Politik Benazir Bhutto Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pakistan Tahun 1979–1988”.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah politik Benazir Bhutto dalam perebutan kekuasaan di Pakistan tahun 1979-1988, maka untuk menjabarkan permasalahan tersebut akan dipandu melalui pertanyaan utama sebagai berikut:

- 1 Bagaimana latar belakang politik Benazir Bhutto dan bagaimana politik Benazir Bhutto?
- 2 Bagaimana situasi politik di Pakistan masa pemerintahan M. Zia ul-Haq?
- 3 Bagaimana proses politik yang dijalani Benazir Bhutto dalam mencapai puncak kekuasaan di Pakistan?
- 4 Apa hambatan yang dihadapi dan keberhasilan yang dicapai Benazir Bhutto?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menjawab perumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui:

- 1 Latar belakang politik Benazir Bhutto dan politik Benazir Bhutto.
- 2 Situasi politik di Pakistan masa pemerintahan M. Zia ul-Haq.
- 3 Proses politik Benazir Bhutto dalam mencapai puncak kekuasaan di Pakistan.
- 4 Hambatan yang dihadapi dan keberhasilan yang dicapai Benazir Bhutto.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini yaitu:

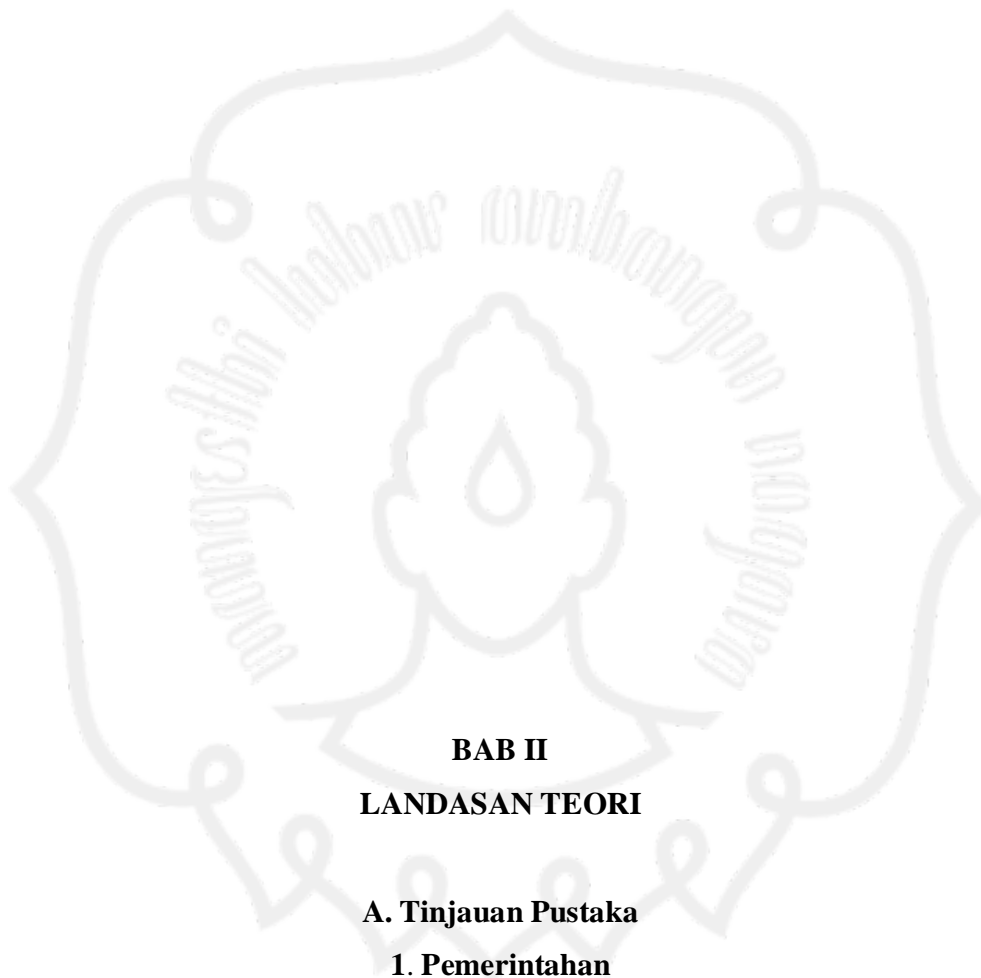
### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memperkaya khasanah pengetahuan sejarah, yang berkaitan dengan perkembangan politik di kawasan Asia Selatan khususnya Negara Pakistan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- b. Dapat melengkapi koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan mengenai perkembangan politik di kawasan Asia Selatan khususnya Negara Pakistan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pemerintahan**

###### **a. Pengertian Pemerintahan**

Secara epistemologis, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 859) kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

- 1) perintah adalah kata yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.



- 2) pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah-negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- 3) pemerintahan adalah (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah.

Van Poelie dalam Koentjoro Purbopranoto (1975: 41) pemerintahan didefinisikan dalam arti luas dan arti sempit, yaitu:

Pemerintahan dalam arti sempit adalah sebagai organ atau badan/alat kelengkapan negara yang disertai pemerintahan (*government/bestuur*). Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah sebagai fungsi yakni yang meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat pemerintahan (*bestuursorganen*) untuk mencapai tujuan pemerintahan (*administration*).

Menurut Koentjoro Purbopranoto (1975: 40) “Ada dua pengertian mengenai pemerintahan, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit”. Pemerintahan dalam arti luas, Koentjoro Purbopranoto mengambil pengertian dari Montesquieu dengan ajaran *trias politica* yaitu meliputi tiga kekuasaan; pembentukan undang-undang (*la puissance legislative*), pelaksanaan (*la puissance executive*), dan peradilan (*la puissance de juger*). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit ialah hanya badan pelaksana (*executive, bestuur*) saja, tidak termasuk badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian.

Tugas pemerintahan dapat diartikan secara negatif adalah tugas penguasa yang bukan peradilan atau perundang-undangan penguasa atau *overheid*. Pemerintahan diartikan sebagai kekuasaan keseluruhan organisasi yang terbentuk dengan tujuan untuk menyusun dan menegakkan masyarakat dalam satu wadah negara. Pemerintah mempunyai kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif yang ketiganya merupakan cabang pemerintahan.

Van Vollenhoven dalam Koentjoro Purbopranoto (1975: 40) “Pemerintahan meliputi membuat aturan (*regel-geven*), pelaksana memerintah (*bestuur*), peradilan (*rechtspraak*), dan polisi (*politie*)”. Menurut A.M.Donner dalam Koentjoro Purbopranoto (1975: 40) “Pemerintahan meliputi badan-badan pemerintah di pusat, yang menentukan haluan negara dan instansi-instansi yang melaksanakan keputusan badan-badan tersebut di atas”.

Dalam M. Hutauruk (1983: 173) pemerintahan diartikan dalam arti luas dan arti sempit, yaitu:

Pemerintahan dalam arti luas terdiri atas semua hal yang dijalankan dalam negara itu: 1) pembuatan undang-undang dan peraturan-peraturan umum; 2) usaha-usaha untuk mencapai tujuan negara; 3) kepolisian untuk menjamin ketertiban; 4) peradilan guna mengadili dan menyelesaikan semua macam perkara (perdata dan pidana) dan sengketa (dibidang akomodasi perumahan, perburuhan dan lain-lain). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit terdiri atas usaha-usaha untuk mencapai tujuan negara dan kepolisian untuk menjamin ketertiban.

Pemerintahan dalam C.S.T Kansil (1981: 21) dibedakan dalam arti luas dan arti sempit : “Pemerintahan dalam arti luas ialah semua organ negara, termasuk DPR. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit ialah badan eksekutif”. Berdasarkan Hukum Tata Negara R.I. (UUD 1945) pemerintah itu Presiden, Wakil Presiden dengan Menteri–menteri Negara (S. Pamudji, 1994: 5). Hal ini berlaku bagi negara–negara pada umumnya, baik yang menganut sistem pemerintahan presidensiil maupun yang menganut sistem pemerintahan parlementer, akan tetapi di dalam sistem pemerintahan parlementer yang dimaksud dengan pemerintahan dalam arti sempit ialah Perdana Menteri dan Kabinetnya.

Dalam kepustakaan Inggris dijumpai kata “*government*” yang sering diartikan baik sebagai “pemerintah” ataupun sebagai “pemerintahan”. Pendapat C F Strong dalam S. Pamudji (1994: 3-4):

*Government is, therefore, that organization in which is vested the right to exercise sovereign powers. Government in the broad sense in which we colloquially use it to day, when ... . Government, in the broader sense, is charged with the maintenance of the peace and security of state within and without. It must, therefore, have, first military power, or the control of armed forces; secondly, legislative power, or the means of making laws; thirdly, financial power, or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending the state and of enforcing the law it makes on the state's behalf.*

Strong menambahkan: “*It must, in short, have legislative power, executive power and judicial power, which we may call the three departemens of government*”. Dari uraian di atas nampak dengan jelas bahwa kata “*government*” (yang dapat mempunyai arti pemerintah dan pemerintahan) mempunyai arti luas yang meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Sementara itu Samuel Edward Finer dalam S. Pamudji (1994: 5) “*government*” paling sedikit mempunyai empat arti yaitu:

- 1) Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*).
- 2) Menunjukkan masalah–masalah (hal ihkwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*states of affairs*).
- 3) Menunjukkan orang–orang (maksudnya pejabat–pejabat) yang dibebani tugas–tugas untuk memerintah (*people charged with the duty of governing*).
- 4) Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by which a particular society is governed*).

S.E Finer membagi pemerintahan dalam arti sempit dan arti luas:

Pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organisasi–organisasi atau badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Dari pendapat–pendapat mengenai pemerintahan di atas dapat disimpulkan, pemerintahan dilakukan oleh organisasi atau badan–badan sejawatnya dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi untuk memerintah rakyat, sehingga tercapai tujuan dari suatu negara tersebut.

#### **b. Bentuk–Bentuk Pemerintahan**

Menurut MC. Iver (1983: 163-169) bentuk–bentuk pemerintahan ada beberapa macam yaitu:

- 1) Monarki.

Monark (raja) itu secara harfiah berarti “satu–satunya yang memerintah”, dan kata itu benar–benar mengandung arti kekuasaan absolut. Monarki pada dasarnya adalah suatu sistem pemerintahan yang turun–temurun.

- 2) Kediktatoran.

Kediktatoran asal mulanya bukanlah suatu bentuk pemerintahan tetapi suatu penundaan sementara dari pemerintahan yang reguler karena menghadapi satu krisis yang gawat, yang menghendaki seorang pemimpin yang dapat diandalkan untuk menjalankan kekuasaan yang otokratis agar dapat mengakhiri krisis.

- 3) Teokrasi.

Pada segi formalnya teokrasi berbeda dari kediktatoran dan dari monarki, dalam hal ini bahwa kepala pemerintahannya tidak turun temurun seperti monarki atau ditegakkan melalui *coup d'etat* seperti kediktatoran. Kepala pemerintahan yang teokratis biasanya adalah pilihan para kasta pendeta. Teokrasi dapat berdiri sebagai teorita menyeluruh dimana kedaulatan dari kepala pemerintahan sementara itu tunduk pada pengarahannya akhir dari kepala keagamaan.

4) Kepemimpinan yang bersifat plural.

Sistem pemerintahan dengan beberapa pemerintahan yang sama hak kekuasaannya atau dengan dua kepala atau lebih yang masing-masing unggul dibidang yurisdiksi tidak jarang terdapat dalam asosiasi dengan negara kesukuan (*tribal-state*) atau dengan negara kota (*city-state*).

5) Monarki terbatas.

Monarki yang dibatasi tidaklah membuatnya jadi demokrasi, monarki hampir selalu dibatasi oleh beberapa kondisi konstitusional. Pembatasan-pembatasan yang ditentukan pada kekuasaan raja atau monark mungkin saja untuk kepentingan kelas yang sedang memerintah atau kelompok yang dominan.

6) Republik.

Antithesis republik berdasarkan sejarah adalah monarki, dan istilah "Republik" agak bebas diterapkan pada hampir semua jenis pemerintahan yang kepala pemerintahannya bukan raja dan mempunyai sistem pemilihan untuk menduduki suatu jabatan politik, dengan pembatasan-pembatasan apapun.

7) Demokrasi langsung.

Madison dalam bukunya "*The Federalist*" membedakan antara "demokrasi" dan "republik" suatu sistem pemerintahan perwakilan dan dengan demokrasi dimaksud suatu sistem dimana rakyat berkumpul dan langsung memerintah.

Aristoteles dalam F. Isjwara (1982: 187) mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Monarkhi (berasal dari bahasa Yunani "*monos*" yang berarti satu dan "*archein*" yang berarti menguasai, memerintah), atau kerajaan adalah bentuk

pemerintahan dalam mana seluruh kekuasaan dipegang oleh seseorang yang berusaha mewujudkan kesejahteraan umum.

- 2) Tirani ialah bentuk-bentuk pemerintahan dimana kekuasaan juga berpusat pada satu orang, tetapi yang berusaha mewujudkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak mengindahkan kesejahteraan umum.
- 3) Aristokrasi (berasal dari kata-kata Yunani "*aristoi*": kaum bangsawan atau cendekiawan dan "*kratein*"; kekuasaan) ialah bentuk pemerintahan dalam mana kekuasaan negara berpusat pada beberapa orang yang berikhtiar mewujudkan kesejahteraan umum. Bentuk merosotnya adalah oligarkhi (dialihkan dari "*oligoi*": beberapa dan "*archein*") yakni pemerintahan beberapa orang yang mengutamakan kepentingan golongannya sendiri.
- 4) Polity adalah bentuk pemerintahan dalam mana seluruh warga negara turut serta mengatur negara dengan maksud mewujudkan kesejahteraan umum.
- 5) Demokrasi (berasal dari kata "*demos*" :rakyat dan "*kratein*") yang ekstrim adalah bentuk merosot dari pada "*polity*".

Bentuk pemerintahan menurut C.S.T. Kansil (1981: 21-23) antara lain :

- 1) Kerajaan atau Monarki, ialah negara yang dikepalai oleh seorang raja yang bersifat turun-temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain raja, kepala negara suatu monarki dapat berupa kaisar atau syah.
- 2) Republik, ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu.
- 3) Diktatur, adalah negara yang diperintah oleh seorang diktator dengan kekuasaan mutlak. Diktator memerintah selama dapat mempertahankan dirinya.

Menurut Leon Duguit yang dikutip oleh C.S.T. Kansil (1981: 25) "Bentuk pemerintahan ada dua yaitu Republik (tidak turun-temurun kepala negaranya) dan Monarki (turun-temurun kepala negaranya)". Plato dalam Abu Daud Busroh (1990: 5-6) bentuk pemerintahan ada lima yaitu:

- 1) Atovarchi, yaitu pemerintahan oleh para aristokrat atau cendekiawan untuk kepentingan seluruh warganya dengan pikiran keadilan.

- 2) Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh para aristokrat atau cerdik pandai yang ingin mencapai kemasyuran dan kehormatan.
- 3) Oligarsi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang kaya untuk kepentingan kelompoknya.
- 4) Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh seluruh rakyat tetapi mereka tidak mengerti sama sekali mengenai pemerintahan.
- 5) Tirani, yaitu pemerintahan seorang penguasa yang memerintah secara absolut dan sewenang-wenang.

Menurut Abu Daud Busroh (1990: 5):

“Bentuk pemerintahan umumnya ada dua yaitu republik dan kerajaan. Republik apabila kepala negaranya seorang presiden yang dipilih secara berkala oleh rakyat atau lembaga perwakilan dan disebut kerajaan apabila kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu yang bertahta berdasarkan keturunan”.

Sedangkan menurut Abu Daud Busroh (1990: 10-15) bentuk atau sistem pemerintahan ada tiga macam:

- 1) Bentuk pemerintahan dimana adanya hubungan yang erat antara eksekutif dan parlemen. Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai atau organisasi yang mayoritas di parlemen. Dalam hal ini rakyat tidak langsung memilih Perdana Menteri dan kabinetnya tetapi hanya memilih anggota parlemen. Dengan terpilihnya parlemen maka akan terbentuk eksekutif (kabinet).
- 2) Bentuk pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara badan legislatif (parlemen) dengan eksekutif dan juga dengan badan yudikatif. Menurut bentuk pemerintahan seperti ini presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden bukan dipilih oleh parlemen tetapi presiden bersama parlemen bersama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilu.
- 3) Bentuk pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif atau *system swiss*.

Bentuk pemerintahan Republik Islam Pakistan sesuai dengan pendapat Abu Daud Busroh yakni bentuk pemerintahan dimana ada hubungan yang erat antara



eksekutif dan parlemen. Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh parlemen dari partai atau organisasi yang mayoritas di parlemen. Dalam hal ini rakyat tidak langsung memilih Perdana Menteri dan kabinetnya tetapi hanya memilih anggota parlemen. Dengan terpilihnya parlemen maka akan terbentuk eksekutif (kabinet). Pemerintahan di Republik Islam Pakistan dipegang oleh Presiden sebagai kepala konstitusional dan Perdana Menteri sebagai kepala eksekutif yang dipilih untuk suatu masa jabatan tertentu.

### **c. Sistem Pemerintahan**

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah yaitu sistem dan pemerintahan. Menurut Soerjono Soekanto (2002: 6) “Sistem adalah suatu himpunan atau kesatuan dari unsur-unsur yang saling berhubungan selama jangka waktu tertentu, atas dasar pada pola tertentu”. Sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhannya.

*Webster New Colligiate Dictionary* dalam Sukarna (1981: 13) “Sistem adalah suatu kumpulan pendapat-pendapat, prinsip-prinsip dan lain-lain, yang membentuk suatu kesatuan yang berhubung-hubungan satu sama lain”. Sedangkan menurut *Advanced Learner’s Dictionary* dalam Sukarna (1981: 13) “Sistem adalah kumpulan fakta-fakta, pendapat-pendapat, kepercayaan-kepercayaan dan lain-lain, yang disusun dalam suatu cara yang teratur”. Menurut Rusadi Kantaprawirja (1980: 41) “Sistem yaitu suatu kesatuan dimana didalamnya terdapat unsur-unsur, elemen-elemen, bagian-bagian yang terikat dalam suatu unit yang satu sama yang lain berada dalam keadaan kait-mengkait dan fungsional”.

Dalam Sukarna, (1981: 13) “Sistem adalah sesuatu yang berhubung-hubungan satu sama lain, sehingga membentuk satu kesatuan”. Menurut Abu Daud Busroh (1990: 7) “Sistem adalah suatu susunan atau tatanan berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan”.

Menurut S. Pamudji (1994: 9) “Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-

bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh”. Sedangkan menurut Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews (1993: 23) “Sistem yaitu suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhi”.

Dari pendapat di atas jelas bahwa sistem dapat diartikan sebagai suatu yang lebih tinggi dari pada hanya merupakan suatu cara, tata, rencana, prosedur atau metode, dan sistem adalah cara yang mekanismenya berpola, sehingga sistem merupakan tinjauan konsep makro dan ada tinjauan konsep mikro yang berarti di dalam suatu sistem dapat saja terdapat beberapa sistem yang lebih kecil.

Dari pengertian-pengertian mengenai sistem dan pemerintahan, maka hakekat sistem pemerintahan yaitu hubungan mekanisme antara badan-badan negara dan perangkat fungsinya dalam rangka mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Abu Daud Busroh (1990: 7) “Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut”.

Menurut S. Pamudji (1987: 10) “Sistem pemerintahan adalah pemerintahan, dimana di dalamnya terdapat badan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri, yang mempunyai fungsi masing-masing, saling berhubungan satu dengan yang lain menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan pemerintahan negara”.

Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya, baik langsung maupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara tersebut. Republik Islam Pakistan menggunakan sistem pemerintahan parlementer federal, dengan Presiden sebagai kepala konstitusional dan Perdana Menteri sebagai kepala eksekutif. Kepada keempat majelis-majelis propinsinya yaitu Sind, Punjab, Baluchistan, dan Perbatasan Barat Laut, diberi kekuasaan dan wewenang tertentu dalam menjalankan pemerintahan (Rachmad Bratamidjaja dkk, 1990: 199).

#### **d. Pemerintahan Yang Baik**

Setiap orang mempunyai hak untuk menduduki jabatan tertinggi dalam negara atau dengan kata lain menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Oleh karena itu sistem pemerintahan menurut ajaran Islam bukan sistem kerajaan tetapi sistem republik (Sukarna, 1990: 114). Pemerintahan terbaik menurut Plato yang dikutip oleh A.Rahman Zainuddin (1992: 186) ialah “Kerajaan yang dipimpin oleh seorang Raja-filsuf yang telah mengumpulkan dalam dirinya segala bentuk ilmu pengetahuan dan pengalaman empiris, dengan penataan negara harus berdasarkan latihan, pengabdian, tidak mementingkan diri sendiri dan menguasai ilmu pengetahuan”. Sedangkan menurut Aristoteles (F. Isjwara, 1982: 187) terdapat “Tiga bentuk pemerintahan yang baik yaitu Monarki, Aristokrasi dan *Polity*”.

Menurut S. Pamudji (1994: 20) “Pemerintahan demokrasi dan pemerintahan kediktatoran lebih cocok dengan dan mendekati kenyataan yang ada sekarang”. Banyak negara-negara di Dunia ini tergolong ke dalam negara demokrasi walaupun terdapat variasi mengenai luas dan mendalamnya fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah. Bahkan pemerintahan negara-negara tertentu tetap menggolongkan dirinya demokrasi walaupun pada hakekatnya merupakan kediktatoran.

## 2. Kekuasaan

### a. Pengertian Kekuasaan

Konsep kekuasaan dalam ilmu politik adalah suatu konsep yang banyak dibahas, karena konsep ini mempunyai sifat yang sangat mendasar. Dalam ilmu sosial pada umumnya dan pada ilmu politik pada khususnya. Miriam Budiardjo (1982: 35) mendefinisikan “Kekuasaan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan”. Menurut P.J. Bouman (1976: 42-43) “Kekuasaan itu artinya kemungkinan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain”.

Menurut Veithzal Rivai (2004: 386) “Kekuasaan adalah kemampuan membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan oleh pihak lainnya”. Dalam Samuel P. Huntington (2004: 167), kekuasaan adalah:

Tindakan melalui intensitas pengaruh yang dilakukan seseorang atau kelompok akan menghasilkan perubahan perilaku orang lain atau kelompok lain, yang dapat

dilakukan secara persuasif, koersif atau dengan teguran. Dalam konteks ini, menuntut adanya penggunaan kekuatan secara ekonomi, militer, institusional, demografis, politis, teknologis, sosial atau melalui sumber kekuatan lainnya.

Menurut Poerwadarminta (2003: 622) “Kekuasaan adalah kemampuan dan kekuatan untuk memerintah yang ada dibawah atau dikuasai; daerah-daerah yang termasuk dalam pemerintahan suatu negara”. Menurut Robert Dahl (1985: 49-50) “Kekuasaan adalah jika orang A mempunyai kekuasaan atas B, A bisa meminta B untuk melaksanakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh B terhadap A”. Menurut A. Yusuf Ali dalam A. Rahman Zainuddin (1992: 113) “Kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendaknya, sehingga tidak ada yang menentang dan menetralsir”.

Veithzal Rivai (2004: 385) mengutip beberapa definisi kekuasaan dari beberapa tokoh diantaranya adalah:

- 1) Max Weber: “Kekuasaan adalah suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang mampu menghilangkan rintangan”.
- 2) Waltherd Nord: “Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi aliran energi dan dana yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda secara jelas dari tujuan lainnya”.
- 3) Russel: “Kekuasaan dipergunakan hanya jika tujuan–tujuan tersebut paling sedikit mengakibatkan perselisihan satu sama lain. Kekuasaan adalah suatu produksi dari akibat yang diinginkan”.
- 4) Bierstendt: “Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempergunakan kekuatan”.
- 5) Wrona: “Kekuasaan adalah suatu kontrol atas orang lain yang berhasil”.
- 6) Rogers: “Kekuasaan sebagai suatu potensi dan suatu pengaruh”

Menurut Soerjono Soekanto (1983: 53) “Kekuasaan adalah suatu proses, dimana satu pihak mempengaruhi pihak lain sedemikian rupa, sehingga pihak lain tersebut mengikuti kehendak pihak yang pertama”. Dalam D. Hendropuspito O.C (1989: 115) “Kekuasaan ialah kemampuan (*capacity*) yang ada pada seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi pihak lain supaya menurut kehendaknya baik dengan cara meyakinkan maupun dengan memaksa”. The Liang Gie (1984: 31) “Kekuasaan ialah

kemampuan untuk mengemudikan perilaku pihak lain”. Sedangkan Lasswell dan Kapler yang dikutip oleh F. Isjwara (1982: 52) “Kekuasaan adalah pemegang peranan terpenting dalam setiap pengambilan keputusan, maka sebenarnya orang itulah yang memegang kekuasaan”.

Soerjono Soekanto (2002: 268) “Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan”. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak-pihak lainnya, adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh itu, rela atau karena terpaksa. Dalam Syahrial Syarbaini, A. Rahman dan Monang Djihado (2005: 48) “Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya”. Orang yang tinggi kebutuhan kekuasaan umumnya: 1). mempunyai sifat bersaing dan agresif, 2). berminat memiliki *prestise*, 3). lebih menyukai situasi tindakan, 4). menjadi anggota sejumlah kelompok.

Setiap ahli politik mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai pengertian kekuasaan. Akan tetapi dari beberapa pengertian mengenai kekuasaan di atas dapat disimpulkan sebagai inti yang selalu ada dalam perumusan kekuasaan, yaitu bahwa kekuasaan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain, sehingga tingkah laku akhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.

### **b. Sumber Kekuasaan**

Menurut Miriam Budiardjo (1982: 36) “Sumber kekuasaan terdapat dalam berbagai segi, yaitu kekerasan fisik, kedudukan, kekayaan, kepercayaan, atau agama dan hubungan kekerabatan”. Dalam Soerjono Soekanto (2002: 268) “Sumber kekuasaan adalah hak milik kebendaan, kedudukan, birokrasi, kemampuan khusus dalam ilmu-ilmu pengetahuan dan peraturan-peraturan hukum tertentu”. Sumber kekuasaan dalam Syahrial Syarbaini, A. Rahman dan Monang Djihado (2005: 48) adalah “Hak milik kebendaan, kedudukan sosial, birokrasi, dan intelektualitas”. Menurut Robert Bierstedt yang dikutip R.A. Schermerhorn (1987: 16) “Sumber kekuasaan antara lain sejumlah manusia,

organisasi sosial dan sumber daya”. Sedangkan menurut M.J. Herskovits yang dikutip oleh R.A. Schermerhorn (1987: 19) “Sumber kekuasaan adalah kualitas tertentu yang dimiliki pribadi”.

Menurut Ibn Khaldun yang dikutip oleh A. Rahman Zainuddin (1992:137) “Hak milik kebendaan dan kedudukan adalah sumber kekuasaan. Birokrasi juga merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping kemampuan-kemampuan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu ataupun atas dasar peraturan-peraturan hukum tertentu”. Kekuasaan tidak dapat ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjang. Kekuatan penunjang hanya dapat diberikan oleh solidaritas dan kelompok yang mendukungnya. Tanpa suatu kekuatan yang selalu dalam keadaan siap siaga, dan bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kepentingan bersama, maka kekuasaan penguasa tidak dapat ditegakkan.

Menurut D.Hendropuspito O.C (1989: 117-120) Sumber kekuasaan antara lain:

- 1) Pengetahuan yang unggul.
- 2) Kekayaan material.
- 3) Disiplin yang tinggi.
- 4) Mayoritas yang bersatu.
- 5) Hukum.

Sumber kekuasaan menurut Agustinus, Thomas Aquinus, dan Marsilius yang dikutip oleh F. Isjwara (1982: 149) adalah “Berasal dari Tuhan”. Sedangkan Teori Hukum Alam yang dipelopori oleh Johannes Althusius, berpendapat bahwa “Kekuasaan itu berasal dari rakyat dan asal kekuasaan yang ada pada rakyat ini tidak lagi dianggap dari Tuhan, melainkan dari alam kodrat”. Sedangkan menurut J.J Rousseau “Kekuasaan bersumber pada masyarakat, kemudian dengan melalui perjanjian masyarakat, kekuasaan itu diserahkan kepada penguasa atau raja”.

Menurut M.Hutauruk (1983: 29-30) sumber kekuasaan antara lain:

- 1) Kekuatan fisik, di dalam hal negara adalah Angkatan Bersenjata.
- 2) Kekuatan ekonomi-keuangan.
- 3) Kekuatan politik, partai politik dan organisasi massanya membuka pintu untuk memegang tampuk pimpinan negara.
- 4) Kekuatan sosial, kaum pemimpin agama dimana-mana dan pada waktu tertentu dalam sejarah sangat berkuasa, umpamanya dewasa ini di Iran. Para pengarang,



wartawan, pemuda, mahasiswa, wanita, serikat kerja dan lain-lainnya merupakan kekuatan sosial yang tidak dapat diremehkan.

Preffer dalam Veithzal Rivai (2004: 391):

Kekuasaan terutama ditentukan atau bersumber dari struktur di dalam organisasi. Preffer memandang struktur dalam organisasi, sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur organisasi. Dalam tatanan struktur organisasi, kebijakan pengambilan keputusan, dialokasikan keberbagai posisi, juga struktur membentuk pola komunikasi, dan arus informasi.

Jadi, struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan wewenang formal dengan mengkhususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas pekerjaan khusus, dan mengambil keputusan tertentu, serta dengan mendorong kekuasaan informal, melalui dampak atau struktur informasi dan komunikasi dalam sistem tersebut.

Sumber kekuasaan menurut Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Helenan S. Robin (1989: 120) adalah:

- 1) Dedikasi terhadap cita-cita yang tinggi.
- 2) Kesetiaan kepada partai dan teman.
- 3) Mempunyai karisma dan kecakapan untuk tidak memihak dalam konflik.
- 4) Jujur memainkan peranan-peranan di dalam kelompok yang dipimpin orang lain.

Sumber kekuasaan yang dimiliki oleh Benazir Bhutto adalah kekayaan, ilmu pengetahuan atau intelektualitas, kharisma yang diturunkan oleh ayahnya yakni P.M. Zulfikar Ali Bhutto. Dedikasi terhadap cita-cita yang tinggi dengan perjuangan mewujudkan tegaknya demokrasi di Pakistan yang sudah lama di cita-citakan oleh rakyat, partai politik dan organisasi massa yang membuka pintu bagi Benazir Bhutto untuk memegang tampuk pimpinan negara, serta kemampuan mengerahkan kekuatan fisik dan mengorganisasi orang banyak karena kesetiaan Benazir Bhutto kepada partai dan teman.

### **c. Bentuk Kekuasaan**

Kekuasaan biasanya berbentuk pengaruh kepada orang lain dengan sanksi hukuman bagi yang tidak mematuhi dan lebih menuntut kerelaan yang besar (Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Helenan S. Robin, 1989: 121). Menurut Miriam Budiardjo (1982: 35-36) "Kekuasaan berbentuk hubungan antara pihak yang memerintah dan pihak

yang diperintah atau mentaati perintah”. Dalam hubungan ini tidak ada persamaan derajat, keadaannya selalu yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan kekuasaan.

Menurut Veithzal Rivai (2004: 387-390) terdapat lima bentuk kekuasaan yaitu:

1) Kekuasaan Legitimasi (*Legitimate Power*)

Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi karena posisinya, seseorang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang lebih rendah kedudukannya. Setiap orang yang mempunyai kekuasaan legitimasi menggunakan kekuasaan tersebut dengan bakat masing-masing. Kekuasaan legitimasi sesuai dengan konsep Weber tentang wewenang. Para bawahan memainkan peran utama dalam pelaksanaan kekuasaan legitimasi jika bawahan memandang penggunaan kekuasaan itu sah, mereka akan patuh., akan tetapi budaya, kebiasaan, dan sistem nilai menentukan batas kekuasaan legitimasi.

2) Kekuasaan Imbalan (*Reward Power*)

Jenis kekuasaan ini didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada pengikutnya yang disertai dengan kepatuhan mereka untuk mendukung kekuasaan legitimasi, jika pengikut memandang imbalan atau kemungkinan imbalan yang dapat disediakan seseorang sebagai sesuatu yang bernilai, (pengakuan, penugasan suatu pekerjaan peningkatan upah, sumber tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan) mereka tanggap terhadap perintah, permintaan dan petunjuk.

3) Kekuasaan Paksaan (*Coercive Power*)

Kekuasaan untuk menghukum, para pengikut patuh karena takut. *Reward power* atau *coercive power* adalah dua bentuk kekuasaan yang diterapkan ketika era Orde Baru, maka bila ada masyarakat yang berprestasi atau mendukung kebijakan penguasa diberi penghargaan atau imbalan, lain halnya bila seseorang atau kelompok melakukan protes atas kebijakan penguasa, maka akan mendapat hukuman.

4) Kekuasaan Ahli (*Expert Power*)

Seseorang memiliki keahlian, bila mempunyai keahlian yang lebih tinggi, maka dengan keahliannya akan mempunyai kekuasaan meskipun peringkat mereka rendah, seseorang dapat memiliki keahlian teknis, administratif atau keahlian yang menyangkut persoalan manusia.

5) Kekuasaan Referen (*Referent Power*)

Banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang tersebut. Kharisma orang yang bersangkutan adalah basis kekuasaan referen. Seseorang yang berkharisma dikagumi karena karakteristiknya, kekuatan kharisma seseorang adalah petunjuk adanya kekuasaan referen orang itu. Kharisma adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para politisi, penghibur dan olahragawan.

Menurut Max Weber yang dikutip oleh P.J. Bouman (1976: 43) bentuk kekuasaan antara lain:

- 1) Kekuasaan yang bersifat rasional.
- 2) Kekuasaan yang tradisional.
- 3) Kekuasaan yang bersifat kharisma.

Dalam M. Hutauruk (1983: 197-198) bentuk kekuasaan antara lain:

- 1) Kekuasaan pribadi seseorang baik badani (misalnya kecantikan), maupun rohani (misalnya kepandaian, kecakapan, kerajinan).
- 2) Kekuasaan fisik (besar kecilnya jumlah anggota dan peralatan Angkatan Bersenjata).
- 3) Kekuasaan ekonomi-keuangan.
- 4) Kekuasaan politik.
- 5) Kekuasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6) Kekuasaan sosial (misalnya serikat pekerja).

Bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh Benazir Bhutto adalah kekuasaan legitimasi yakni kemampuannya untuk mempengaruhi karena posisinya, yang lebih tinggi sebagai putri sulung P.M Zulfikar Ali Bhutto, sehingga mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang lebih rendah kedudukannya. Benazir memiliki kekuasaan pribadi seseorang baik badani maupun rohani, dengan kecakapan dan kepandaian yang dimiliki. Selain itu juga memiliki kekuasaan referen dengan mewarisi kharisma yang dimiliki

Zulfikar Ali Bhutto dan memiliki gaya kepribadian yang tangguh sehingga dengan mudah dapat menggalang solidaritas dalam memobilisir massa.

#### **d. Saluran-Saluran Kekuasaan**

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 272-274) dan Syahrial Syarbaini, A.Rahman dan Monang Djihado (2005: 49) kekuasaan di dalam pelaksanaannya dijalankan melalui saluran-saluran tertentu, yaitu:

1) Saluran Militer

Pada saluran ini penguasa lebih banyak menggunakan paksaan serta kekuasaan militer di dalam melaksanakan kekuasaannya. Tujuan utama adalah menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat, sehingga mereka tunduk kepada kemauan penguasa atau sekelompok orang yang dianggap sebagai penguasa.

2) Saluran Ekonomi

Dengan menggunakan saluran-saluran ekonomi, penguasa berusaha untuk menguasai kehidupan masyarakat. Dengan jalan menguasai ekonomi serta kehidupan rakyat, penguasa dapat melaksanakan peraturan-peraturannya serta akan menyalurkan perintah-perintahnya dengan dikenakan sanksi-sanksi tertentu.

3) Saluran Politik

Melalui saluran politik, penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Caranya adalah dengan meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan sah.

4) Saluran Tradisional

Dengan cara menyesuaikan tradisi, pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal di dalam suatu masyarakat, maka pelaksanaan kekuasaan dapat berjalan dengan lancar.

5) Saluran Ideologi

Penguasa-penguasa biasanya mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin, yang bertujuan untuk menerangkan dan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya.

6) Saluran-saluran Lainnya

Saluran-saluran lain disamping yang telah disebutkan diatas, ada pula yang dapat dipergunakan penguasa, misalnya alat-alat komunikasi, media massa, surat kabar, radio, televisi dan lainnya.

Saluran kekuasaan yang digunakan oleh Benazir Bhutto ialah ideologi, dimana Benazir Bhutto berusaha memberikan pengertian kepada rakyat akan pentingnya penegakkan demokrasi di Pakistan dan manfaat besar yang dapat dirasakan rakyat apabila ajaran *Bhuttoisme* diterapkan di Pakistan.

**e. Cara Mempertahankan Kekuasaan**

Pemegang kekuasaan akan selalu memperbanyak atau memperkuat kekuasaan yang sudah ada dengan berusaha mencari kekuasaan lainnya. Sebagai akibat dari usaha mencari kekuasaan tersebut maka pihak yang telah memiliki kekuasaan akan berusaha mempertahankan kekuasaannya supaya jangan hilang. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan diantaranya dengan menggunakan kekuatan seperti menumpas pemberontakan, merintangi pihak lain dengan mengeluarkan larangan-larangan tertentu. Usaha lain yang bisa ditempuh adalah membagi-bagi sebagian kekuasaan diantara beberapa pihak sehingga kekuasaan yang ada dapat dipertahankan (The Liang Gie, 1984: 32).

Menurut Biertedt yang dikutip R.A Schermerhorn (1987: 17) terdapat konsep untuk memperkuat atau mempertahankan kekuasaan, antara lain dengan menggunakan:

- 1) Kekuasaan militer, polisi atau kriminal untuk mengendalikan kekerasan.
- 2) Kekuasaan ekonomi untuk mengendalikan tanah, tenaga kerja, kekayaan maupun produksi.
- 3) Kekuasaan politik untuk mengendalikan pengambilan keputusan yang sah (atau resmi).
- 4) Kekuasaan tradisional atau ideologis untuk mengendalikan sistem kepercayaan dan nilai-nilai, agama, pendidikan, pengetahuan khusus dan propaganda.
- 5) Kekuasaan *diversioner* untuk mengendalikan kepentingan *hedonis*, rekreasi dan pemenuhan kebutuhan sekunder.

Setiap penguasa akan berusaha mempertahankan kekuasaan yang telah didapat dengan cara atau usaha (Sorjono Soekanto, 2002: 275) antara lain:

- 1) Dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik yang merugikan kedudukan penguasa. Peraturan-peraturan lama akan digantikan peraturan baru yang akan menguntungkan penguasa. Keadaan tersebut biasanya terjadi pada waktu ada pergantian kekuasaan dari seseorang penguasa kepada penguasa lain (yang baru).
- 2) Mengadakan sistem-sistem kepercayaan (*belief-system*) yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya. Sistem kepercayaan meliputi agama, ideologi dan seterusnya.
- 3) Pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik.
- 4) Mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal.

Apabila penguasa hanya menguasai bidang-bidang kehidupan yang khusus menyebabkan penguasa tersebut lebih mudah untuk digulingkan, oleh sebab itu seorang penguasa seharusnya dapat pula menguasai bidang-bidang lain disamping keahlian khususnya. Apabila penguasa tersebut tidak sanggup, maka harus berusaha untuk mendekati pihak-pihak lain yang ahli dan mengajak mereka untuk membentuk *the ruling class* sendiri (Syahrial Syarbaini, A.Rahman dan Monang Djihado, 2005: 50). Dalam Miriam Budiardjo (1998: 51) “Apabila dalam salah satu bidang kehidupan terdapat orang kuat yang berkuasa, maka timbul pusat kekuasaan (*power centre*) yang mengakibatkan timbulnya pusat-pusat kekuasaan lain yang merupakan oposisi”. Dengan demikian, penguasa mempunyai beberapa cara untuk memperkuat kedudukannya (yang khusus) antara lain:

- 1) Dengan menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. Cara ini pada umumnya dilakukan dengan cara damai dan persuasif.
- 2) Dengan jalan menguasai bidang-bidang kehidupan masyarakat dengan paksa atau kekerasan. Maksud dan tujuannya adalah untuk menghancurkan atau menguasai pusat-pusat kekuasaan dibidang kehidupan lainnya.

Dalam mempertahankan kekuasaan yang telah dicapai, Benazir Bhutto berusaha untuk mendekati pihak-pihak lain yang ahli dan mengajak mereka untuk membentuk *the ruling class* sendiri. Dalam hal ini Benazir mendekati dan memasukkan pengaruhnya



pada para penguasa feodal (tuan-tuan tanah), para pengusaha dan jutawan, golongan elit agama sakit hati, serta golongan-golongan lain yang kecewa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Zia ul-Haq.

#### **f. Hancurnya Kekuasaan**

Dalam pemikiran Ibn Khaldun yang dikutip A. Rahman Zainuddin (1992: 233) ada beberapa tahap atau proses jatuhnya kekuasaan, yaitu:

- 1) Kekuasaan yang sentralistik, dimana pemusatan kekuasaan dan kemegahan berada pada seorang atau sekelompok penguasa.
- 2) Kekuasaan yang mempunyai tata cara dan kebiasaan hidup dalam kemegahan.
- 3) Kekuasaan yang memiliki pertahanan lemah, tidak mempunyai kekuatan dan legitimasi. Sehingga tinggal menantikan masa kehancurannya.

Selanjutnya Ibn Khaldun menambahkan ciri sebuah kekuasaan yang mendekati kehancuran, yaitu krisis ekonomi dan krisis moral.

Hancurnya kekuasaan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal dalam kekuasaan itu sendiri, akan tetapi bisa dari faktor eksternal, antara lain karena peperangan yang melibatkan dua negara atau lebih, konflik dan perang saudara, kudeta (penggulingan kekuasaan) baik oleh militer maupun sipil, dan aksi-aksi demonstrasi yang memungkinkan pergantian kekuasaan (Mukhamad Najib, 2001:318).

### **3. Konflik**

#### **a. Pengertian Konflik**

Istilah konflik berasal dari kata "*Confligere*" yang berarti saling memukul. Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial dimana dua orang atau kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya (D. Hendropuspito O.C, 1989:247).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 587) konflik diartikan dengan: 1) pertentangan, percekocan, perselisihan, 2) ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri suatu tokoh, pertentangan dua tokoh dsb). Istilah konflik sering diartikan "Suatu proses

pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (konflik, pertikaian, pertentangan)” (Soerjono Soekanto, 2002: 7).

Konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat dan nilai-nilai dari pihak yang bertikai. Seperti yang dikatakan oleh Ariyono Suyono (1985: 211) konflik adalah “Keadaan dimana dua atau lebih dari dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing pihak karena adanya perbedaan pendapat nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak”.

Dalam Veithzal Rivai (2004: 164) “Konflik adalah pertentangan dalam hubungan kemanusiaan (intrapersonal atau interpersonal) antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam mencapai suatu tujuan, yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, emosi/psikologi, dan nilai”. Menurut Sudijono Sastroatmodjo (1995: 243) “Konflik berhubungan dengan benturan seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda”. Sedangkan menurut Mayor Polak (1974: 142) “Konflik mengandung arti saling memukul satu sama lain, untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak”.

Pendapat K.J. Holsti (1992: 169) mengenai konflik secara singkat dan jelas yaitu “ketidaksesuaian sasaran, nilai, kepentingan atau pandangan antara dua pihak atau lebih”. Dalam K.J. Veeger (1990: 211) yang mengutip pendapat Lewis A. Coser tentang konflik yaitu:

Perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaannya yang persediaannya tidak mencukupi, pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan pihak lawan.

Menurut Abu Ahmadi (1975: 93) “Konflik adalah usaha yang disengaja untuk menentang, melawan atau memaksa kehendak terhadap orang lain”. Namun ada istilah lain yang mempunyai arti atau makna yang sama dengan suatu istilah konflik ialah istilah pertikaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Soleman B. Taneko (1984: 122-123):

Pertikaian dapat terjadi karena proses interaksi dimana penafsiran makna perilaku tidak sesuai dari pihak pertama, yaitu pihak yang melakukan aksi, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana tidak terdapat keserasian diantara kepentingan-kepentingan para pihak yang melakukan interaksi. Oleh karena itu

terjadi suatu situasi yang tidak serasi, maka untuk dapat mencapai tujuan yang dikehendaki dilakukan dengan cara mengenyahkan pihak yang menjadi penghalangnya itu. Pada pertentangan atau pertikaian terdapat usaha untuk menjatuhkan pihak lawan dengan kekerasan.

Dari berbagai pendapat tentang konflik tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu pertentangan, pertikaian dan perbedaan pendapat antara dua orang atau kelompok yang terjadi karena adanya interaksi sosial sehingga pihak yang satu berusaha untuk menyingkirkan pihak yang lain.

### **b. Komponen Konflik**

Dalam Veithzal Rivai (2004: 164) konflik terdiri atas tiga komponen yaitu:

- 1) *Interest* (kepentingan), yakni sesuatu yang memotivasi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Motivasi ini tidak hanya dari bagian keinginan pribadi seseorang, tetapi juga dari peran dan statusnya.
- 2) *Emotion* (emosi), yang sering diwujudkan melalui perasaan yang menyertai sebagian besar interaksi manusia seperti marah, kebencian, takut dan penolakan.
- 3) *Values* (nilai), yakni komponen konflik yang paling susah dipecahkan karena nilai itu merupakan hal yang tidak bisa diraba dan dinyatakan secara nyata. Nilai berada dalam kedalaman akar pemikiran dan perasaan tentang benar dan salah, baik dan buruk yang mengarahkan dan memelihara perilaku manusia.

Menurut Ted Robert Gurr dalam Maswadi Rauf (2000: 59) dalam konflik setidaknya ada empat komponen yaitu:

- 1) Ada dua atau lebih pihak yang terlibat.
- 2) Kedua belah pihak terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi.
- 3) Kedua belah pihak menggunakan tindakan-tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, untuk melukai, dan menghalang-halangi lawannya.
- 4) Interaksi yang bertentangan ini, bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang independen.

### **c. Tipe-Tipe Konflik**

Menurut K.J. Holsti (1992: 174) ada enam tipe utama dari konflik:

- 1) Konflik wilayah terbatas, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada pemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh suatu negara di atau dekat wilayah negara lain.
- 2) Konflik yang berkaitan dengan komposisi pemerintah. Tipe konflik ini sering mengandung nada tambahan ideologis yang kuat, maksudnya adalah menjatuhkan suatu rezim dan sebagai gantinya mendirikan satu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan kepentingan pihak yang melakukan intervensi.
- 3) Konflik kehormatan nasional, dimana pemerintah mengancam atau bertindak untuk membersihkan pelanggaran tertentu yang telah diduga.
- 4) Imperialisme regional, dimana suatu pemerintah berusaha untuk menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya demi suatu kombinasi tujuan ideologis, keamanan dan perdagangan.
- 5) Konflik pembebasan atau perang revolusioner yang dilakukan satu negara untuk “membebaskan” rakyat negara lain, biasanya karena alasan-alasan etnis atau ideologis.
- 6) Konflik yang timbul dari tujuan suatu pemerintah untuk mempersatukan suatu negara yang terpecah.

Menurut Abu Ahmadi (1975: 94) bentuk konflik ada dua macam yaitu:

- 1) *Corporate conflict*, yaitu yang terjadi antara *group* dengan *group* dalam satu masyarakat atau dari dua masyarakat, misalnya masing-masing *group* berusaha menekankan kehendaknya kepada *group* lain supaya mereka masing-masing dapat mencapai tujuannya.
- 2) *Personal conflict*, yaitu terjadi antara individu dengan individu. Pembatasan *personal conflict* dalam *group* adalah jauh lebih tajam dari pada pembatasan konflik antara *group* *personal conflict* ini jauh lebih keras dilarang dari pada *cooperative conflict*. Namun *personal conflict* ini jauh lebih *universal*.

Dalam Mawasdi Rauf, (2000: 6) konflik dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Konflik individual, yaitu konflik yang terjadi antara dua orang yang tidak melibatkan kelompok masing-masing. Faktor penyebab konflik adalah masalah pribadi.

- 2) Konflik kelompok, yaitu konflik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih.

Menurut Surbakti dalam Sudiono Sastroatmodjo (1995: 244) konflik dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Zero-sum conflict, yaitu konflik yang bersifat antagonis, dan tidak mungkin diadakan kerjasama atau kompromi diantara keduanya.
- 2) Non zero-sum conflict, yaitu konflik yang dapat diselesaikan baik dengan kompromi maupun dengan kerjasama dan menguntungkan kedua belah pihak, meskipun hasilnya tidak optimal.

Konflik politik menekankan pada perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan dalam usaha mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Di lihat dari sudut konflik sebagai sarana dan sebagai tujuan, Ahmad Fedyani Saifuddin (1986: 64) membagi konflik dalam dua macam yaitu konflik realistik dan konflik non realistik. Konflik yang timbul karena tuntutan-tuntutan tertentu dan diarahkan kepada objek tertentu disebut konflik realistik. Sebaliknya dalam konflik non realistik, konflik itu sendiri sebagai tujuan, tidak dikondisikan oleh objek tertentu dan berfungsi memenuhi kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari sekurang-kurangnya salah satu pihak yang bertentangan.

Konflik yang terjadi di Pakistan ini lebih mendekati pada tipe konflik menurut K.J Holsti yaitu konflik yang berkaitan dengan komposisi pemerintahan. Dimana terjadi persaingan yang tajam antar oposisi untuk dapat menjatuhkan dan menggantikan Pemerintahan Darurat Militer atau rejim Zia ul-Haq dan digantikan dengan pemerintahan sipil yang demokratis. Konflik Pakistan bersifat Non zero-sum conflict, yaitu konflik yang dapat diselesaikan baik dengan kompromi maupun dengan kerjasama dan menguntungkan kedua belah pihak, meskipun hasilnya tidak optimal.

#### **d. Sebab-Sebab Terjadinya Konflik**

Menurut Priyanto Wibowo (2003: 16) sebab-sebab terjadinya konflik adalah sebagai berikut:

- 1) Sebab individual

Dalam persaingan politik peran-peran individu yang didukung oleh bakat-bakat individual, kecerdasan dan faktor-faktor psikologis seringkali sangat menonjol. Munculnya individu-individu yang berhasil keluar sebagai pemenang dalam persaingan-persaingan untuk mendapatkan kedudukan tertentu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas.

2) Sebab kolektif

Duverger dalam Priyanto Wibowo (2003: 20) menyatakan sebab-sebab kolektif konflik yang timbul lebih banyak dianut kaum sosialis dan mereka yang berpandangan konservatif. Bagi kaum sosialis perjuangan antar kelas merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik. Sementara pandangan konservatif menegaskan bahwa konflik-konflik politik lebih banyak disebabkan oleh kompetisi dan persaingan yang terjadi antar ras, antar bangsa, antar komunitas teritorial dan antar kelompok agama ataupun ideologis yang oleh Duverger disebut sebagai konflik dari kelompok-kelompok horizontal.

Dalam Soerjono Soekanto (1982: 94) sebab musabab atau akar dari pertentangan antara lain:

- 1) Perbedaan antara orang perorangan yang mungkin menyebabkan bentrokan antara orang-perorang.
- 2) Perbedaan kebudayaan.
- 3) Bentrokan antara kepentingan-kepentingan, baik kepentingan perorangan maupun kelompok manusia.
- 4) Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya mengenai reorganisasi dari sistem nilai-nilai sebagai akibat perubahan sosial yang menyebabkan disorganisasi dalam masyarakat.

Konflik biasanya ditimbulkan oleh adanya kepentingan yang bertentangan terutama kepentingan ekonomi dan sering juga karena perebutan kekuasaan dan kedudukan (Abu Ahmadi, 1975: 93). Menurut Ralf Dahvendorf yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (1983: 55) menyatakan bahwa:

Pada saat yang bersamaan, kekuasaan dan wewenang merupakan sumber daya yang langka terhadap mana terjadi pertikaian, sehingga menjadi sumber utama terjadinya konflik dan perubahan pola-pola yang telah melembaga. Konflik ini merupakan



suatu pencerminan dari tempat beradanya peranan pada asosiasi yang terkoordinasi secara imperatif dalam hubungannya dengan wewenang.

Menurut K.J. Holsti (1992: 170) penyebab terjadinya konflik yaitu:

- 1) Kedua belah pihak berusaha mencapai tujuan tertentu.
- 2) Kedua belah pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tujuan, tuntutan/tindakan, atau kedua-duanya sehingga akan berjalan berlawanan dengan kepentingan dan tujuan pihak lainnya.
- 3) Ketidaksesuaian pandangan mengenai bidang isu tertentu.

Konflik di Pakistan lebih mengarah pada pendapat Priyanto Wibowo khususnya sebab individual, yakni terjadi persaingan politik peran-peran individu yang didukung oleh bakat-bakat individual, kecerdasan dan faktor-faktor psikologis yang sangat menonjol serta dukungan massa yang kuat. Munculnya individu-individu yang berhasil keluar sebagai pemenang dalam persaingan-persaingan untuk mendapatkan kedudukan. Dan pendapat Abu Ahmadi yakni konflik yang ditimbulkan oleh adanya kepentingan yang bertentangan terutama kepentingan perebutan kekuasaan, dimana satu pihak ingin mempertahankan kekuasaan dan dipihak lain ingin menduduki kekuasaan.

#### **e. Tujuan Konflik**

Tujuan konflik menurut D. Hendropuspito O.C (1989: 247) adalah pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan dikuasai oleh keinginan untuk mencapai hasil yang dipersengketakan. Sedangkan menurut Dahlan Nasution (1989: 54) konflik dengan sasaran keseimbangan bertujuan untuk mencapai keadaan seimbang menguasai suatu masalah yang dipertentangkan. Konflik dengan hegemoni bertujuan untuk mendominasi. Para perilaku konflik tidak hanya semata-mata hanya menunjukkan perhatian kepada satu sasaran tertentu melainkan kepada berbagai sasaran dan berusaha mencapai keunggulan sebanyak mungkin.

Menurut Paul Conn yang dikutip oleh Sudiono Sastroatmodjo (1995: 244 – 245) tujuan konflik adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak yang bertikai dalam konflik mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama ingin mendapatkan, misalnya ingin memperoleh kekuasaan, sehingga masing-masing berusaha mendapatkan kekuasaan tersebut.
- 2) Salah satu pihak ingin mendapatkan, sedangkan pihak lain ingin mempertahankan apa yang selama ini dimiliki atau diyakini, misalnya persaingan dalam pemilu untuk mempertahankan kursi dalam DPR.
- 3) Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berusaha mempertahankan apa yang telah ada agar tidak lepas ke tangan orang lain, misalnya persaingan teknologi, persenjataan, ekonomi dan sebagainya antar negara.

Jadi tujuan konflik di Pakistan lebih mendekati pada tujuan konflik yang dikemukakan oleh Paul Conn yang dikutip oleh Sudiono Sastroatmojo yaitu pihak yang bertikai sama-sama ingin mendapatkan, yakni memperebutkan kekuasaan sehingga masing-masing (oposisi) berusaha mendapatkan kekuasaan disamping ada pihak-pihak yang berusaha mempertahankan kekuasaan.

#### **f. Fungsi Konflik**

Menurut Ahmad Fedyani Saifuddin (1986: 63) fungsi konflik adalah:

- 1) Konflik berfungsi mencegah dan mempertahankan identitas dan batas-batas kelompok sosial dan masyarakat.
- 2) Konflik dapat melenyapkan unsur-unsur yang memecah belah dan menegakkan kembali persatuan. Konflik dapat meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang bertentangan sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik berfungsi sebagai stabilitas sistem sosial.
- 3) Konflik suatu kelompok dengan kelompok yang lain menghasilkan mobilisasi energi para anggota kelompok yang bersangkutan sehingga kohesi tiap kelompok ditingkatkan.
- 4) Konflik dapat menciptakan jenis-jenis interaksi yang baru diantara pihak-pihak yang bertentangan yang sebelumnya tidak ada. Konflik berlaku sebagai rangsangan untuk menciptakan aturan-aturan sistem norma yang baru, yang mampu mengatur pihak-pihak yang bertentangan sehingga keteraturan sosial kembali terwujud.

- 5) Konflik dapat mempersatukan orang-orang atau kelompok-kelompok yang tadinya tidak saling berhubungan. Koalisi dan organisasi dapat timbul dimana kepentingan pragmatik utama pada pelakunya terlibat.

Konflik di Pakistan berfungsi menegakkan kembali persatuan setelah terpecah belah akibat perebutan kekuasaan. Sehingga dapat menimbulkan jenis-jenis interaksi baru disamping itu juga menciptakan koalisi organisasi serta mempersatukan orang-orang atau kelompok yang tadinya tidak saling berhubungan. Khususnya pada pihak oposisi, terbentuk persatuan oposisi untuk menentang pemerintahan Zia ul-Haq.

### **g. Cara Menyelesaikan Konflik**

Konflik merupakan gejala yang ilmiah dan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan sosial, namun konflik tidak harus berkepanjangan. Motivasi-motivasi untuk mengakhiri konflik bisa karena lelah atau bosan dan karena adanya keinginan untuk mencurahkan tenaganya untuk hal-hal lain. Simmel dalam Doyle Paul Johnson (1988: 273) menganalisa beberapa bentuk atau cara untuk mengakhiri konflik termasuk menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan pihak yang lain, kompromi, perdamaian, dan ketidakmungkinan untuk berdamai.

Menurut D. Hendropuspito O.C (1989: 250-251) cara penyelesaian konflik yang lazim digunakan ada lima urutan yaitu:

- 1) Konsiliasi (*conciliaton* atau perdamaian) yaitu suatu cara menyelesaikan konflik dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai tujuan persetujuan bersama untuk berdamai.
- 2) Mediasi (*mediation*) yaitu suatu cara untuk menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seorang pengantar (mediator).
- 3) Arbitrasi (*arbitrium*) artinya melalui pengadilan dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan.
- 4) Paksaan (*coercion*) ialah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik dan psikologis.
- 5) *Détente* (mengendorkan) ialah mengurangi hubungan tegang antara kedua belah pihak yang bertikai.

Sedangkan menurut K.J Holsti (1992: 180-183) cara penyelesaian konflik adalah sebagai berikut:

1) Penghindaran diri

Hal ini dilakukan apabila ketidaksesuaian sasaran, nilai, kepentingan, atau pandangan dirasakan oleh kedua belah pihak. Satu kemungkinan pemecahan masalah bagi satu atau kedua belah pihak adalah menarik diri dari suatu posisi fisik atau berunding atau menghentikan.

2) Penaklukan yaitu mengharuskan membanjiri lawan dengan penggunaan kekuatan, bahkan melibatkan suatu perjanjian atau perundingan tertentu antara kedua belah pihak yang bermusuhan.

3) Penundukan atau penangkalan, ukuran yang digunakan untuk membedakan penundukan atau penangkalan dengan penaklukan adalah apakah ancaman untuk menggunakan kekuatan digunakan atau tidak.

4) Kompromi tertentu dimana kedua belah pihak menyetujui menarik kembali sebagai tujuan kedudukan, klaim atau tindakan permulaannya.

5) Imbalan, hasil rumit yang didasarkan pada suatu kompromi sebelumnya adalah imbalan, dimana lawan menyetujui suatu penyelesaian yang dicapai melalui prosedur perundingan.

6) Penyelesaian pasif, konflik internasional tidak mempunyai hasil formal (penangkal pehindaran kompromi, penakhlukan, atau imbalan), tetapi bertahan pada jangka waktu yang lama sampai para pihak secara tegas menerima suatu status *quo* yang baru sebagai absah sebagian.

Menurut Nasikun (2001: 24) bentuk pengendalian konflik adalah sebagai berikut:

1) konsiliasi (*consiliation*) yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dengan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan.

2) mediasi (*mediation*) dimana kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama bersepakat menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara mereka.

Mawasdi Rauf (2000: 10) mengemukakan ada dua macam penyelesaian konflik:

- 1) Secara *persuasif* yaitu menggunakan perundingan, baik perundingan antara mereka saja atau menggunakan pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai.
- 2) Secara *koersif* yaitu menggunakan kekerasan fisik atau ancaman untuk menghilangkan perbedaan antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

Penyelesaian konflik di Pakistan dilakukan dengan cara *détente*. Dimana pihak-pihak yang berkonflik dalam hal ini oposisi-oposisi saling mengendorkan ketegangan sehingga terjadi kompromi yang menghasilkan kesepakatan untuk bergabung. Sedangkan konflik dengan pemerintah berakhir begitu saja dengan tewasnya Presiden M. Zia ul-Haq.

#### **h. Akibat Konflik**

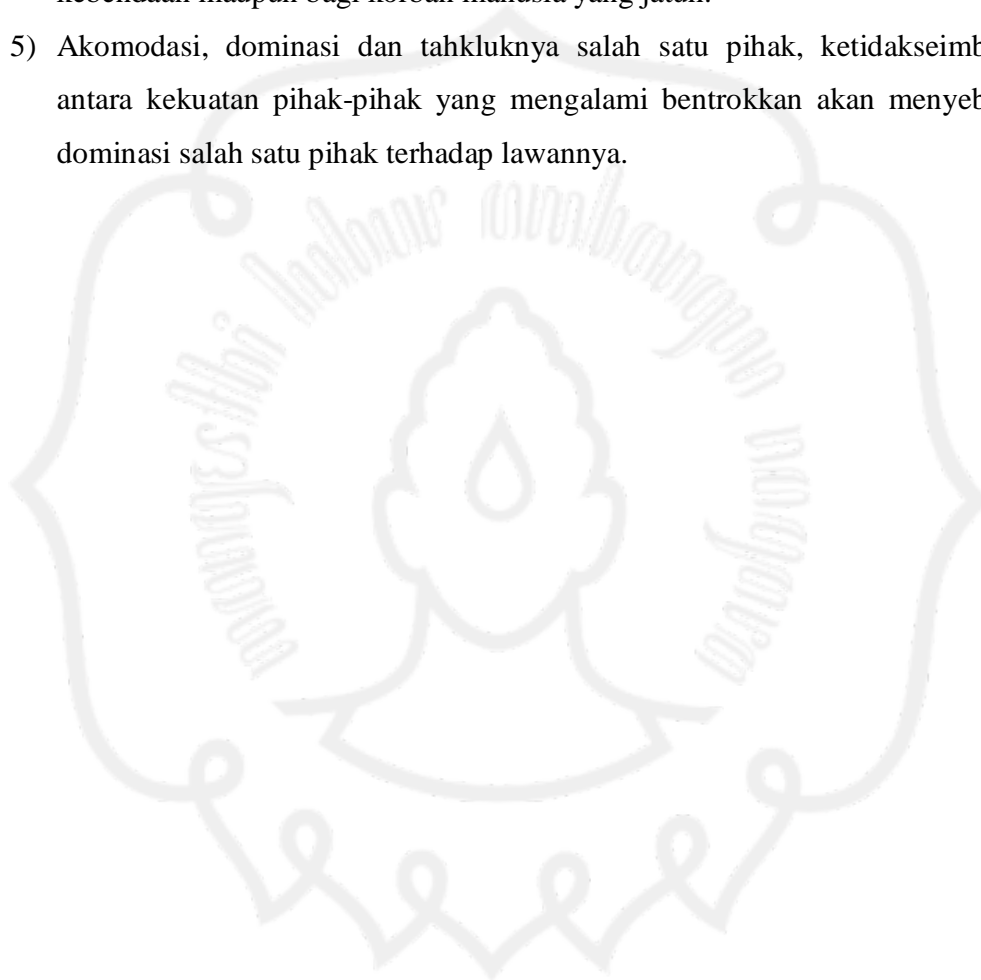
Menurut Doyle Paul Johnson (1988: 272) munculnya konflik (kepentingan-kepentingan yang bertentangan) dapat mengakibatkan persatuan dan solidaritas dari kelompok minoritas, pembentukan kelompok baru yang sebelumnya acuh tak acuh atau bertentangan, putusannya suatu hubungan. Menurut pendapat D. Hendropuspito O.C (1989: 249):

Bentrokan antar individu, kerabat dengan kerabat, suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, golongan agama yang satu dengan yang lainnya, umumnya mendatangkan penderitaan bagi kedua pihak yang terlibat, seperti korban jiwa, material spiritual, serta berkobarnya balas dendam. Akibat lain adalah berhentinya kerjasama kembali disebut masa permusuhan. Dalam masa ini usaha kooperatif tidak dapat dilakukan. Hal ini mengakibatkan proses kemajuan masyarakat mengalami kemacetan. Apabila konflik terjadi suatu negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bersifat separatif, konflik serta menghambat persatuan bangsa serta integrasi sosial dan nasional.

Menurut Soerjono Soekanto (1983: 98) akibat pertentangan antara lain:

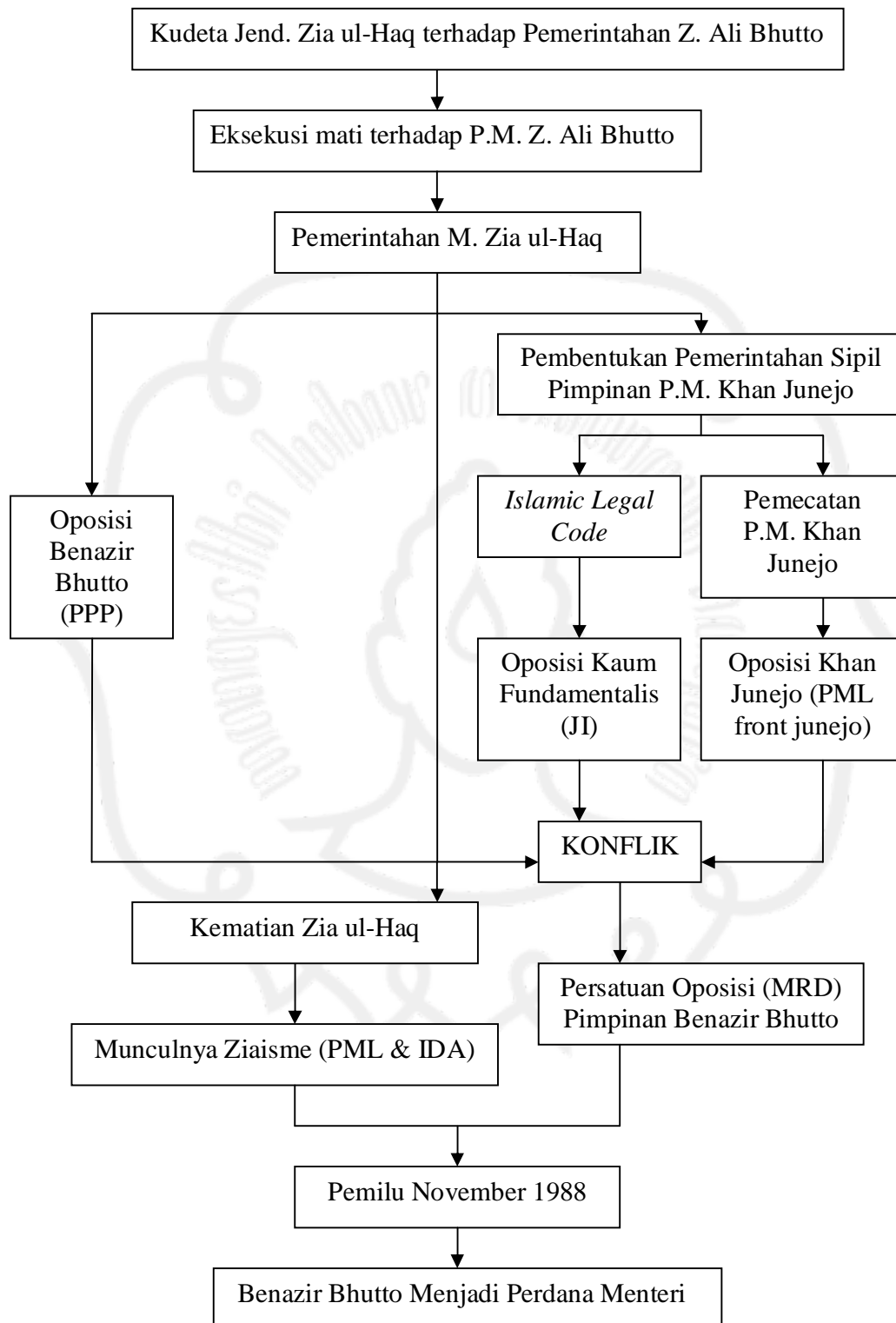
- 1) Tambahnya solidaritas dari in-group. Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas antar warga-warga kelompok tersebut biasanya akan bertambah erat.
- 2) Apabila terjadi pertentangan antara golongan-golongan dalam suatu kelompok tertentu maka akibatnya adalah kemungkinan akan goyah dan retaknya persatuan tersebut.

- 3) Perubahan kepribadian orang perorang. Dalam pertentangan-pertentangan yang berlangsung di dalam kelompok atau antar kelompok selalu ada yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak.
- 4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia. Salah satu bentuk pertentangan yang terdasyat yaitu peperangan yang menyebabkan penderitaan yang berat, baik bagi pemenang maupun pihak yang kalah, baik dalam bidang kebendaan maupun bagi korban manusia yang jatuh.
- 5) Akomodasi, dominasi dan tahkluknya salah satu pihak, ketidakseimbangan antara kekuatan pihak-pihak yang mengalami bentrokkan akan menyebabkan dominasi salah satu pihak terhadap lawannya.





## B. Kerangka Berfikir



Keterangan :

Pemerintahan Zia ul-Haq dimulai pada tahun 1977 dengan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Zulfikar Ali Bhutto yang berujung pada dieksekusinya Zulfikar Ali Bhutto dengan tuduhan terlibat pembunuhan politik. Tewasnya Zulfikar Ali Bhutto pada 4 April 1979 itu kendati telah menghancurkan hampir seluruh kebahagiaan Benazir Bhutto dan keluarganya, namun tidaklah membuat Benazir Bhutto larut dalam kesedihan. Peristiwa itu justru digunakan sebagai fundamen bagi titik balik (*turning point*) kehidupan Benazir Bhutto untuk mulai terjun dalam kehidupan politik, menentang pemerintahan Zia ul-Haq yang dianggap telah memporak-porandakan kehidupan demokrasi.

Akibat terbunuhnya sang ayah, Benazir Bhutto akhirnya berani untuk berusaha membongkar segala kebobrokan pemerintahan Zia ul-Haq. Benazir Bhutto diubah oleh beratnya “beban” moral perjuangan dimasa-masa susah akibat kematian sang ayah (Zulfikar Ali Bhutto).

Pada bulan Maret 1985 Zia ul-Haq membentuk pemerintahan sipil, dengan Mohammad Khan Junejo sebagai Perdana Menteri. Namun, sebagai politisi yang cerdas Zia ul-Haq tidak ingin kehilangan kekuasaan dan otoritasnya di kancah perpolitikan Pakistan. Sehingga, meskipun pemerintahan dipimpin Khan Junejo, Zia ul-Haq masih memegang kekuasaan tertinggi dengan tetap memegang jabatan Presiden, Panglima Angkatan Bersenjata, serta tetap menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan cara demikian berarti Zia ul-Haq masih tetap mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk khususnya mengawasi secara langsung Angkatan Darat, salah satu unsur dominan dalam Angkatan Bersenjata.

Sebelum Undang-Undang Darurat dicabut, Zia ul-Haq terlebih dahulu mengumumkan beberapa amandemen konstitusi, yang intinya memperkuat kedudukannya sebagai Presiden. Zia ul-Haq juga membentuk Dewan Keamanan Nasional (beranggotakan 11 orang) yang dipimpinnya sendiri, disamping memegang hak penuh untuk menunjuk dan memecat Perdana Menteri, para Menteri serta seluruh Gubernur. Melalui amandemen, Zia ul-Haq mengukuhkan kekuasaan Presiden untuk membubarkan Dewan Nasional dan Dewan Propinsi.

Empat bulan setelah dicabutnya Undang–Undang Darurat pada 10 April 1986, Benazir Bhutto pulang dari pengasingannya di Inggris. Kepulangan ini akhirnya membuat pengaruh Benazir Bhutto untuk membangkitkan semangat menentang rezim Zia ul-Haq semakin meningkat. Benazir Bhutto relatif berhasil memanfaatkan wibawa sebagai pewaris nama besar dan atau kharisma mendiang ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto. Apalagi mayoritas rakyat Pakistan terutama di pedesaan masih banyak yang buta huruf. Sehingga dengan modal kemahiran berpidato serta ditunjang ilmu pengetahuan yang memadai Benazir Bhutto dengan relatif mudah dapat mengakumulasi wibawa, mempengaruhi rakyat untuk mentransfer loyalitas mereka atas Zulfikar Ali Bhutto kepada dirinya sebagai putri sulung mendiang pendiri *Pakistan People's Party* (PPP) tersebut.

Tipe keagamaan rakyat Pakistan masih dominan dengan tipe muslim populer yang masih mencampuradukkan tradisi dengan ajaran Islam. Kondisi demikian telah memberi keuntungan tersendiri bagi Benazir Bhutto. Bahkan, disebagian kelompok elit “barisan sakit hati” Benazir Bhutto mampu menyebarkan pengaruh, terutama akibat kemampuan Benazir Bhutto memanfaatkan kekecewaan mereka pada beberapa kebijakan Zia ul-Haq. “Elit sakit hati” ini akhirnya bukan sekedar menjauhkan diri dari rezim penguasa, melainkan juga cenderung bekerjasama dengan Benazir menjadi oposan bagi pemerintahan Zia ul-Haq.

Pada minggu 26 Maret 1988 Zia ul-Haq mengumumkan pemecatan Khan Junejo dari jabatannya berikut pembubaran kabinet dan parlemen. Khan Junejo menilai Zia ul-Haq sewenang–wenang, serta berharap agar Zia ul-Haq menepati janji melaksanakan pemilu dalam tempo 90 hari. Setelah dipecat dari posisi Perdana Menteri, Khan Junejo menjadi oposan bagi pemerintahan Zia ul-Haq dengan partainya *Pakistan Muslim League* (PML).

Melalui *Islamic Legal Code* Zia ul-Haq mencoba membangun kredibilitasnya sebagai “seorang pahlawan Islam” sebelum pemilu dilaksanakan. Namun ternyata beberapa sekte dan organisasi keagamaan justru tidak suka pada *Islamic Legal Code* ala Zia ul-Haq, yang dianggap sebagai “kosmetik” bagi pemerintahannya. Kebijakan *Islamic Legal Code* dipandang hanya dimanfaatkan untuk tujuan politis. Akhirnya para pimpinan sekte dan organisasi keagamaan lantas menarik dukungannya pada pemerintahan Zia ul-

Haq. *Jamaat Islami* (JI) yang merupakan pendukung utama pemerintahan Zia ul-Haq bekerjasama dengan *Pakistan People's Party* (PPP) untuk menentang pemerintahan Zia ul-Haq. Selain itu Khan Junejo dengan partai *Pakistan Muslim League* (PML faksi Khan Junejo) yang sejak pemecatan dari jabatan Perdana Menteri oleh Zia ul-Haq muncul sebagai oposan, juga turut bekerjasama dengan *Pakistan People's Party* (PPP). Maka terciptalah persatuan oposisi di bawah pimpinan Benazir Bhutto.

Pada 17 Agustus 1988, Zia ul-Haq tewas dalam kecelakaan pesawat. Para fanatik dan pengikut Zia ul-Haq akhirnya membentuk partai tandingan bagi oposan Benazir Bhutto untuk meneruskan politik Zia ul-Haq, yang disebutnya dengan "Ziaisme". Upaya untuk menggagalkan Benazir Bhutto menuju kursi kekuasaan tidak berhasil, hal ini terbukti dari hasil pemilu November 1988 Benazir Bhutto meraih kemenangan gemilang dengan meraih 92 kursi dari 205 kursi yang diperebutkan. Benazir Bhutto pribadi berhasil mengumpulkan tiga kursi sekaligus di distrik Larkana, Lahore dan Karachi. Dan akhirnya pada 1 Desember 1988, Benazir Bhutto mendapatkan mosi kepercayaan dari Dewan Nasional untuk menduduki kursi Perdana Menteri Pakistan. Dan secara resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Pakistan pada 2 Desember 1988.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

## A. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Suatu penelitian memerlukan tempat untuk dijadikan objek guna memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian yang berjudul “Politik Benazir Bhutto Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pakistan Tahun 1979-1988” dilakukan dengan cara studi pustaka. Penelitian ini dilakukan diberbagai perpustakaan.

Perpustakaan yang digunakan sebagai tempat mencari data dalam penelitian ini:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- c. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- d. Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- e. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- f. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tujuh bulan, yaitu mulai bulan Januari 2007 hingga bulan Juli 2007. Waktu dan kegiatan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan Penelitian	Bulan						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli
1	Pengajuan Judul							
2	Penyusunan Proposal							
3	Perijinan							

4	Pengumpulan Data							
5	Analisis Data							
6	Penulisan Laporan							

## B. Metode Penelitian

Untuk merekonstruksi salah satu aspek masa lampau harus mendasarkan pada jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan oleh masa lampau itu melalui penelitian. Yang dimaksud penelitian disini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Florence M.A Hilbish dalam Ibrahim Alfian (1994), adalah “Penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu objek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah untuk menyokong atau menolak suatu teori”. Pilihan yang tepat atas salah satu metode sangat tergantung pada tujuan penelitian.

Tujuan dari penelitian adalah mengungkapkan kembali peristiwa masa lampau menjadi sebuah karya tulis ilmiah, untuk itu diperlukan data-data sebagai dasar penyusunan karya ilmiah. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Jadi metode adalah suatu jalan, suatu cara, suatu proses, suatu prosedur atau teknik yang sistematis dalam suatu ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (Koentjoroningrat, 1986:7). Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar (2004: 42) “Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis”.

Menurut Kamus *The New Lexiicon Webster’s Dictionary of The English Language* dalam Helius Sjamsuddin (1996: 1-2), metode ialah “Suatu cara untuk sesuatu, suatu prosedur untuk mengerjakan sesuatu, keteraturan dalam berbuat, berencana dan lain-lain, suatu susunan dan sistem yang teratur”. Jadi metode berhubungan dengan dengan suatu prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan suatu sistem ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti.

Tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah berusaha mengungkapkan serta merekonstruksi kembali peristiwa masa lalu secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat dalam bentuk karya ilmiah. Penelitian karya ilmiah bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa



masa lampau, maka sangatlah tepat menggunakan metode historis (Sumadi Suryabrata, 2002: 16).

Metode penelitian sejarah dalam pengertian umum adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Dalam Husaini Usman dan Purnomo Setyadi Akbar (2004: 4) “Penelitian historis bermaksud membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat”.

Menurut Louis Gottschalk (1975: 32) “Metode sejarah adalah metode proses menguji, menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan pada data yang diperoleh guna menentukan proses historiografi”. Penggunaan metode historis dalam penelitian ini, untuk mengetahui fakta-fakta sejarah yang berkaitan dengan pandangan keagamaan, politik, pendidikan serta yang lainnya dari Benazir Bhutto serta situasi politik Pakistan pada masa pemerintahan Zia ul-Haq yang melatarbelakangi keberhasilan Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri.

### C. Sumber Data

Sumber sejarah adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau (Helius Sjamsuddin & Ismaun, 1996: 61). Sumber sejarah seringkali disebut data sejarah. Perkataan data merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *datum* (Bahasa Latin), yang berarti pemberian yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis (Kuntowijoyo, 1995: 94). Menurut definisi dalam *The New Lexiicon Webster's Dictionary of The English Language* sebagaimana diungkapkan kembali oleh Helius Sjamsuddin (1996), data adalah “Suatu fakta atau prinsip yang diberikan atau ditampilkan, sesuatu yang menjadi dasar bagi setiap inferensi (kesimpulan) atau dasar suatu argumen dalam setiap susunan intelektual ...”.

Data sejarah berarti bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian dan pengkategorian. Adapun klasifikasi sumber sejarah dapat dibedakan menurut bahannya, asal-asul atau urutan penyampaiannya, serta tujuan sumber itu dibuat. Dalam penulisan ini digunakan sumber-sumber data dari intelektual Islam dan hasil kajian

pendapat para *Orientalis* yaitu intelektual Barat yang mengkaji ilmu–ilmu tentang politik khususnya politik Islam. Pengetahuan sejarah yang objektif timbul bila terdapat beberapa pendapat antara sejarawan (Walsh dalam Dudung Abdurrahman, 1999: 8).

Sumber merupakan hal yang pokok dan utama dalam suatu penelitian, karena sumber data merupakan bahan yang akan diteliti. Sumber menurut bahannya dapat dibagi menjadi dua, sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data tertulis. Menurut Nugroho Notosusanto (1978: 37):

Sumber data tertulis dibagi menjadi sumber tertulis primer dan sekunder. Sumber tertulis primer adalah sumber autentik atau sumber dari tangan pertama tentang masalah yang diangkat atau dikenal dengan sumber asli. Sumber tertulis sekunder adalah sumber yang ditulis oleh orang lain (bukan tangan pertama) dan tidak pernah ditulis atau dialami oleh penulisnya.

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai sumber sejarah adalah sumber tertulis sekunder. Hal ini disebabkan karena sulitnya mencari sumber primer yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Namun, sumber tertulis sekunder yang digunakan dalam penelitian ini cukup relevan apabila digunakan untuk mengkaji permasalahan di dalam penelitian ini. Adapun sumber tertulis sekunder yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

- 1 Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam karya Dhuroruddin Mashad.
- 2 *Pakistan The Continuing Search for Nationhood* karya Shahid Javed Burki.
- 3 Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah karya M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar dan Happy Bone Zulkamain
- 4 Majalah dan Koran yang memuat dan mengangkat tema tentang Benazir Bhutto terutama yang berhubungan dengan perjalanan politik Benazir menuju kursi Perdana Menteri.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Untuk mengumpulkan data diperlukan suatu teknik tertentu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data atau fakta

sejarah dengan membaca buku–buku literatur, majalah, dokumen atau arsip, surat kabar atau brosur yang mendukung dalam penelitian baik itu berupa koleksi pribadi maupun yang tersimpan di perpustakaan.

Teknik studi pustaka tersebut dilakukan dengan metode atau sistem pencatatan, yakni pencatatan kecil terhadap buku–buku yang relevan sehingga menjadi bahan penelitian. Studi literatur disamping untuk mencari sumber data, juga untuk mengetahui sampai di mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian berkembang, untuk memperoleh cara–cara menulis karya ilmiah, serta cara mengungkapkan buah pikiran yang lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitian.

Menurut Koentjaraningrat (1986: 319) ada beberapa keuntungan jika penelitian menggunakan teknik studi pustaka, antara lain teknik kepustakaan akan membantu memperoleh pengetahuan ilmiah dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah. Dalam teknik kepustakaan, sumber yang didapat tidak mungkin semua bisa disimpan dalam ingatan maka pengumpulan data atas sumber sejarah dalam telaah kepustakaan diperlukan pencatatan yang sistematis

Menurut Florence M.A Hilbish dalam Ibrahim Alfian (1994), catatan–catatan tersebut berupa: *quotation* (kutipan langsung), *citation* atau *indirect quotation* (kutipan tidak langsung). Untuk memperlancar kegiatan membuat catatan, maka langkah awal yang dilakukan yaitu dengan mengetahui tempat dokumen berada, memahami bibliografi karya terdahulu yang relevan, menguasai bahasa dokumen. Langkah selanjutnya yaitu mengadakan pencatatan dengan menggunakan buku. Dalam kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan buku–buku dan literatur yang sesuai dengan tema penelitian. Kemudian diklasifikasikan menurut data yang diperlukan sampai terkumpul menjadi bahan analisa penelitian yang disajikan dalam historiografi.

### **E. Teknik Analisa Data**

Penyusunan cerita sejarah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian historis yang disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan pola berpikir diakronik dan sinkronik. Dasar berpikir diakronik adalah melihat hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain yang sifatnya sekuensial, maksudnya bahwa peristiwa yang muncul kemudian pasti mempunyai hubungan sebab-akibat dengan

peristiwa yang mendahuluinya. Sedangkan dasar pemikiran sinkronik dimaksudkan melihat hubungan antara suatu peristiwa atau fenomena atau faktor yang lainnya di dalam satu kesatuan yang berdasarkan pada suatu hubungan yang logis, sehingga menghasilkan suatu penelitian yang berkualitas (Koentjaraningrat et al, 1998).

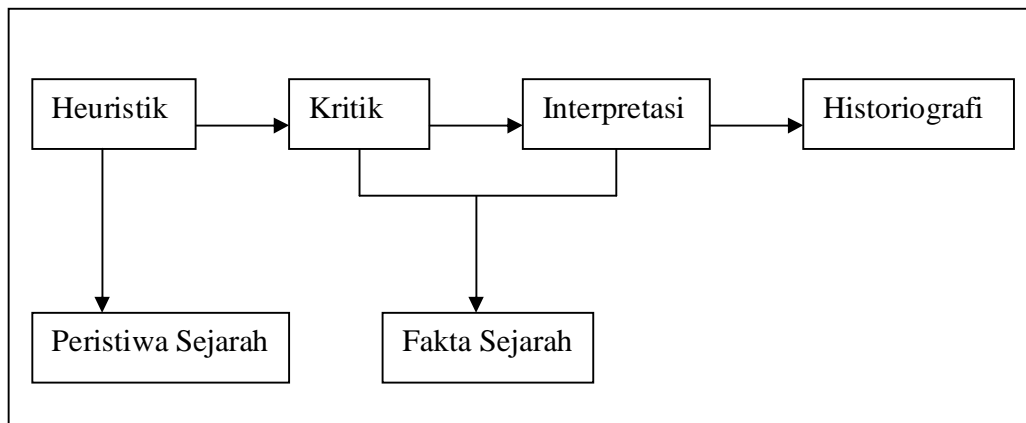
Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa historis. Analisa historis adalah analisis yang mengutamakan ketajaman dalam melakukan interpretasi terhadap bukti-bukti (data) sejarah. Pengkajian fakta-fakta sejarah oleh sejarawan tidak terlepas dari unsur-unsur subjektivitas sehingga diperlukan konsep-konsep dan teori sebagai kriteria penyeleksi dengan pengklasifikasian (Sartono Kartodirjo, 1982).

Interpretasi dilakukan mengingat fakta sejarah tidak mungkin berbicara sendiri dan kategori fakta-fakta sejarah mempunyai sifat yang kompleks. Dengan kata lain, suatu fakta tidak mungkin dimengerti atau dilukiskan oleh fakta itu sendiri (Sartono Kartodirjo, 1993). Setelah data dikaji dan dianalisa selanjutnya dilakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya sehingga didapatkan sejumlah fakta sejarah. Fakta-fakta tersebut kemudian diseleksi, diklasifikasikan dan ditafsirkan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan penulisan dalam penelitian ini.

#### **F. Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian adalah bagan (skema) yang menggambarkan alur kegiatan awal penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian. Karena metode penelitian adalah metode penelitian historis, maka bagan dari proses kegiatan penelitian adalah sebagai berikut :

### Pelaksanaan Penelitian



Keterangan :

#### Pelaksanaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti berupa penelitian mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode historis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian dengan menggunakan metode historis adalah sebagai berikut:

##### 1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heurisken* yang artinya memperoleh. Dalam pengertian lain adalah suatu teknik yang membantu kita untuk mencari jejak-jejak sejarah. Menurut G.J Renier (1997: 113), “Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu”. Heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum, dan sedikit mengetahui tentang bagian-bagian yang pendek. G.J Renier (1997: 113) menambahkan “..., Suatu keterampilan di dalam menangani buku-buku penuntun khusus. Suatu ingatan untuk perincian bibliografi, memiliki disiplin sendiri di dalam berbuat, mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan. Tidak ada buku teks mengenai heuristik”.

Heuristik adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan jejak-jejak peristiwa masa lampau sebagai sumber penelitian. Jejak-jejak sejarah sebagai peristiwa merupakan

sumber bagi penulisan sejarah. Sumber sejarah perlu adanya pengklasifikasian dan penggolongan agar proses penelitian tidak mengalami kesulitan sebab sumber sejarah bisa berupa bagian politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun militer (Nugroho Notosusanto, 1978: 36). Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data dan pengklasifikasiannya baik dari sumber data maupun jenisnya sehingga akan mempermudah proses penelitian yang dilakukan.

Pada tahap ini merupakan tahap pengumpulan data yang berhubungan dengan Politik Benazir Bhutto dalam usahanya menduduki kekuasaan tertinggi di Pakistan. Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan politik Benazir Bhutto, dilakukan pengumpulan data-data di perpustakaan-perpustakaan. Perpustakaan-perpustakaan yang dikunjungi dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan adalah Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Muhamadiyah Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan Perpustakaan Monumen Pers Surakarta.

## 2. Kritik

Setelah sumber terkumpul, tahap berikutnya yaitu langkah verifikasi atau kritik guna memperoleh keabsahan sumber. Keabsahan sumber dicari melalui pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan atau akurasi sumber (Helius Sjamsuddin, 1996). Dalam penelitian sejarah cara tersebut dilakukukan melalui proses kritik sumber yaitu:

### a. Kritik ekstern

Kritik ekstern yaitu kritik terhadap keaslian sumber (otensitas) yang berkenaan dengan keberadaan sumber apakah sumber itu yang dikehendaki atau tidak, masih asli atau sudah turunan. Menurut Dudung Abdurrahman (1999), uji otensitas minimal dilakukan dengan pertanyaan: kapan, dimana, siapa, bahan apa serta bentuknya bagaimana sumber itu dibuat. Sebelum semua kesaksian yang dikumpulkan oleh sejarawan dapat digunakan untuk merekonstruksi masa lalu, maka terlebih dahulu harus



dilakukan pemeriksaan yang ketat. Sebelum sumber-sumber sejarah dapat digunakan dengan aman, paling tidak ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan (Lucey dalam Helius Sjamsudin, 1996) yaitu:

- 1) Siapa yang mengatakan itu?
- 2) Apakah dengan satu cara lain atau kesaksian itu telah dirubah?
- 3) Apa sebenarnya yang dimaksud oleh orang itu dengan kesaksian itu?
- 4) Apakah saksi itu mengatakan yang sebenarnya (*truth*) dan memberikan kepada kita fakta yang diketahui itu?

Adalah fungsi dari kritik eksternal memeriksa sejumlah sumber atau dua butir pertama dan menegakkan sedapat mungkin otentisitas dan integritas dari sumber itu (Helius Sjamsuddin, 1996). Adapun yang dimaksud dengan kritik eksternal ialah suatu penelitian atas asal-usul sumber, suatu pemeriksaan terhadap catatan dan peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui ada sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak.

Dalam kritik eksternal, dilakukan dengan cara melihat pengarang dari sumber yang dipakai dalam penelitian ini benar seorang peneliti sejarah dan politik di kawasan Asia Selatan atau tidak. Menentukan sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian adalah yang sezaman dengan waktu saat peristiwa yang dikaji sedang terjadi.

#### b. Kritik intern

Kritik intern dilakukan untuk mencari kesahihan sumber (*validitas*). Kritik intern digunakan untuk membuktikan apakah kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber dapat dipercaya atau tidak. Hal ini dapat terbukti bila pemberi kesaksian menggunakan prinsip *positifisme* yang mengandung pengertian bahwa saksi primer mampu dan berkeinginan menceritakan kebenaran atau dengan akurat melaporkan secara terperinci mengenai hal yang diteliti untuk mendapatkan kolaborasi dan kesaksian yang merdeka dari dua saksi atau yang lebih dapat dipercaya (Louis Gotschalk, 1975). Untuk membuktikan kesaksian yang diberikan maka diadakan penilaian interinsik terhadap sumber-sumber dan membandingkan dengan sumber-sumber yang lainnya.

Pada tahap kritik ekstern dilakukan dengan melihat penulis atau pengarang tentang hasil karyanya sesuai dengan keahliannya atau tidak sehingga diketahui keaslian

dan sikap menerima dan menolak sumber tersebut. Pada langkah kritik intern yang berkenaan dengan isi sumber dilakukan dengan melihat apakah keaslian sumber tersebut dari pengarangnya yang asli atau turunan karya orang lain. Dari tahap ini akan didapatkan validitas data. Kritik adalah kegiatan untuk menyelidiki jejak-jejak sejarah yang dapat dikumpulkan secara autentik dan dapat dipercaya atau tidak, sehingga kritik yang dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern (tentang keaslian sumber) dan kritik intern yang berkaitan dengan kesaksian sumber yang ada.

### 3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi (Kuntowijoyo, 1995). Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Berkhofer dalam Ibrahim Alfian, 1994).

Kemampuan melakukan sintesis hanya mungkin kalau peneliti mempunyai konsep yang diperoleh dari membaca, dan karena itu pula interpretasi atas data yang sama sekalipun, memungkinkan hasilnya bisa berbeda (Dudung Abdurrahman, 1999). Setelah data terseleksi dan memenuhi syarat kevaliditasannya maka langkah selanjutnya yaitu interpretasi data yang dilakukan dengan menafsirkan, memberikan makna dari fakta yang diperoleh serta menghubungkan diantara sumber satu dengan sumber yang lainnya, yang dikaitkan dengan teori maupun konsep yang mendukung sehingga muncul fakta sejarah.

### 4. Historiografi

Sebagai fase terakhir dari metode sejarah, historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah seharusnya memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, sejak dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhirnya (penarikan kesimpulan). Diantara syarat umum yang harus

diperhatikan peneliti dalam pemaparan sejarah menurut Husaini Usman dalam Dudung Abdurrahman (1999: 67-68) adalah:

- a. Peneliti harus memiliki kemampuan mengungkapkan bahasa secara baik. Misalnya, peneliti harus memperhatikan aturan atau pedoman bahasa Indonesia yang baik; mengerti bagaimana memilih kata dan gaya bahasa yang tepat untuk mengungkapkan maksudnya; menggunakan bahasa yang mudah dan dapat dipahami secara jelas; tidak menggunakan bahasa sastra murni yang cenderung membuat kelebihan-kelebihan tulisannya; dan data dipaparkan seperti yang dipahami oleh peneliti dan dengan gaya bahasa yang khas.
- b. Terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah itu disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum, karena didahului oleh masa dan diikuti oleh masa pula. Dengan perkataan lain, penulisan itu ditempatkan sesuai dengan perjalanan sejarah.
- c. Menjelaskan apa yang ditemukan oleh peneliti dengan menyajikan bukti-buktinya dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca. Dalam hal ini perlu dibuat pola penulisan atau sistematika penyusunan dan pembahasan.
- d. Keseluruhan pemaparan sejarah harus argumentatif, artinya usaha peneliti dalam mengerahkan ide-idenya dalam merekonstruksi masa lampau itu didasarkan atas bukti-bukti terseleksi, bukti yang cukup lengkap dan detail fakta yang akurat.

Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka sejarawan mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena pada akhirnya sejarawan harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian dan penemuannya secara utuh yang disebut historiografi (Helius Sjamsuddin, 1996). Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metodologi atau prosedur penelitian historis. Historiografi merupakan karya sejarah dari hasil penelitian, dipaparkan dengan bahasa ilmiah dengan seni yang khas, menjelaskan apa yang ditemukan, beserta argumentasinya secara sistematis.

Pada tahap historiografi, dilakukan penulisan hasil penelitian tentang “Politik Benazir Bhutto dalam Perebutan Kekuasaan di Pakistan Tahun 1979-1988”.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang Politik Benazir Bhutto**

##### **1. Biografi Benazir Bhutto**

Benazir (dalam bahasa Urdu berarti tak ada duanya) lahir pada tanggal 21 Juni 1953, dari pasangan keluarga tuan tanah Zulfikar Ali Bhutto dengan istri keduanya Begum Nusrat di Larkana, Sind, propinsi terbesar kedua di Pakistan bagian Selatan (*Tempo*, 26 November 1988: 72). Kakek Benazir Bhutto, Sir Shahnawaz merupakan seorang pejabat tinggi di Bombay dan Sind pada masa penjajahan Inggris (*Tempo*, 14 April 1979: 14). Benazir Bhutto dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang mayoritas masih buta huruf. Penduduk Pakistan yang buta huruf dua tahun menjelang lahirnya Benazir Bhutto (tahun 1951) mencapai 81,1% dengan penduduk yang tinggal di desa sekitar 89,6 % dari keseluruhan rakyat Pakistan (Yahya Muhaimin dan Colin Mac Andrews, 1982: 149).

Masyarakat Pakistan bersifat feodalistis, cenderung memandang wanita sejenis perabot keluarga, dimana laki-laki keluar mencari nafkah dan wanita cukup mengurus rumah tangga. Di dalam masyarakat yang mayoritas buta huruf dan bersifat feodal inilah Benazir Bhutto dilahirkan. Pembagian tugas antara wanita dan laki-laki, oleh masyarakat Pakistan dipercaya sebagai telah diatur oleh alam secara luhur dan adil, dan oleh karena itu harus dipertahankan. Kepercayaan bahwa wanita lebih rendah kedudukannya dari laki-laki, diperkuat oleh interpretasi sebagian ulama Pakistan bahwa ajaran Islam tidak mengijinkan pria menjadikan wanita sebagai imam dalam shalat berjamaah (bersama). Sehingga sebagai konsekuensi kiasnya, seorang wanita tidak diperkenankan menjadi pemimpin, termasuk dalam pemerintahan (*Tempo*, 26 November 1988: 72).

Penduduk Pakistan 97% menganut agama Islam sehingga anggapan mengenai kedudukan wanita lebih rendah dari laki-laki dan bahkan hanya sebagai sejenis perabot keluarga, dapat diterima dan diyakini masyarakat Pakistan (Rachmad Bratamidjaja, 1990: 198). Karakteristik masyarakat feodal di Pakistan (dengan masyarakat didominasi kaum pria), menyebabkan terhambatnya mobilitas hidup dikalangan wanita. Wanita cenderung tertinggal dalam banyak hal, termasuk bidang pendidikan. Dalam masyarakat Pakistan yang bersifat feodal, Benazir Bhutto berhasil memperlihatkan perbedaan mendasar dalam latar belakang kehidupannya. Benazir Bhutto mengalami proses *sosialisasi*, *internalisasi*, dan *enkulturasi* secara lebih menguntungkan dibanding umumnya wanita Pakistan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri Benazir Bhutto, baik yang diperoleh dari usaha aktif lewat bangku sekolah maupun dari berbagai pengalaman hidup yang Benazir Bhutto alami berpengaruh dalam pembentukan watak atau kepribadian Benazir Bhutto baik sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat serta membedakan Benazir Bhutto dengan kebanyakan wanita Pakistan (Dhuroruddin Mashad, 1996: 8).

Mayoritas rakyat Pakistan hidup dalam kemiskinan. Sebagai anak Zulfikar Ali Bhutto dengan latar belakang keluarga tuan tanah yang kaya, Benazir Bhutto tidak pernah kekurangan materi. Zulfikar Ali Bhutto adalah pejabat tinggi yang luas pergaulan dan pengalaman, oleh sebab itu Zulfikar Ali Bhutto mempunyai sikap berbeda dari umumnya keluarga Pakistan dalam urusan pendidikan anak. Zulfikar Ali Bhutto berpandangan sekuler sehingga bersikap sangat moderat dalam mendidik anak. Benazir Bhutto diperkenankan menamatkan pendidikan menengah di sekolah-sekolah katolik oleh Zulfikar Ali Bhutto, walaupun berasal dari keluarga Muslim (*Tempo*, 28 November 1988: 77-78).

Pada usia 16 tahun, Benazir Bhutto dikirim ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan di *Radcliffe College*, sekolah katolik khusus wanita di bawah bendera *Harvard University* (*Kompas*, 24 September 1988: 1). Di Amerika Serikat, dalam waktu relatif singkat Benazir Bhutto mampu menemukan pribadinya dalam menghadapi budaya Barat yang sangat berbeda dengan budaya Pakistan. Benazir Bhutto segera aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk berpartisipasi dalam demonstrasi anti perang Vietnam, dan naik *subway* untuk nonton film-film percintaan (*Love Story*). Sebagaimana mahasiswa lain, Benazir Bhutto sering menghadiri pesta-pesta dan

bercakap–cakap secara intim dengan teman-teman pria. Benazir Bhutto lebih sering mengenakan *Blue Jeans* dan *Sweters* daripada *Salwar–Kameez*, pakaian nasional Pakistan (*Tempo*, 15 Agustus 1987: 43).

Di kampus, Benazir Bhutto dikenal sebagai orator ulung. Bakat sebagai orator, semakin terlihat terutama setelah Benazir Bhutto melanjutkan kuliah di *Oxford University*, Inggris. Berkat kemampuan berpidato, Benazir Bhutto terpilih menjadi pimpinan *Oxford Union*, sebuah kelompok diskusi di kampus *Oxford*, setahun setelah Benazir Bhutto lulus dari *Oxford*. Para alumnus perguruan tinggi *Oxford* banyak yang menjadi politikus dan negarawan, seperti misalnya Margaret Thatcher. Benazir Bhutto lulusan bidang Politik, Filsafat, dan Ekonomi tahun 1976, dengan predikat *Cum Laude*. Benazir Bhutto melanjutkan studi Hubungan Internasional sebelum akhirnya terpilih sebagai ketua *Oxford Union* (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 37).

Dari latar belakang sosial, budaya dan pendidikan Benazir Bhutto, terlihat jelas proses sosialisasi yang terjadi pada diri Benazir Bhutto. Dalam proses sosialisasi yang dialami Benazir Bhutto, menunjukkan cara–cara bagaimana Benazir Bhutto diperkenalkan pada nilai–nilai dan sikap–sikap yang dianut masyarakat serta bagaimana Benazir Bhutto mempelajari peranan–peranan yang diharapkan akan dijalankan oleh Benazir Bhutto dikemudian hari (Gabriel A. Almond dalam Mochtar Mas’oed, 1981: 31). Jiwa Benazir Bhutto mengalami percampuran (*akulturasi*) budaya antara nilai–nilai Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan dengan nilai–nilai sekuler Barat, antara nilai–nilai feodal masyarakat Pakistan dengan nilai–nilai kebebasan Barat.

Akulturasi pada jiwa Benazir Bhutto akhirnya membentuk Benazir Bhutto pada suatu pribadi mendua, dalam arti tidak mempunyai keterikatan kuat terhadap suatu nilai tertentu, baik terhadap Islam, adat–istiadat Pakistan maupun nilai–nilai sekuler Barat. Dalam hidup, Benazir Bhutto cenderung berusaha mengawinkan berbagai nilai yang telah tersosialisasi, terinternalisasi dan terenkulturisasi dalam dirinya. Orientasi nilai yang dianut oleh Benazir Bhutto akhirnya lebih merupakan kaitan dan atau kompromi antara sistem keyakinan yang dianut dengan cita–cita yang ingin diraih.

Keyakinan Benazir Bhutto dapat dikendorkan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Benazir Bhutto berupaya merasionalisasikan nilai–nilai yang dianut untuk mencapai apa yang diinginkan. Antara keyakinan dan keinginan (harapan) seolah–



olah dapat dikompromikan. Hal ini dimungkinkan, karena Benazir Bhutto tidak memiliki dan atau mengikuti suatu keyakinan (nilai dasar) yang mendarah daging dan eksklusif.

Bagi individu yang mempunyai keyakinan terhadap nilai tertentu secara mendalam, jika dihadapkan pada suatu harapan (cita-cita) yang bertentangan dengan nilai yang dianut, maka kompromi terlalu sulit dicapai. Semakin banyak isi nilai suatu sistem keyakinan, maka akan semakin banyak sistem keyakinan itu membatasi tingkah laku seorang individu. Semakin besar tingkat nilai (ideologi) yang dianut seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadi konflik dalam diri. Dikaitkan dengan kasus Benazir Bhutto, gradasi keyakinan Benazir Bhutto telah turun pada tahap kepentingan atau bahkan kadang-kadang pada tingkat pilihan, sehingga konflik tidak terjadi karena telah bergeser kearah persaingan atau bahkan kerjasama (Dhuroruddin Mashad, 1996: 10-11).

Benazir Bhutto telah mengenal dunia politik sejak masih kanak-kanak. Hal ini dimungkinkan mengingat ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto, sudah menjabat pos-pos penting di pemerintahan Pakistan mulai dari Menteri Luar Negeri, Ketua Delegasi Pakistan di PBB, dan akhirnya sebagai Perdana Menteri pada saat Benazir Bhutto masih kecil. Untuk menambah pengetahuan anak-anaknya, Zulfikar Ali Bhutto biasa mendongengi anak-anaknya dengan cerita tokoh-tokoh dunia seperti Alexander Agung, Napoleon, dan lain-lain (*Tempo*, 26 November 1988: 73).

Kebiasaan mendengarkan cerita-cerita mengenai kehidupan tokoh-tokoh politik dunia, bagi Benazir Bhutto secara tidak langsung telah menjadi ajang sosialisasi politik dan dapat menjadi proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku; juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan patokan dan keyakinan-keyakinan politik pada generasi selanjutnya (Mochtar Mas'oeed, 1981: 10). Pada diri Benazir Bhutto, sosialisasi politik terjadi dengan model alih antar pribadi (interpersonal), yakni sejak kecil telah terbiasa dengan kebiasaan hidup orang terkenal, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi tumbuhnya keinginan dalam diri Benazir Bhutto untuk menjadi seperti orang yang dilihat yakni ayahnya sendiri dan didengar oleh Benazir Bhutto dalam cerita-cerita yang disampaikan Zulfikar Ali Bhutto.

Pada tahun 1970, Zulfikar Ali Bhutto membimbing Benazir Bhutto untuk melanjutkan aspirasi politiknya. Dalam persiapan untuk dapat terjun ke dunia politik,

Zulfikar Ali Bhutto mengirim Benazir Bhutto ke *Harvard* (Amerika Serikat) dan selanjutnya ke *Oxford* (Inggris) untuk menimba ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan soal-soal pemerintahan.

Benazir Bhutto sebenarnya tidak cukup tertarik pada dunia politik praktis, meskipun di kampus Benazir Bhutto telah dikenal sebagai orator ulung dan cerdas, sehingga cukup potensial untuk terjun dalam dunia politik. Ketika pulang ke Pakistan pada pertengahan 1977, Benazir Bhutto menyatakan “Tapi aku bukanlah seorang aktivis politik ... aku hanya tertarik pada masalah-masalah Internasional tanpa melibatkan unsur politik dalam kehidupanku” (*Tempo*, 26 November 1988: 73).

Benazir Bhutto belum berniat terjun ke dunia politik meskipun Zulfikar Ali Bhutto mempersiapkan Benazir Bhutto untuk terjun ke dunia politik. Persiapan bagi Benazir Bhutto untuk terjun ke dunia politik terrefleksi dari tindakan-tindakan Zulfikar Ali Bhutto. Pada usia 18 tahun (1972), oleh Zulfikar Ali Bhutto, Benazir Bhutto diikutsertakan dalam perjalanan bersejarah ke Simla, India, dimana Zulfikar Ali Bhutto dan Indhira Gandhi menandatangani perjanjian Simla untuk mengakhiri krisis Bangladesh. Pada usia 25 tahun, Benazir Bhutto diangkat menjadi anggota komite sentral *Pakistan People's Party* (PPP), yaitu sebuah partai yang didirikan oleh Zulfikar Ali Bhutto.

## 2. Politik Benazir Bhutto

Pada Juli 1977 terjadi perebutan kekuasaan oleh Jend. Zia ul-Haq yang berujung pada dieksekusinya Zulfikar Ali Bhutto di tiang gantungan oleh pemerintahan darurat militer pimpinan Zia ul-Haq atas tuduhan terlibat pembunuhan politik (Shahid Javed Burki, 1991: 80). Tewasnya Zulfikar Ali Bhutto pada 4 April 1979, telah menghancurkan hampir seluruh kebahagiaan diri dan keluarga Benazir Bhutto, namun tidaklah membuat Benazir Bhutto larut dalam kesedihan. Kematian Zulfikar Ali Bhutto justru dijadikan fundamen bagi titik balik (*turning point*) kehidupan Benazir Bhutto untuk mulai terjun dalam dunia politik, menentang pemerintahan Zia ul-Haq yang oleh Benazir Bhutto dianggap telah memporak-porandakan kehidupan demokrasi di Pakistan (Dhuroruddin Mashad, 1996: 13).

Pada awalnya Benazir Bhutto tidak begitu tertarik untuk terlibat dalam kehidupan politik, namun selama kuliah Benazir Bhutto secara langsung telah memperoleh sosialisasi politik dengan model akumulasi. Benazir Bhutto telah banyak mengumpulkan dalam diri, berbagai informasi dan pengetahuan mengenai kehidupan politik yang didapat (khususnya secara teoritis) dari berbagai mata kuliah yang dipelajari Benazir Bhutto di kampus (David E.Apter, 1987).

Kematian Zulfikar Ali Bhutto, telah memicu terjadinya suatu resosiliasi pada diri Benazir Bhutto terhadap kehidupan politik. Pada saat masih kuliah, Benazir Bhutto tidak terlalu suka terlibat dalam urusan politik praktis, namun setelah terjadi *malaise* sosial-politik yang berujung pada kematian sang ayah, akhirnya Benazir Bhutto berbalik arah menjadi sangat terlibat dalam politik. Benazir Bhutto yang mulanya hanya seorang gadis manja akhirnya harus berhadapan dengan kehidupan keras politik Pakistan. Dalam masa resosialisasi, Benazir Bhutto menyatakan “Yang utama dalam kehidupanku adalah politik, baru yang lain-lain ... Kewajibanku yang utama adalah untuk partai, untuk demokrasi di negaraku” (*Tempo*, 15 Agustus 1987: 42-43).

Terbunuhnya Zulfikar Ali Bhutto oleh pemerintahan Zia ul-Haq, telah memacu Benazir Bhutto berani untuk berusaha membongkar segala kebobrokan pemerintahan Zia ul-Haq yang oleh Benazir Bhutto dianggap telah memporak-porandakan kehidupan demokrasi Pakistan. Benazir Bhutto diubah oleh beratnya beban moral perjuangan dimasa-masa susah akibat kematian Zulfikar Ali Bhutto. Sebab, tidak sedikitpun perhatian sehari-hari dimasa kuliah Benazir Bhutto mengisyaratkan bahwa Benazir Bhutto akan mempunyai keberanian untuk terjun ke kancah politik.

Benazir Bhutto mulai mengenal kehidupan penjara pada tahun 1978 akibat menghina rejim penguasa (Zia ul-Haq) dalam berbagai pidato. Setahun kemudian Benazir Bhutto ditahan kembali karena melakukan rapat gelap, disamping tuduhan menimbulkan kerusuhan dan berbuat makar akibat memobilisir massa (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 36). Awal tahun 1981, Benazir Bhutto yang belum lama dilepas dari tahanan, berurusan kembali dengan penjara setelah kelompok Al-Zulfikar yakni kekuatan anti pemerintah yang dibentuk kedua anak laki-laki Benazir Bhutto; Murtaza dan Shahnawaz dalam pengasingan di Afganistan membajak pesawat milik Pakistan di Kabul. Pembajakan

tersebut memaksa Zia ul-Haq melepaskan 55 tahanan politik untuk menyelamatkan sandera (*Sinar*, 5 Oktober 1996: 64).

Semula Benazir Bhutto senang ketika mendengar akan dijebloskan kembali dalam penjara. Benazir Bhutto berharap di penjara akan dapat bertemu dengan para tahanan politik lainnya sehingga dapat menyusun kekuatan dari dalam. Dalam kenyataan, Benazir Bhutto dikurung dalam suatu sel tersendiri di penjara Sukkur. Selama di penjara Benazir Bhutto berulang kali jatuh sakit, bukan karena konon penjara itu suhunya mencapai 49<sup>0</sup>C bila badai panas melanda Karachi, melainkan karena didera rasa kecewa akibat harapan yang kandas. Kepribadian dan semangat Benazir Bhutto ternyata cukup kuat. Sehingga meskipun ruang lingkup Benazir Bhutto menjadi terbatas karena dipaksa meringkuk dalam penjara dan atau terkena tahanan rumah, namun amarah dan kenangan kepada mendiang Zulfikar Ali Bhutto telah menyebabkan Benazir Bhutto mampu bertahan (*Tempo*, 26 November 1988: 75).

Sosialisasi politik yang dialami Benazir Bhutto, baik melalui model akumulasi yaitu lewat informasi-informasi politik, termasuk yang Benazir Bhutto peroleh selama kuliah yakni dengan mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pemerintahan secara teoritis. Dan model alih antar pribadi berkaitan dengan masa maksimum pembentukan kepribadian politik, yaitu masa ketika Benazir Bhutto menghayati nilai-nilai politik, menjadi struktur nilai-nilai yang mendalam, kukuh dan sulit berubah. Hal ini terlihat dari sikap Benazir Bhutto yang secara kokoh berusaha mengawinkan nilai-nilai yang diperoleh dari dunia Barat yang sekuler, Islam yang integral (kaffah), dan nilai budaya Pakistan yang masih feodal (Dhuroruddin Mashad, 1996: 15).

Keyakinan Benazir Bhutto secara jelas dimanifestasikan ke permukaan. Dengan dibakar dendam atas kematian Zulfikar Ali Bhutto, Benazir Bhutto menciptakan suatu *frame works of power* yang menurut John Franch dan Bertram Ravem (Kartini-Kartono, 1983: 132) dengan cara (model) identifikasi diri terhadap orang yang sangat dikagumi, dan kebetulan ayahnya sendiri, Zulfikar Ali Bhutto.

Setelah mendapat desakan dari banyak negara khususnya Amerika Serikat, akhirnya setelah tiga tahun meringkuk dalam penjara pada Januari 1984 Benazir Bhutto diijinkan meninggalkan Pakistan (*Kompas*, 24 September 1988:1). Kepergian Benazir Bhutto ke luar negeri bukan sekedar dimanfaatkan untuk mengobati infeksi telinga yang

semakin parah, ataupun untuk menyusul sang ibu yang tahun 1982 telah lebih dulu mendapat ijin berobat keluar negeri karena kanker paru-paru yang diderita. Lebih dari itu, Benazir Bhutto memanfaatkan pengasingan di London untuk menjajaki situasi serta untuk menyusun kekuatan baru guna menentang rejim militer pimpinan Zia ul-Haq.

Kepahitan hidup selama di penjara telah membuat Benazir Bhutto menjadi wanita tabah dan berani. Ketika ditanya tentang apakah keberadaan Benazir Bhutto di Eropa adalah dalam rangka pengasingan, dengan tegas Benazir Bhutto membantah:

Kenapa aku harus mengasingkan diri keluar negeri?, aku kemari untuk perawatan kesehatanku. Aku dilahirkan di Pakistan, aku akan mati di Pakistan. Kakekku dimakamkan disana, ayahku dimakamkan disana. Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan negeriku ..., orang tidak dapat hidup berdasarkan rasa takut. Orang hanya akan tetap bertahan kalau ia penuh harap (Dhuroruddin Mashad, 1996: 16).

Kedatangan Benazir Bhutto di London menjadi langkah awal yang tepat. Di London Benazir Bhutto disambut oleh ribuan masyarakat Pakistan di luar lapangan udara *Heatrow*. Banyak diantara masyarakat Pakistan tersebut, terutama anggota *Pakistan People's Party* (PPP) dalam pengasingan meminta bertemu dengan Benazir Bhutto. Selain sebagai tempat bermukim bagi 38.000 orang Pakistan, London menjadi pusat aktivitas *Pakistan People's Party* (PPP) di luar negeri. Kedua adik laki-laki Benazir Bhutto, Shahnawaz dan Murtaza, juga tinggal di London ketika melancarkan aksi politik guna berjuang membebaskan ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto dari penjara dan hukuman mati.

Sambutan masyarakat Pakistan di London yang begitu antusias, semakin menyadarkan Benazir Bhutto bahwa dirinya mempunyai potensi dukungan cukup besar untuk menyusun kekuatan menentang rejim Zia ul-Haq. Selama tinggal di luar negeri, Benazir Bhutto memanfaatkan hidupnya untuk mengurus persoalan-persoalan politik, dalam rangka menyusun kekuatan baru menghadapi rejim militer Pakistan pimpinan Zia ul-Haq.

Benazir Bhutto memanfaatkan undangan teman-temannya semasa kuliah guna melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat setelah selesai berobat. Benazir Bhutto sadar bahwa Amerika Serikat yang sejak 1979 memberi dana serta publisitas cukup besar pada Pakistan penting posisinya untuk membantu melepaskan tawanan politik yang masih mendekam di penjara. Selama di Washington, Benazir Bhutto memanfaatkan

semaksimal mungkin kesempatan dengan mengemukakan berbagai permasalahan keluarga dan atau Negara Pakistan kepada para Senator, termasuk Senator Pell dan Edward Kennedy. Di Amerika Serikat, Benazir Bhutto memperoleh publisitas yang cukup besar.

Kembali ke Inggris, Benazir Bhutto menyewa *flat Barbican*, London, yang dengan cepat menjadi pusat komando *Pakistan People's Party* (PPP) di Eropa. Bersama para anggota *Pakistan People's Party* (PPP) yang ada di London, Benazir Bhutto menerbitkan majalah *Amal* berbahasa Urdu yang menyajikan berbagai peristiwa di Pakistan. Satu setengah tahun menetap di London, waktu Benazir Bhutto habis untuk rapat-rapat politik, kunjungan anggota-anggota *Pakistan People's Party* (PPP) dari Pakistan dan kegiatan-kegiatan politik lainnya. Kesempatan untuk bertemu keluarga pun dimanfaatkan pula untuk mendiskusikan masalah-masalah negara dan atau cara-cara terbaik untuk melawan rejim Zia ul-Haq.

Satu hal yang patut dicatat dari berbagai langkah politis Benazir Bhutto selama di Pakistan maupun pengasingan di London adalah berbeda dari saudara-saudaranya dalam setiap pembicaraan tentang usaha melawan rezim Zia ul-Haq, Benazir Bhutto selalu berpegang pada komitmen untuk menghindari cara-cara kekerasan, yang menurutnya: "Kekerasan akan melahirkan kekerasan. Perubahan iklim menuju demokrasi yang diharapkan permanen, harus melalui jalan damai dan mematuhi peraturan politik melalui pemilu yang didukung rakyat" (Dhuroruddin Mashad, 1990: 18).

Demi melihat Benazir Bhutto bersaudara sangat aktif mengambil langkah-langkah politis selama di pengasingan, pemerintah Pakistan tidak tinggal diam terhadap sikap keluarga Bhutto. Berbagai langkah aktif dan reaktif dilakukan. Terbukti pada tahun 1985 adik bungsu Benazir Bhutto, Shahnawaz tewas di Riviera, Perancis. Diberitakan bahwa kematian Shahnawaz akibat bunuh diri (minum racun), namun para pengikut Shahnawaz lebih percaya bahwa Shahnawaz dibunuh lawan politik (diminum racun) karena telah menggalang kekuatan untuk menggulingkan rejim militer Zia ul-Haq. Selama pemerintahan Zia ul-Haq, Shahnawaz terjun langsung melatih gerilyawan dan melakukan teror terhadap pemerintahan Zia ul-Haq. Oleh karena itu Shahnawaz dianggap



berbahaya bagi pemerintahan militer Zia ul-Haq sehingga harus disingkirkan (*Tempo*, 26 November 1988: 75).

Dugaan bahwa Shahnawaz dibunuh diperkuat oleh cerita Shahnawaz sendiri sewaktu masih hidup. Shahnawaz pernah bercerita bahwa salah seorang keluarga istri Shahnawaz pernah berusaha meracuni Shahnawaz dan Murtaza sewaktu mereka tinggal di Kabul, Afganistan dengan tujuan untuk mendapatkan tanda jasa dari Zia ul-Haq. Berdasarkan pengamatan Benazir Bhutto sepeninggal Shahnawaz, Rehana (istri Shahnawaz) sama sekali tidak menampakkan sebagai seorang istri yang baru saja kehilangan suami. Kecurigaan semakin lengkap, setelah pengadilan Perancis menjatuhkan hukuman pada Rehana, karena dituduh tidak berusaha memberikan pertolongan (membawa ke rumah sakit) ketika tahu Shahnawaz telah meminum racun (Dhuroruddin Mashad, 1996: 18).

Meskipun Shahnawaz terbunuh oleh lawan politiknya, tekad dan keberanian Benazir Bhutto untuk berhadapan dengan rejim penguasa Pakistan tidaklah surut. Setelah jenazah Shahnawaz diautopsi pada Agustus 1985, Benazir Bhutto bertekad kembali ke Pakistan untuk membawa dan mengubur jenazah Shahnawaz pada makam keluarga di Pakistan. Benazir Bhutto menentang berbagai kecemasan dan atau larangan ibu dan saudara-saudaranya. Semula pemerintah Pakistan tidak mengizinkan Benazir Bhutto pulang, mengingat kedatangan Benazir Bhutto dan jenazah Shahnawaz sudah pasti akan membangkitkan emosi para pendukung *Pakistan People's Party* (PPP). Namun akhirnya Benazir Bhutto mampu mendesak pemerintah Pakistan untuk memberikan ijin bagi Benazir Bhutto memakamkan Shahnawaz di Larkana, meskipun dengan dilampiri suatu ketentuan bahwa begitu mendarat di Karachi, jenazah Shahnawaz dibawa langsung ke Larkana (*Tempo*, 15 Agustus 1987: 4).

Usaha Zia ul-Haq untuk dapat membendung emosi massa pelayat tersebut akhirnya gagal, terbukti ribuan orang tetap berjubel disekitar makam AL-Murtaza, Larkana. Tiga hari setelah pemakaman, ketika Benazir Bhutto kembali ke Karachi, ribuan orang di Airport menyambut dan menyampaikan rasa duka cita. Proses penguburan Shahnawaz akhirnya semakin menebalkan keyakinan Benazir Bhutto betapa diri dan keluarga Bhutto mempunyai kekuatan massa sangat potensial untuk mendongkel rejim militer pimpinan Zia ul-Haq.

Pemerintah Pakistan sadar akan fakta bahwa keluarga Bhutto mempunyai dukungan kekuatan massa yang cukup besar. Untuk mencegah semakin meluapnya emosi pendukung keluarga Bhutto, maka lima hari setelah tinggal di Pakistan Benazir Bhutto dikenai tahanan rumah selama 90 hari. Hukuman tahanan rumah dijatuhkan karena Benazir Bhutto dituduh telah mendatangi tempat-tempat yang sensitif di Pakistan, seperti rumah Nasser Baloach dan Ayaz Saramoo, dua pemuda yang terbunuh dalam aktifitas politik. Atas desakan dari luar negeri, pada 3 November 1985 Benazir Bhutto dibebaskan dan diijinkan kembali ke London. Sebelum ke London, kepada para pendukung *Pakistan People's Party* (PPP) Benazir Bhutto berjanji akan kembali ke Pakistan tiga bulan lagi, apapun konsekuensi yang akan dihadapi (Dhuroruddin Mashad, 1990: 19).

Dicabutnya undang-undang darurat pada akhir tahun 1985 serta dikeluarkannya janji untuk menegakkan konstitusi dengan membentuk pemerintahan sipil telah memunculkan sedikit harapan pada Benazir Bhutto bahwa Zia ul-Haq akan menghadapi dirinya sebagai lawan politik yang setara. Terbukti empat bulan setelah dicabutnya undang-undang darurat militer, tepatnya pada 10 April 1986 Benazir Bhutto pulang dari pengasingan di Inggris, untuk kembali menyusun kekuatan rakyat Pakistan melawan pemerintahan militer Zia ul-Haq dan atau meraih kekuasaan. Maksud Benazir Bhutto mendapat sambutan baik dari rakyat Pakistan terutama *Pakistan People's Party* (PPP) (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 37).

Di Taman Iqbal Lahore, kota terbesar kedua setelah Karachi, kedatangan Benazir Bhutto dari Inggris seolah-olah menjawab kerinduan massa yang datang dari berbagai pelosok Pakistan yang menyambut kedatangan Benazir Bhutto. Penyambutan rakyat Pakistan yang begitu besar, membuat Benazir Bhutto semakin yakin betapa rakyat Pakistan sangat mendukung dirinya untuk menegakkan demokrasi. Penyambutan kedatangan Benazir Bhutto dari Inggris segera menjadi aksi unjukrasa anti pemerintah. Inilah aksi protes anti pemerintah terbesar pertama sejak tahun 1977 (*Tempo*, 15 Agustus 1987: 41-42).

Menghadapi aksi Benazir Bhutto, pemerintah cenderung menahan diri. Pemerintah di Islamabad tidak berkeinginan menerapkan reaksi keras, kecuali hanya melontarkan pernyataan yang menelanjangi keburukan sepak terjang politik mendiang Zulfikar Ali Bhutto, yang dijadikan maskot oleh Benazir Bhutto dalam berbagai

kampanyenya. Antusiasme massa dan diamnya pemerintah dimanfaatkan secara maksimal oleh Benazir Bhutto untuk dijadikan langkah awal guna memperjuangkan cita-cita politiknya. Bagi Benazir Bhutto era baru kehidupan politik Pakistan dengan dicabutnya undang-undang darurat adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan. Pada saat bersamaan, dunia masih terpesona oleh keberhasilan revolusi yang digerakkan Cory Aquino (seorang tokoh wanita) untuk mendongkel kediktatoran Presiden Filipina, Ferdinand Marcos (*Kompas*, 24 September 1988: 8).

Benazir Bhutto bahkan sesumbar menyamakan diri dengan Cory Aquino yang sudah menjadi Presiden Filipina. Menurut Ans Gregory Da Iry situasi di Pakistan saat itu memang memiliki persamaan dengan Filipina menjelang jatuhnya rejim Marcos. Oleh Benazir Bhutto momentum yang ada diharapkan akan berpengaruh besar pada rakyat Pakistan untuk mendukung dirinya guna menggulingkan pemerintah Zia ul-Haq yang menurut Benazir Bhutto juga diktator ala Marcos.

Merasa popularitasnya sedang pada posisi puncak, Benazir Bhutto segera berkeliling ke-15 kota guna menggalang kekuatan massa. Sambutan terhadap Benazir Bhutto diberbagai tempat yang disinggahi luar biasa. Suara Benazir Bhutto seolah-olah berkekuatan magis sehingga setiap kali muncul dimuka umum anak sulung Zulfikar Ali Bhutto ini, selalu berhasil membakar semangat massa. Benazir Bhutto memang seorang orator seperti bapaknya. Selain itu Benazir Bhutto cukup pintar memanfaatkan nama besar mendiang Zulfikar Ali Bhutto, terutama dengan cara menggelorakan paham *Bhuttoisme* (*Tempo*, 15 Agustus 1987: 48).

*Bhuttoisme* adalah paham Sosialis Populis yang dicipta oleh mendiang Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto tahun 1971–1977. *Bhuttoisme* merupakan gabungan dari Demokrasi, Sosialisme dan Islam, untuk menolong kaum miskin. Slogannya “Sandang, Pangan, Papan”, yang mampu menjadikan Zulfikar Ali Bhutto sebagai satu-satunya pemimpin dalam sejarah Pakistan yang mendapat dukungan meluas dikalangan bawah (petani dan buruh). Selain itu isu-isu yang dilontarkan Benazir Bhutto berhasil menarik simpati massa (*Kompas*, 24 Oktober 1988: 4).

Bagi berjuta-juta rakyat miskin Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto dianggap penyelamat yang ingin mengarahkan dan memimpin kaum miskin keluar dari kemiskinan dan penindasan. Nama besar Zulfikar Ali Bhutto memang tidak dapat diabaikan, terbukti

para pendukung *Pakistan People's Party* (PPP) selalu mengarak poster Zulfikar Ali Bhutto dalam setiap kampanye Benazir Bhutto. Dimata masyarakat Pakistan, Benazir Bhutto tidak lagi dianggap sebagai pribadinya secara utuh, melainkan telah diidentikkan dengan Zulfikar Ali Bhutto itu sendiri. Benazir Bhutto menyebut politiknya sebagai *Bhuttoisme* untuk meneruskan ide Zulfikar Ali Bhutto, maka wajar jika setiap kali Benazir Bhutto berpidato mengucapkan ide baru maupun ide basi, massa selalu menyambut dengan antusias.

*Pakistan People's Party* (PPP) berhasil mengeksploitasi nama besar mendiang Zulfikar Ali Bhutto untuk merebut simpati rakyat dengan selalu mengangkat peristiwa penggantungan Zulfikar Ali Bhutto oleh rejim Zia ul-Haq. Para kader *Pakistan People's Party* (PPP) mengibaratkan Zia ul-Haq sebagai pembunuh demokrasi dan sumber ketidakadilan. Sebaliknya keluarga Bhutto disebut sebagai penegak demokrasi. Berdasar isu tersebut, maka gambar panah yang dipakai simbol *Pakistan People's Party* (PPP) diibaratkan sebagai panah yang langsung mengarah pada jantung ketidakadilan (*Tempo*, 26 November 1988:70).

Kepulangan Benazir Bhutto dari London, membuat pengaruh Benazir Bhutto untuk membangkitkan semangat menentang rejim Zia ul-Haq semakin meningkat. Benazir Bhutto relatif berhasil memanfaatkan wibawa sebagai pewaris nama besar dan atau kharisma mendiang ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto. Mayoritas rakyat Pakistan terutama di pedesaan masih banyak yang buta huruf. Dengan modal kemahiran berpidato serta ditunjang ilmu pengetahuan yang memadai Benazir Bhutto dengan mudah dapat mengakumulasi wibawa, mempengaruhi rakyat untuk mentransfer loyalitas mereka atas Zulfikar Ali Bhutto kepada dirinya sebagai putri sulung mendiang pendiri *Pakistan People's Party* (PPP) tersebut.

Melihat betapa menjulang nama Benazir Bhutto maka sebulan setelah kepulangan dari Inggris, Benazir Bhutto secara resmi diangkat menjadi wakil ketua *Pakistan People's Party* (PPP). Benazir Bhutto menjadi tokoh paling terkenal dikalangan oposisi. Seluruh kesuksesan yang diraih tidak membuat Benazir Bhutto lupa diri, di tengah semakin beraninya berbagai aksi protes, Benazir Bhutto cukup bijak untuk membaca situasi. Terbukti dari hampir setiap gerakan protes, Benazir Bhutto selalu

menyerukan untuk dihindarinya tindak kekerasan (*non-violent civil disobedience*) guna mencegah campur tangan militer (Tajuk Rencana *Kompas*, 19 Agustus 1986).

Tipe keagamaan rakyat Pakistan masih dominan dengan tipe Muslim Populer yang masih mencampuradukkan tradisi dengan ajaran Islam. Hal ini memberi keuntungan tersendiri bagi upaya Benazir Bhutto untuk memobilisir massa. Mayoritas wanita cenderung optimis bahwa Benazir Bhutto akan membebaskan mereka dari belenggu dominasi pria. Seorang aktifis wanita, Shamin Kazmi misalnya menyebut Benazir Bhutto sebagai tokoh yang menunjukkan bahwa wanita dapat keluar dari dinding rumah. Kepercayaan kaum wanita Pakistan dan kaum miskin tersebut membantu mengeliminir isu yang bermaksud menghalangi wanita menjadi pemimpin. Dengan cerdas Benazir Bhutto selalu melontarkan pendapat tentang tiadanya ayat Al-Qur'an yang secara pasti melarang wanita menjadi pimpinan pemerintahan. Justru sebaliknya, ayat Al-Qur'an ada menggambarkan keberhasilan Ratu Bilkis (semasa nabi Sulaiman) yang berhasil memimpin negeri Saba' secara arif, adil dan bijaksana. Menurut Benazir:

Pria dan wanita dihadapan Tuhan punya kedudukan sama. Saya bangga menjadi wanita Islam. Isu (dalam pemerintahan Pakistan) bukanlah lelaki melawan wanita, tetapi diktator melawan demokrasi. Adalah interpretasi salah dari kaum pria atas ajaran Islam, dan bukan ajaran itu sendiri yang membatasi kesempatan kaum wanita untuk memerintah. Sejarah Islam sebenarnya penuh dengan para wanita yang memainkan peran penting dalam masyarakat serta memerintah dengan kecakapan yang tidak kalah dibanding pria. (*Tempo*, 28 November 1988).

Disebagian kelompok elit "barisan sakit hati" Benazir Bhutto mampu menyebarkan pengaruh, terutama akibat kemampuan Benazir Bhutto memanfaatkan kekecewaan kelompok elit (pengusaha dan tuan tanah) pada beberapa kebijakan Zia ul-Haq. "Elit sakit hati" akhirnya bukan sekedar menjauhkan diri dari rejim penguasa melainkan juga cenderung bekerjasama dengan Benazir Bhutto menjadi oposan bagi pemerintahan Zia ul-Haq. Benazir Bhutto berhasil meyakinkan kalangan pengusaha bahwa *Pakistan People's Party* (PPP) yang berpaham sosialis dan atau *Bhuttoisme* tidak akan mempraktekkan pengambilalihan industri-industri hulu seperti yang pernah dilakukan mendiang ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto.

Benazir Bhutto meyakinkan kalangan pengusaha dengan berjanji akan memberi prioritas pencalonan para jutawan dan bangsawan (terutama berasal dari Punjab) dalam



pemilu pada November 1988. Benazir Bhutto mencoba menjembatani *traditional constituents* dan kelas menengah. Benazir Bhutto mengatakan *Pakistan People's Party* (PPP) akan bekerja untuk menarik investasi asing dan berjanji menghapus nasionalisasi. Langkah ini cukup ampuh mengeliminir kekhawatiran para pengusaha atas kemungkinan pengambilalihan bisnis oleh pemerintah.

*Pakistan People's Party* (PPP) berhasil merekrut kaum feodal (tuan tanah) Punjab secara mengagumkan. Dukungan kaum feodal sangat menguntungkan bukan saja dapat membantu keuangan *Pakistan People's Party* (PPP) melainkan juga dalam merekrut pendukung, mengingat pengaruh kaum feodal memang besar terutama di pedesaan. Bagi kaum feodal daya tarik *Pakistan People's Party* (PPP) lebih banyak terkait dengan soal pajak. Benazir Bhutto pernah berjanji mendukung tuntutan kaum feodal agar pemerintah mengendurkan kebijakan perpajakan. Dan memang Benazir Bhutto pernah melontarkan kritik bahwa penjara bagi yang tidak mampu melunasi pajak adalah kebijakan tidak adil, mengingat para elit feodal sudah banyak membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat proyek-proyek yang menyerap tenaga kerja (*Kompas*, 4 September 1988: 8).

Benazir Bhutto mampu menghapus kekhawatiran kader-kader *Pakistan People's Party* (PPP) atas kemungkinan tergesernya jatah kursi kader-kader *Pakistan People's Party* (PPP) oleh para pendatang baru, yakni para pengusaha dan kaum feodal yang direkrut Benazir Bhutto. Benazir Bhutto berjanji akan tetap mengutamakan orang lama. Kaum feodal, oleh Benazir Bhutto dimanfaatkan lebih guna memobilisir dana dan atau pengaruh untuk upaya meraih kekuasaan (Dhuroruddin Mashad, 1996: 66).

Benazir Bhutto berhasil meredam isu yang menuduh *Pakistan People's Party* (PPP) sebagai penyebar sekulerisme dan atau kolaborator musuh (Soviet dan India). Dengan keahlian orasinya Benazir Bhutto berhasil meyakinkan rakyat bahwa *Pakistan People's Party* (PPP), akan meneruskan Islamisasi dan kebijakan luar negeri pemerintah sebelumnya meskipun dengan isi dan cara berbeda. Benazir Bhutto (*Pakistan People's Party*) akan menjalin hubungan erat dengan Soviet hanya bila unsur-unsur pasukan Soviet telah ditarik dari Afganistan, dan rakyat Afganistan bebas membentuk pemerintahan sendiri (*Tempo*, 26 November 1988: 72).



Dalam soal India, Benazir Bhutto cukup cerdas untuk tidak menyinggungnya mengingat besarnya resiko yang akan muncul, akibat India masih menguasai tanah Khasmir yang selama ini diklaim sebagai wilayah Pakistan. Apalagi kaum Muhajir Muslim India yang mengungsi ke Pakistan pada pemisahan India–Pakistan 1947, kedudukannya kuat dalam spektrum politik dan ekonomi Pakistan. Dengan tidak menyentuh isu India, Benazir Bhutto berhasil terhindar dari rasa ketidaksukaan kaum Muhajir (Dhuroruddin Mashad, 1996: 65).

Manuver politik yang dijalankan Benazir Bhutto sangat menguntungkan posisi Benazir Bhutto. Benazir Bhutto mampu mengakomodir kekuatan dengan cermat dan hati-hati sehingga dimungkinkan tidak akan ada golongan yang merasa kecewa terhadap politik yang dilaksanakan oleh Benazir Bhutto. Bila konstitusi benar–benar ditegakkan dan pemilu berdasarkan partai dilaksanakan, maka kemungkinan besar Benazir Bhutto dan *Pakistan People's Party* (PPP) dapat memenangkan pemilu.

## **B. Masa Pemerintahan Darurat Militer M. Zia ul-Haq**

### **1. Situasi Politik Pakistan Masa Pemerintahan M. Zia ul-Haq**

Pemerintahan Zia ul-Haq berdiri setelah melakukan kudeta terhadap pemerintahan Zulfikar Ali Bhutto. Pemerintahan Zia ul-Haq merupakan pemerintahan yang didasarkan pada undang–undang darurat militer. Selama berkuasa, Zia ul-Haq berupaya menerapkan Islamic Orde yaitu suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Kebijakan Islamic Orde cukup memenuhi harapan rakyat Pakistan yang mayoritas Muslim (*Kompas*, 24 Oktober 1988: 4). Pemerintahan otoriter di bawah naungan undang–undang darurat militer, menimbulkan kekhawatiran Zia ul-Haq bahwa pemerintahannya tidak akan mampu bertahan lama. Pada saatnya, rakyat Pakistan pasti akan mencapai puncak kejenuhan yang tidak mustahil akan termanifestasikan dalam berbagai bentuk protes.

Zia ul-Haq menyadari kemungkinan ini dan oleh karena itu Zia ul-Haq berusaha melepaskan undang–undang darurat dengan cara mencari dukungan rakyat melalui suatu referendum nasional pada bulan Desember 1984. Dalam referendum tersebut, Zia ul-Haq memperoleh legitimasi dari rakyat untuk memegang mandat memimpin Pakistan sampai tahun 1990. Dengan modal referendum, pada Maret 1985 Zia ul-Haq membentuk

pemerintahan sipil dengan Mohammad Khan Junejo sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya, para Gubernur Militer diseluruh propinsi serentak diganti dengan gubernur dari kalangan sipil (Shahid Javed Burki, 1991: 75).

Sebagai politisi sejati, Zia ul-Haq tidak ingin kehilangan kekuasaan dan otoritasnya dikancah perpolitikan Pakistan. Meskipun pemerintahan Pakistan dipimpin Khan Junejo namun Zia ul-Haq masih memegang kekuasaan tertinggi, dengan tetap memegang jabatan Presiden, Panglima Angkatan Bersenjata, serta tetap menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan cara demikian berarti Zia ul-Haq masih tetap mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk khususnya mengawasi secara langsung Angkatan Darat, salah satu unsur paling dominan dalam Angkatan Bersenjata.

Sebelum undang-undang darurat dicabut, Zia ul-Haq mengumumkan beberapa amandemen konstitusi untuk memperkuat kedudukannya sebagai Presiden. Zia ul-Haq membentuk Dewan Keamanan Nasional (beranggotakan 11 orang) yang dipimpinnya sendiri, dan memegang hak penuh untuk menunjuk serta memecat Perdana Menteri, para Menteri dan Gubernur. Melalui amandemen, Zia ul-Haq mengukuhkan kekuasaan Presiden (yang sedang dipegangnya) untuk membubarkan Dewan Nasional dan Dewan Propinsi (*Tempo*, 27 Agustus 1988:34).

Setelah kedudukannya mantap, pada 30 Desember 1985 Zia ul-Haq mencabut undang-undang darurat dan mengembalikan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil. Disusul pembubaran pengadilan-pengadilan militer serta memberlakukan kembali konstitusi yang telah diubah sebelumnya. Personil militer yang sebelumnya duduk dalam jabatan-jabatan sipil segera diganti dengan aparat dari sipil. Kabinet baru, dibentuk di bawah pimpinan Khan Junejo, Perdana Menteri terpilih yang sekaligus menjadi ketua *Pakistan Muslim League* (PML) yang komposisinya telah diubah menurut selera Zia ul-Haq.

Faktor Zia ul-Haq tetap dominan dalam pemerintahan baru, maka oposisi khususnya Benazir Bhutto memandang berbagai manuver politik Zia ul-Haq hanya sebagai perubahan dalam soal nama belaka. Menurut oposisi, pemerintah sipil dengan Khan Junejo sebagai Perdana Menteri, tetap berada di bawah kekuasaan dan kendali Zia ul-Haq. Sehingga perlakuan terhadap rakyat akan tetap sama (Dhuroruddin Mashad, 1996: 23).

Pada masa pemerintahan Zia ul-Haq banyak politisi yang dijebloskan ke dalam penjara selama bertahun-tahun oleh pengadilan-pengadilan hukum darurat militer karena tindakan-tindakan politik dan menentang rejim militer. Selain itu banyak politisi dari kalangan oposisi yang mengasingkan diri ke luar negeri terutama ke Inggris untuk menghindari penahanan oleh pemerintahan militer (*Angkatan Bersenjata*, 23 Maret 1989: 4). Pada masa pemerintahan Zia ul-Haq terjadi pembelengguan terhadap media massa. Pelarangan penyiaran pandangan dan berita dari pihak oposisi. Organisasi-organisasi mahasiswa dilarang dan dibubarkan. Mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan politik dikeluarkan dari universitas. Kampus-kampus dijaga ketat oleh aparat polisi (*Kompas*, 28 Oktober 1988: 7).

Masalah krusial yang selalu timbul dan selalu berujung pada konflik secara fisik adalah bahwa masyarakat Islam Pakistan yang heterogen tidak saja dilihat dari segi etnik, wawasan keagamaan dan aliran agama Islam yang menyebabkan perbedaan pendapat tentang tata cara pelaksanaan cita-cita Islam. Dalam hal ini wawasan keagamaan setidaknya ada tiga kelompok yang selalu bersaing yaitu kaum modernis, tradisional/fundamentalis dan golongan sekuler.

Dari segi aliran agama Islam terdapat tiga aliran, yakni golongan Ahlus Sunnah wal jamaah (golongan sunnah) sebagai kelompok mayoritas, aliran Syi'ah dan Ahmadiyah, yang resistan karena dianggap sebagai kelompok minoritas non-Muslim (*Kompas*, 24 Oktober 1988: 4). Antara golongan-golongan aliran agama ini sering terjadi perbedaan pendapat yang seringkali berujung pada konflik secara fisik, sehingga kerusuhan sering terjadi. Kerusuhan yang terjadi bukan saja disebabkan oleh masalah agama, sering juga disebabkan oleh kecemburuan sosial terutama terhadap kaum Mohajir (pendatang dari India) yang umumnya menguasai perekonomian dan politik di Pakistan (*Kompas*, 18 Oktober 1988: 1).

Kehadiran jutaan pengungsi Afganistan yang kebanyakan bersenjata, juga turut menggoyahkan ketertiban di Pakistan. Arus senjata dari medan perang yang memasuki pasar gelap Pakistan sangat tinggi. Diperkirakan terdapat 300 ribu AK 47 beredar di pasar gelap Pakistan, belum lagi dari jenis lainnya. Akibat kemudahan mendapatkan senjata, berpengaruh pada tingginya tindak kekerasan di Pakistan. Perang antar suku dengan menggunakan senjata di Pakistan selalu menghiasi berita rutin di media massa Pakistan

setiap pagi. Di kota-kota besar Pakistan misalnya; Karachi dan Hyderabad sering terjadi kerusuhan yang menewaskan ratusan orang (*Tempo*, 26 November 1988: 73). Masa pemerintahan Zia ul-Haq instabilitas politik sering terjadi sehingga ikut berperan dalam kelanggengan pemerintahan darurat militer pimpinan Zia ul-Haq.

Pada 29 Mei 1988, Zia ul-Haq mengumumkan pemecatan Khan Junejo dari jabatan Perdana Menteri berikut pembubaran kabinet dan parlemen. Pengumuman itu disusul dengan pembubaran parlemen daerah di empat propinsi : Sind, Punjab, Baluchistan, dan Nort West Frontier Province (NWFP). Pemecatan terhadap Khan Junejo berakibat pada membelotnya Khan Junejo menjadi oposisi pada pemerintahan Zia ul-Haq dengan didukung oleh *Pakistan Muslim League* (PML) faksi Junejo (*Angkatan Bersenjata*, 23 Maret 1989: 4).

Pada masa pemerintahan Zia ul-Haq banyak muncul oposan, dengan oposan terdepan adalah Benazir Bhutto yang telah menjadi oposan selama 11 tahun. Bagi para pendukung dan pengagumnya, Benazir Bhutto dijuluki “Lambang Demokrasi”. Benazir Bhutto merupakan orang pertama yang berjuang dan mengusahakan keikutsertaan partai politik dalam pemilu yang merupakan ciri utama dalam pelaksanaan demokrasi (M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar dan Happy Bone Zulkarnaen, 1993: 196). Untuk menghadapi oposisi, Zia ul-Haq menerapkan dua langkah yakni:

- a. Membentuk opini umum dengan menyebut para politikus oposisi sebagai “ingin menyontek demokrasi model Barat” yang tidak sesuai dengan Islam.
- b. Akan diberlakukan sistem pemilu nonpartai, seperti pemilu tahun 1985. Hal ini berarti semua calon adalah independen dan tidak ada satu partai pun berhak mengklaim kemenangan dalam pemilu.

Keputusan Zia ul-Haq unuk tidak mengikutsertakan partai politik dalam pemilu akhirnya mengundang gelombang protes. Menghadapi gelombang protes tersebut, Zia ul-Haq bersikap tenang. Dengan tegas Zia ul-Haq menyatakan “Tak ada partai politik di Pakistan, yang ada cuma *Pressure Groups* yang mewakili kepentingan-kepentingan tertentu, bukan kepentingan rakyat. Karena itu partai politik tidak layak ikut pemilu”(Tempo, 27 Agustus 1988: 32). Seandainya partai-partai politik akhirnya diperkenankan terlibat dalam pemilu, menurut Zia ul-Haq itu masih dengan syarat harus mendaftarkan diri sebelum pemilu dilaksanakan.

Benazir Bhutto menilai keputusan Zia ul-Haq sebagai inkonstitusional, sehingga Benazir Bhutto mengajukan persoalan tersebut ke meja pengadilan. Keluhan Benazir Bhutto dimenangkan Mahkamah Agung (MA) (*Angkatan Bersenjata*, 23 Maret 1989: 4). Setelah pengadilan memenangkan kubu Benazir Bhutto, Zia ul-Haq menurunkan kebijakan *Islamic Legal Code* pada tanggal 15 Juni 1988 sebagai hukum tertinggi di Pakistan. Dengan *Islamic Legal Code* berarti semua pembuatan hukum di Pakistan selanjutnya baik untuk tingkat federal maupun propinsi harus sesuai dengan ajaran Islam. Artinya Syariah yang berorientasi pada Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagai norma dasar dan penuntun bagi semua pembuatan kebijakan negara (*Kompas*, 24 Oktober 1988: 4).

Dengan *Islamic Legal Code*, Zia ul-Haq berusaha mencegah Benazir Bhutto memenangkan pemilu mendatang. Mahkamah Agung segera diperintahkan oleh Zia ul-Haq untuk meninjau kembali semua ketentuan hukum yang berlaku di Pakistan, termasuk yang menyangkut pemilu dan konstitusi untuk disesuaikan dengan *Islamic Legal Code*. Sasaran perintah Zia ul-Haq jelas untuk membendung peluang wanita menjadi kepala pemerintahan, kesempatan yang sedang terbuka bagi Benazir Bhutto. Sesuai dengan interpretasi umumnya ulama Pakistan, bahwa Islam melarang wanita menjadi pemimpin pemerintahan (Dhuroruddin Mashad, 1996: 36).

## **2. Akhir Pemerintahan Zia ul-Haq**

Rabu 17 Agustus 1988, pesawat angkut militer jenis C-130 yang ditumpangi Jend. Zia ul-Haq meledak beberapa menit setelah lepas landas dari bandara sipil Bahawalpur, 550 kilometer sebelah Selatan Islamabad pukul 11.30 waktu setempat. Pesawat Hercules itu mengangkut 20 tokoh utama militer Pakistan termasuk orang kuat kedua Pakistan, yakni Kepala Staf Angkatan Bersenjata (AB) Jend. Akhtar Abdur Rahman, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Pakistan, Arnold Raphel dan penasehat militer AS untuk Pakistan sekaligus penanggung jawab penyaluran bantuan senjata untuk Mujahiddin Afganistan, Brigjend. Herbert Wassom. Tidak satu pun dari ke-30 penumpang pesawat yang selamat (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 30).

Hasil penyelidikan para ahli Pakistan dan AS memastikan bahwa ledakan pesawat merupakan ulah sabotase. Pada bangkai pesawat ditemukan bahan-bahan kimia



seperti *Pentaerythritoltetranitrate* yang biasa dipakai untuk peledak berkekuatan tinggi. Juga terdapat *Fosfor, Klorin, Potassium, Antimoni, Pentaerithaerithritol* yang biasa dipakai untuk bahan peledak dalam jumlah besar (*Kompas*, 18 Oktober 1988: 1).

Akibat kematian Zia ul-Haq, perkabungan selama 10 hari diterapkan di Pakistan. Sesuai konstitusi, Ketua Parlemen Ghulam Iskhaq Khan menjabat Presiden sementara. Ghulam Iskhaq Khan khawatir tentang kemungkinan meledaknya dendam para penentang Zia ul-Haq disaat seluruh negara berkabung, untuk itu undang-undang darurat diterapkan. Ghulam Iskhaq Khan mengumumkan bahwa telah terbentuk komite darurat beranggotakan 13 orang termasuk lima menteri senior, beberapa pemimpin propinsi dan para panglima ketiga cabang Angkatan Bersenjata (Shahid Javed Burki, 1991: 95). Stasiun televisi dan pemancar radio dijaga dengan ketat agar tidak direbut oleh pihak oposisi. Selama seminggu suasana duka dan perang bercampur aduk di Pakistan (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 30).

Kematian Zia ul-Haq beserta tokoh-tokoh militer Pakistan merupakan tragedi nasional. Zia ul-Haq terbunuh tanpa sempat mempersiapkan putra mahkota, dan sejumlah putra terbaik Pakistan ikut tewas. Kematian Zia ul-Haq menimbulkan kekosongan kekuasaan di Pakistan. Orang yang paling gembira mendengar kematian Jend. Zia ul-Haq tentunya Benazir Bhutto (*Kompas*, 24 September 1988: 8). Bukan saja karena Zia ul-Haq telah menggantung Zulfikar Ali Bhutto, lebih dari itu kematian Zia ul-Haq bersama 20 orang dekatnya telah membawa kekosongan kekuasaan di Pakistan, yang berarti pula membuka peluang bagi Benazir Bhutto untuk masuk gerbang kekuasaan. Hal ini dimungkinkan karena pasca kematian Zia ul-Haq tidak ada tokoh sepopuler Benazir Bhutto untuk menjadi Perdana Menteri Pakistan (M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar dan Happy Bone Zulkarnaen, 1993: 195).

Masih terdapat satu kendala yang menjadi pertimbangan Benazir Bhutto dalam memegang kekuasaan yaitu kemungkinan militer dapat menerima kepemimpinan Benazir Bhutto, seorang wanita sipil yang kebarat-baratan. Kecemasan Benazir Bhutto beralasan, mengingat militer sangat dominan mewarnai spektrum politik Pakistan. Siapa saja yang berambisi pada jabatan kepresidenan atau Perdana Menteri terlebih dahulu harus mendapat restu militer. Kecemasan Benazir Bhutto dijawab Ghulam Ishaq Khan, yang menjamin bahwa konstitusi akan dipatuhi pemerintah. Ghulam Iskhaq Khan menyatakan



pemerintahan yang direstui konstitusi hanyalah yang dibentuk lewat pemilu, termasuk untuk anggota parlemen pusat dan daerah, sehingga pengambilalihan kekuasaan oleh militer tidak dapat dibenarkan (*Tempo*, 26 November 1988: 68).

Pemilu pada bulan November 1988 akan berlangsung atas dasar partai namun jaminan bahwa pemilu dilaksanakan tepat waktu dan sesuai aturan konstitusi masih menjadi tanda tanya, meskipun Presiden telah memberikan jaminan. Ada kemungkinan militer mengambil alih kekuasaan dari Presiden Ghulam Iskhaq Khan sebelum orang-orang partai berebut kursi pemerintahan, terutama atas pertimbangan menjaga stabilitas pemerintahan. Meledaknya pesawat yang menewaskan Zia ul-Haq berarti pula sebagai ledakan bagi kestabilan politik di Pakistan. Hal ini disebabkan Pakistan belum siap menampilkan calon pengganti Zia ul-Haq. Kader belum terbina, oposisi sulit bergerak, militer terlalu kuat dan konstitusional belum terjamin. Padahal proyek besar (pemilu) baru akan dilaksanakan pada tanggal 16 November 1988.

Hari-hari setelah kematian Zia ul-Haq, kerusuhan kembali terjadi terutama di Hyderabad dan Karachi yang disebabkan pertikaian etnis antara Sindhi dan Mohajir. Kerusuhan yang terus terjadi, menyebabkan jam malam diberlakukan. Perintah tembak di tempat diberlakukan pihak keamanan di Hyderabad dan Karachi untuk menghentikan kerusuhan. Kedua kota tersebut akhirnya untuk beberapa hari bagaikan kota hantu dengan suasana yang sepi dan mencekam. Penjagaan sudah diketatkan oleh aparat polisi namun di beberapa tempat masih terjadi pembantaian. Korban dari pertikaian etnis ini lebih dari 400 orang (*Kompas*, 3 Oktober 1988: 1).

Kerusuhan terus berlanjut dan semakin berani dengan adanya penembakan terhadap rakyat di tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi orang, misalnya; bioskop dan pasar (*Kompas*, 4 Oktober 1988: 4). Aksi pembantaian akhirnya meluas hingga Lahore (*Kompas*, 28 Oktober 1988: 7).

Dalam situasi politik Pakistan yang tidak menentu ini, Amerika Serikat (AS) sebagai pihak paling berkepentingan atas Pakistan dalam kerangka politik globalnya di Asia Selatan dan di Dunia Islam mengirim Robert Oakley untuk mengisi kursi Duta Besar menggantikan Arnold L. Raphel yang tewas bersama Zia ul-Haq. Pakistan menjadi tempat untuk menampung gerilyawan Mujahidin sebelum melaksanakan gerilya di wilayah Afganistan. AS berkepentingan dengan gerilyawan Mujahiddin ini terutama

mengenai bantuan persenjataan. Dari Pakistanlah bantuan AS untuk kaum pejuang Afganistan disalurkan. Bagi Pakistan, masuknya Soviet ke Afganistan merupakan ancaman potensial bagi regional secara keseluruhan di kawasan Asia Selatan. Dengan kemampuannya (Zia ul-Haq) berusaha menentang Soviet dan akhirnya menjadi arsitek kekalahan terbesar Soviet di Afganistan baik secara militer maupun politis (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 32).

AS mengirim Menlu George Shultz didampingi para Pejabat Tinggi Konggres untuk melayat sekaligus mengadakan perundingan dengan para elit Pakistan. George Shultz mendesak Presiden Ghulam Ismaq Khan untuk memegang tanggung jawab (janjinya) melaksanakan pemilu dan membiarkan terlaksananya "*Electroral system*". Pemerintah AS di Washington melalui juru bicara Departemen Luar Negeri, Phyllip Oakley menyatakan menyambut baik rencana Pakistan menyelenggarakan pemilu pada bulan November 1988 sebagaimana dijadwalkan sebelumnya. Presiden AS, Ronald Reagan menyatakan bahwa Washington akan mendukung Pakistan tanpa memandang pribadi pemimpin yang akan duduk pada puncak kekuasaan di Islamabad. Untuk memperkuat itikad baiknya, Washington menawarkan jasa lewat ucapan Wakil Presiden George Bush kepada Ghulam Ishaq Khan: "Marilah kita mengarahkan diri pada tugas menciptakan perdamaian regional, sebagaimana didedikasikan Presiden Zia ul-Haq semasa hidup. Kami tahu anda mengemban tanggung jawab besar sejak ditinggal (mendiang) Zia ul-Haq. Untuk itu jangan ragu mengetuk bantuan Amerika".

Oleh sementara pengamat ucapan Washington secara implisit menyiratkan makna bahwa AS bersedia campur tangan bila terjadi kemelut di Pakistan. Ucapan AS jelas tidak menguntungkan posisi militer bila berkeinginan mengambil alih pemerintahan. Karena langkah demikian akan merangsang munculnya protes serta tidak mustahil dapat menggoncangkan stabilitas negara, yang pada gilirannya tidak mustahil memungkinkan AS campur tangan terutama bila ada pihak yang memintanya.

Kemungkinan AS melibatkan diri secara langsung dalam persoalan Pakistan akhirnya sangat kecil karena militer masih mempunyai nyali untuk menentang. Militer cukup berfikir bahwa di kancah politik Internasional peran Pakistan belum selesai, terutama masalah Afganistan sehingga militer tidak perlu lebih menyibukkan diri dengan mengambil alih kekuasaan negara. Separuh pasukan Soviet di Afganistan telah ditarik

mundur (serta akan disusul separuhnya lagi secara bertahap), namun Soviet tetap akan mengoperasikan kekuatan intelijennya di Kabul termasuk bantuan senjata dan sejumlah penasihat militer guna tetap mempertahankan pengaruh. Hal ini jelas tetap menjadi ancaman keamanan bagi Pakistan. Oleh karena itu dapat dipahami jika Pakistan masih sangat membutuhkan bantuan persenjataan dari AS.

Konsekuensinya militer Pakistan harus mengabdikan kehendak AS, yakni menjaga stabilitas nasional dengan membiarkan pergantian kepemimpinan secara damai dan demokratis melalui pemilu. Pengaruh AS terhadap pemilu sudah ada sejak Zia ul-Haq masih hidup. AS pernah menyatakan kekecewaan yang sangat dengan diundur-undurkannya pemilu setelah pemecatan Khan Junejo. Reaksi AS tersebut dilakukan setelah ada desakan dari Benazir Bhutto yang meminta AS untuk memberikan reaksi terhadap adanya krisis konstitusi yang terjadi akibat pembubaran pemerintahan Khan Junejo (Dhuroruddin Mashad, 1996: 56-57).

Kematian Zia ul-Haq akhirnya turut mengubur ketakutan orang-orang partai. Partai politik tidak lagi dihantui oleh sistem pemilu non partai seperti yang selama ini diterapkan pemerintahan Zia ul-Haq. Presiden Ghulam Iskhaq Khan telah berjanji akan mematuhi konstitusi yang berarti pula pemilu untuk anggota Parlemen Pusat dan Daerah pada tanggal 16 November 1988 akan berlangsung atas dasar partai. Demokrasi di Pakistan akan benar-benar dapat dijalankan karena Mahkamah Agung Pakistan membatalkan keputusan Zia ul-Haq dengan memperbolehkan kandidat dalam pemilu November 1988 di bawah naungan partai. Keputusan Mahkamah Agung dikeluarkan setelah adanya protes dari Benazir Bhutto terhadap kebijakan mendiang Zia ul-Haq yang menyatakan bahwa kandidat pemilu harus maju secara individual, tidak boleh berafiliasi dengan partai (M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar dan Happy Bone Zulkarnaen, 1993: 196).

Bagi Benazir Bhutto, kematian Zia ul-Haq telah memberi arti khusus berupa kesempatan untuk merebut kursi kekuasaan yang sebelumnya pernah diduduki mendiang ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto. Benazir Bhutto menyatakan partai oposisinya (*Pakistan People's Party*) dapat menang jika pemilu pada bulan November 1988 dilaksanakan secara jujur. Benazir Bhutto menghimbau para politisi agar menghindari bentrokan dengan militer untuk mencegah pengambilalihan kekuasaan oleh militer sebelum pemilu

dilaksanakan. Peluang Benazir Bhutto menuju puncak kekuasaan Pakistan semakin terbuka setelah Mahkamah Agung menolak tuntutan Khan Junejo untuk kembali menjadi Perdana Menteri. Tuntutan Khan Junejo untuk kembali menduduki kursi Perdana Menteri didasarkan pada anggapan bahwa pemecatan dirinya oleh almarhum Zia ul-Haq sebenarnya tidak sah (*Kompas*, 24 September 1988: 8).

Setelah kematian Zia ul-Haq, Ejaz putra sulung Zia ul-Haq membentuk gerakan politik yang dinamakan Gerakan Pemuda. Ejaz menyatakan “ Mending ayah saya yakin bahwa demokrasi ala Barat tidak akan memberikan kelanggengan apapun pada masyarakat Islam” (*Kompas*, 27 September 1988: 7). Dengan gerakan pemuda, Ejaz berharap dapat menekan pengaruh pihak oposisi sebelum pemilu dilaksanakan dan atau menghambat oposisi untuk berkuasa di Pakistan.

### **C. Keterlibatan Benazir Bhutto Dalam Pemerintahan**

#### **1. Oposisi Terhadap Pemerintahan Zia ul-Haq**

Dicabutnya undang-undang darurat militer dan dikeluarkannya janji untuk menegakkan konstitusi memunculkan harapan bagi Benazir Bhutto bahwa Zia ul-Haq akan menghadapi dirinya sebagai lawan politik yang setara. Pada 10 April 1986 Benazir Bhutto pulang dari pengasingan di Inggris untuk menghidupkan kembali perlawanan terhadap pemerintahan Zia ul-Haq (*Tempo*, 15 Agustus 1987: 41).

Kepulangan Benazir Bhutto ke Pakistan, membuat pengaruh Benazir Bhutto untuk membangkitkan semangat menentang rejim Zia ul-Haq semakin meningkat. Benazir Bhutto berhasil memanfaatkan wibawa sebagai pewaris nama besar dan atau kharisma mending Zulfikar Ali Bhutto. Mayoritas rakyat Pakistan masih buta huruf, sehingga dengan modal kemahiran berpidato serta ditunjang ilmu pengetahuan yang memadai Benazir Bhutto dengan mudah dapat mengakumulasi wibawa, mempengaruhi rakyat untuk mentransfer loyalitas atas Zulfikar Ali Bhutto kepada dirinya.

Tipe keagamaan rakyat Pakistan dominan dengan tipe Muslim Populer yang masih mencampuradukkan tradisi dengan ajaran Islam. Hal ini memberi keuntungan bagi upaya Benazir Bhutto untuk memobilisir massa. Dikalangan kelompok elit tradisional “barisan sakit hati”, Benazir Bhutto mampu menyebarkan pengaruh terutama dengan memanfaatkan kekecewaan kelompok elit tradisional pada beberapa kebijakan Zia ul-

Haq. “Elit sakit hati” akhirnya bukan sekedar menjauhkan diri dari rejim penguasa melainkan juga cenderung bekerjasama dengan Benazir Bhutto menjadi oposan bagi pemerintahan Zia ul-Haq (*Tempo*, 26 November 1988: 71).

Pada akhir tahun 1985, Zia ul-Haq mencabut undang-undang darurat militer serta membentuk pemerintahan sipil di bawah pimpinan Perdana Menteri Mohammad Khan Junejo. Namun demikian, Zia ul-Haq tetap menjadi orang nomor satu Pakistan dengan tetap memegang jabatan Presiden. Pencabutan keadaan darurat militer telah mendorong Benazir Bhutto kembali ke Pakistan untuk menyusun kekuatan melawan Zia ul-Haq dan atau meraih kekuasaan. Maksud Benazir Bhutto mendapat sambutan baik dari rakyat Pakistan (Dhuroruddin Mashad, 1996: 24).

Di Taman Iqbal Lahore, kota terbesar kedua setelah Karachi pada 10 April 1986, Benazir Bhutto menjawab kerinduan massa yang datang dari berbagai pelosok Pakistan untuk menyambut kedatangannya dari Inggris. Benazir Bhutto yakin rakyat Pakistan sangat mendukung dirinya untuk menegakkan demokrasi. Penyambutan terhadap kedatangan Benazir Bhutto dari Inggris segera menjadi aksi unjuk rasa anti pemerintah, inilah aksi protes anti pemerintah terbesar sejak tahun 1977 (*Tempo*, 15 Agustus 1987: 41).

Menghadapi aksi Benazir Bhutto, pemerintah cenderung menahan diri. Pemerintahan di Islamabad tidak menerapkan reaksi keras, hanya melontarkan pernyataan yang menelanjangi keburukan sepak terjang politik mendiang Zulfikar Ali Bhutto, yang dijadikan maskot dalam kampanye oleh Benazir Bhutto. Antusiasme massa dan diamnya pemerintah, dimanfaatkan secara maksimal oleh Benazir Bhutto. Reaksi diam pemerintah, dimanfaatkan Benazir Bhutto sebagai langkah awal guna memperjuangkan cita-cita politiknya (Dhuroruddin Mashad, 1990: 25).

Pada saat bersamaan, dunia masih terpesona oleh keberhasilan revolusi yang digerakkan Cory Aquino (seorang tokoh wanita) untuk mendongkel kediktatoran Presiden Filipina, Ferdinand Marcos. Benazir Bhutto menyamakan dirinya dengan Cory Aquino yang sudah menjadi Presiden Filipina. Situasi di Pakistan pada saat itu, memiliki persamaan dengan Filipina menjelang jatuhnya rejim Marcos. Oleh Benazir Bhutto, kemampuan Cory Aquino menumbangkan rejim Marcos diharapkan akan berpengaruh pada rakyat Pakistan untuk mendukung dirinya yang juga seorang wanita guna



menggulingkan pemerintah Zia ul-Haq yang menurut Benazir Bhutto juga diktator ala Marcos (*Kompas*, 24 September 1988: 8).

Benazir Bhutto berkeliling ke 15 kota guna menggalang kekuatan massa. Sambutan massa terhadap Benazir Bhutto diberbagai tempat yang disinggahi sangat luar biasa. Suara Benazir Bhutto seolah-olah berkekuatan magis, setiap kali muncul dimuka umum anak sulung Zulfikar Ali Bhutto ini selalu berhasil membakar semangat massa. Benazir Bhutto seorang orator seperti Zulfikar Ali Bhutto. Benazir Bhutto cukup pintar memanfaatkan nama besar mendiang Zulfikar Ali Bhutto, terutama dengan cara menggelorakan faham *Bhuttoisme*, yakni faham yang digulirkan oleh Zulfikar Ali Bhutto pada masa pemerintahannya (*Tempo*, 15 Agustus 1987: 48).

*Bhuttoisme* adalah paham Sosialis Populis yang dicipta oleh mendiang P.M. Zulfikar Ali Bhutto tahun 1971–1977. Paham *Bhuttoisme* menurut Zulfikar Ali Bhutto sebagai gabungan dari Demokrasi, Sosialisme dan Islam, untuk menolong kaum miskin. Slogannya “Sandang, Pangan, Papan”, yang mampu menjadikan Zulfikar Ali Bhutto sebagai satu-satunya pemimpin dalam sejarah Pakistan yang mendapat dukungan meluas dikalangan bawah (petani dan buruh). Dimata masyarakat Pakistan, Benazir Bhutto tidak lagi dianggap sebagai pribadinya secara utuh, melainkan telah diidentikkan dengan Zulfikar Ali Bhutto (*Tempo*, 26 November 1988: 77). Persepsi rakyat Pakistan terhadap diri Benazir Bhutto yang tidak lagi dipandang hanya sebagai seorang wanita biasa sangat menguntungkan posisi Benazir Bhutto. Karena jika konstitusi benar-benar ditegakkan dan pemilu berdasarkan partai dilaksanakan, maka kemungkinan besar Benazir Bhutto dan partainya (*Pakistan People's Party*) dapat memenangkan pemilu.

Berdasarkan popularitas Benazir Bhutto, sebulan setelah kepulangan dari Inggris, Benazir Bhutto secara resmi diangkat menjadi wakil ketua *Pakistan People's Party* (PPP). Benazir Bhutto juga menjadi tokoh paling terkenal dikalangan oposisi. Seluruh kesuksesan yang diraih tidak membuat Benazir Bhutto lupa diri. Di tengah makin beraninya berbagai aksi protes, Benazir Bhutto cukup bijak membaca situasi. Terbukti dari hampir setiap gerakan protes, Benazir Bhutto selalu menyerukan untuk dihindari tindak kekerasan (*non-violent civil disobedience*) guna mencegah campur tangan militer (Tajuk Rencana *Kompas*, 19 Agustus 1986).



Langkah Benazir Bhutto yang hati-hati tersebut didasarkan pada pidato Zia ul-Haq di depan Sidang Majelis Nasional ketika mencabut keadaan darurat. Zia ul-Haq menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata secara tegas akan turun tangan apabila negara mengalami situasi yang membahayakan akibat terjadinya kegoncangan politik. Oleh sebab itu, kecaman–kecaman yang dilontarkan Benazir Bhutto dan para kader *Pakistan People's Party* diupayakan untuk lebih diorientasikan pada tuntutan pelaksanaan pemilu sesegera mungkin daripada mengecam dan atau menghina pribadi presiden Zia ul-Haq. Pemerintah tidak menanggapi tuntutan oposisi agar pemilu dilaksanakan pada tahun 1986 dan bukan 1990 seperti yang dikehendaki Zia ul-Haq. Akibatnya oposisi meningkatkan aksi protes, bahkan merancang suatu protes terbesar pada tanggal 14 Agustus 1986 guna memanfaatkan waktu pergi haji Zia ul-Haq.

Rencana oposisi tersebut mengusik kekhawatiran P.M. Khan Junejo, yang pada berbagai protes sebelumnya cenderung bersikap diam. Pemerintahan Khan Junejo, mengeluarkan perintah “Oposisi yang tergabung dalam *Movement For Restore of Democracy* (MRD) hendaknya menanggihkan rencana pelaksanaan rapat umum politik di Lahore (ibukota Punjab) yang bertepatan dengan hari kemerdekaan Pakistan”. Sebaliknya, pihak pemerintah juga membatalkan rapat umum *Pakistan Muslim League* (PML) yang rencananya juga akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama, guna menghindari bentrokan antar kelompok.

*Movement For Restore of Democracy* (MRD) mengabaikan peringatan pemerintahan Khan Junejo. Pada 12 Agustus 1986, *Movement For Restore of Democracy* (MRD) mengumumkan tekadnya untuk meneruskan rencana penyelenggaraan rapat umum dan arak–arakkan. Sesaat setelah pengumuman itu pemerintah mengumumkan pelarangan bagi *Movement For Restore of Democracy* (MRD) melakukan aktifitasnya selama lima hari. Pada saat bersamaan, polisi menangkap ratusan aktivis dan pemimpin oposisi termasuk Benazir Bhutto. Benazir Bhutto ditangkap ketika akan naik pesawat di Bandara Karachi untuk menuju Faisalabad.

Benazir Bhutto sedianya akan dibawa oleh iring–iringan mobil dari Faisalabad menuju Lahore, tempat pertemuan *Movement For Restore of Democracy* (MRD). Para pimpinan *Pakistan People's Party* (PPP) yang ditahan termasuk Piyar Ali Allana, Makhдум Kholiq Zaman, Syekh Rashid. Sedangkan dari *Movement For Restore of*

*Democracy* (MRD) antara lain Fateh Yab Ali, Khawaja Ahahuddin, Nawabzada Nasrullah Khan, Malik Qosim, Meraj Mohammad Khan. Benazir Bhutto ditangkap atas tuduhan telah melanggar larangan berkumpul dan melakukan pawai di Karachi. Oleh karena itu Benazir Bhutto ditahan selama 30 hari, meskipun akhirnya diubah menjadi tahanan rumah yang dijalani Benazir Bhutto di pantai Clifton.

Peristiwa penangkapan terhadap para pimpinan oposisi tersebut, dimanfaatkan Benazir Bhutto untuk membangkitkan emosi massa pendukung oposisi, dengan mengatakan: “Pemerintah Junejo tidak mempunyai arti apa-apa tanpa undang-undang darurat. Penangkapan yang dilakukan pemerintah tidak berdasar. Pemerintah tampaknya dibayangi ketakutannya sendiri menghadapi massa rakyat. Oleh karena itu tindakannya berdasarkan suatu semangat anti rakyat”.

Akibat provokasi dari Benazir Bhutto, jaringan aksi melanda berbagai kota dengan tekanan pada episentrum aksi di wilayah Sind dan Karachi. Diberbagai tempat terjadi konfrontasi antara rakyat melawan aparat keamanan yang tidak jarang menimbulkan korban. Peristiwa ini merupakan gerakan kekerasan pertama sejak dicabutnya undang-undang darurat oleh pemerintahan militer pimpinan Zia ul-Haq (Dhuroruddin Mashad, 1996: 26-27).

Dilihat dari ruang lingkup dan susunannya, perlawanan rakyat nampaknya tidak akan surut kendati pemerintah sampai menggunakan peluru terakhir rejimnya. Seluruh wilayah Pakistan telah menjadi mata rantai jaringan perlawanan politik oposisi, dan telah menjadi suatu gerakan yang menyeluruh dan bersifat nasional. Situasi politik di Pakistan beberapa hari terakhir menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan terjadinya revolusi politik Pakistan (Tajuk Rencana *Kompas*, 19 Agustus 1986).

Benazir Bhutto mengharapkan penahanan dirinya dapat membangkitkan semangat para pendukungnya untuk meneruskan aksi protes secara besar-besaran “Rakyat pasti akan menang sebab pihak penguasa tidak punya penjara cukup untuk menahan seluruh rakyat Pakistan. Ratusan ribu orang telah siap mati demi tercapainya kemenangan yaitu kembalinya hak-hak sipil”. Kenyataannya, harapan Benazir Bhutto tidak pernah terwujud. Kader-kader *Pakistan People’s Party* (PPP) yang oleh Benazir Bhutto disebut “Merpati-merpati Demokrasi” gagal menggalang massa sebanyak yang diharapkan. Banyak kalangan menduga kegagalan terjadi akibat terlalu dininya Benazir

Bhutto melancarkan aksi, serta salah memilih momentum. Tudingan itu terutama datang dari kubu oposisi sendiri yang setelah peristiwa penangkapan menjadi terpecah-pecah (*Tempo*, 15 Agustus 1987).

Berbeda dengan Revolusi kuning di Filipina sebagaimana yang diharapkan oleh Benazir Bhutto, di Pakistan tidak terdapat dua faktor penting untuk mendukung suksesnya usaha Benazir Bhutto melakukan revolusi seperti yang dilakukan Cory Aquino yakni luka akibat kesulitan ekonomi dan terjadinya pemberontakan-pemberontakan internal. Cory Aquino berhasil mengandalkan dukungan kuat dari gereja katolik dan militer (Fidel Ramos dan Enrile) sebaliknya Benazir Bhutto yang tokoh “Sosial Demokrat” dan berpendidikan Barat sekuler justru hampir tidak mungkin bisa diterima kaum ulama dan militer sebagai pemimpin negara. Hal ini disadari oleh Benazir Bhutto sebagaimana tercermin dalam ucapannya: “Dua orang wanita melawan diktator. Saya berharap bisa melakukan hal sama untuk Pakistan. Namun sayangnya saya belum mempunyai seorang Jendral Ramos” (Dhuroruddin Mashad, 1996: 29).

Pada 4 April 1987, bertepatan dengan delapan tahun peringatan kematian Zulfikar Ali Bhutto, Benazir Bhutto kembali memobilisir massa. Sekitar 100.000 orang hadir memadati lapangan dekat makam menuntut pelaksanaan pemilu dan pengunduran pemerintahan Zia ul-Haq. Akibat sikap Benazir Bhutto, situasi di Pakistan menjadi tegang dan huru hara dapat meledak setiap saat.

Esok harinya Benazir Bhutto meninggalkan Pakistan menuju London guna menghindari penahanan. Baru pada 16 Desember 1987 Benazir Bhutto kembali ke Pakistan, bersama rencana perkawinannya dengan Asif anak Ali Zardari. Perkawinan Benazir-Asif, oleh banyak kalangan disebut memberikan keuntungan politis bagi Benazir Bhutto. Ali Zardari adalah seorang pemimpin *Parti Nasional Awami* (kelompok kiri yang menjadi oposan pemerintahan Zia ul-Haq) yang cukup berpengaruh dan kaya. Dengan terjalannya tali keluarga antara keluarga Bhutto dan Asif Ali Zardari maka kekuatan oposisi (Benazir Bhutto) menjadi semakin terintegrasi dan kuat (*Tempo*, 26 November 1988: 72).

## 2. Persatuan Oposisi

P.M. Khan Junejo memberi keterangan pers di bandara Islamabad mengenai keberhasilan kunjungan kerjanya selama sepekan dari RRC, Hongkong, Korea Selatan, dan Filipina pada minggu 29 Mei 1988. Pada hari yang sama Zia ul-Haq mengumumkan pemecatan Khan Junejo dari jabatan Perdana Menteri berikut pembubaran kabinet dan parlemen. Pengumuman disusul dengan pembubaran parlemen daerah diempat propinsi: Sind, Punjab, Baluchistan, dan Nort West Frontier Province (NWFP) (Shahid Javed Burki, 1991: 84).

Pemerintah sipil pimpinan Khan Junejo selama tiga tahun dinilai telah gagal mengamankan program Islamisasi dan menahan laju pelanggaran hukum. Menurut Zia ul-Haq, percobaan pertama bagi pelaksanaan demokrasi di Pakistan telah gagal. Demokrasi di Pakistan memang sudah ada tetapi masih sangat lemah. Partai politik yang ada justru menyebabkan korupsi. Zia ul-Haq menunjukkan bukti-bukti berupa meluasnya kriminalitas dalam masyarakat, kemunduran ekonomi, meningkatnya tindak korupsi serta nepotisme yang telah mencapai puncak selama tiga tahun terakhir (*Kompas*, 1 Oktober 1988: 7).

Bahaya terbesar bagi Pakistan adalah masalah ekonomi. Negara sedang mengalami kebangkrutan: Pakistan kehabisan uang, hutang luar negeri berada pada tingkat tertinggi, penghasilan dari tenaga di luar negeri menurun, dan sistem pengumpulan pajak tidak efisien. Pada pemerintahan Khan Junejo, setiap anggota *National Assembly* menerima dana sekitar US \$ 113-228 ribu tergantung pada ukuran distrik pemilihannya. Suatu badan penyelidikan dibentuk Zia ul-Haq untuk mencari tahu dan menentukan bagaimana dana yang berasal dari perbendaharaan negara dipergunakan bagi pembangunan.

Zia ul-Haq berjanji setelah pembubaran pemerintahan Khan Junejo, akan segera dibentuk pemerintahan yang lebih Islamis sesuai dengan konstitusi. Pembentukan pemerintahan akan diselenggarakan melalui pemilihan umum dalam tempo 90 hari dari pemecatan Khan Junejo. Dalam pemilu pada bulan November 1988, partai-partai politik dijanjikan dapat ambil bagian. Zia ul-Haq mengatakan “Tidak ada hukum darurat perang. Tidak ada keadaan darurat. Konstitusi juga tidak dicabut atau pun ditolak. Juga tidak ada pengekangan terhadap partai-partai politik” (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 32).

Pemecatan Khan Junejo sebenarnya lebih disebabkan oleh pertentangan Khan Junejo-Zia ul-Haq dibanding isu-isu lain seperti yang dituduhkan Zia ul-Haq. Pada waktu Zia ul-Haq menunjuk Khan Junejo menjabat Perdana Menteri tahun 1985, sebenarnya lebih sebagai pamer bahwa Zia ul-Haq beritikad melepaskan undang-undang darurat.

Khan Junejo saat dipilih Zia ul-Haq untuk menjadi Perdana Menteri lebih memperlihatkan figur pekerja keras, politisi setia, politisi sipil tanpa warna, dan tidak mempunyai basis politik (Shahid Javed Burki, 1991: 80). Dalam perkembangannya, Khan Junejo menumbuhkan inisiatif sendiri serta tidak menghendaki hanya sekedar menjadi boneka atau maskot bagi pemerintahan Zia ul-Haq semata. Sikap Khan Junejo melahirkan friksi melawan Zia ul-Haq yang telah mengorbitkan Khan Junejo pada posisi Perdana Menteri. Friksi memuncak terutama disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

Pertama, parlemen telah gagal mewujudkan keamanan dan ketertiban (*law and order*) sehingga sering terjadi instabilitas dalam negeri, seperti terjadinya bentrokan Syiah-Sunni di Gilgit dengan korban lebih dari 100 orang. Mengenai kegagalan dalam menangani kerusuhan tersebut telah diungkapkan para Gubernur dari Sind, Baluchistan, Punjab, *Nort Western Frontier* serta ketua *Pakistan People's Party* (PPP) di Sind, Qoim Ali Shah. Tidak tegasnya sikap Khan Junejo dalam setiap penyelesaian masalah semakin mempertebal ketidakpercayaan Zia ul-Haq pada kepemimpinan Khan Junejo.

Kedua, Khan Junejo berencana memotong budget (anggaran) militer untuk bulan juni 1988 yang ditargetkan sebesar US \$ 644juta. Sikap Khan Junejo tersebut jelas tidak disukai Zia ul-Haq, terutama mengingat tetap adanya ancaman abadi dari musuh bebuyutan Pakistan yakni India. Untuk menghadapi India, Zia ul-Haq cenderung menginginkan agar Pakistan menerapkan strategi *paritas*, kekerasan dihadapi dengan kekerasan, dan pengrusakan dengan pengrusakan. Bagi Zia ul-Haq kekuatan militer Pakistan sangat dibutuhkan karena terlepas dari kepentingan posisi politik, terdapat beberapa alasan lain yaitu:

- a. Partai-partai politik yang saling cekcok dan saling berebut pengaruh dikalangan rakyat. Instabilitas sering terganggu bukan saja karena perselisihan diantara sesama partai tetapi juga karena keterlibatan partai-partai politik Pakistan dengan berbagai pertikaian dengan India sejak negara berdiri tahun 1947.

- b. Posisi geografis Pakistan yang dekat dengan Afganistan, Iran, dan teluk persi yang penuh dengan instabilitas.

Pakistan harus selalu siap dengan kekuatan militer, terutama untuk membela diri jika suatu saat perang Afganistan dan teluk merembet ke Pakistan. Penerapan sikap keras terhadap lawan-lawan politik Pakistan oleh Zia ul-Haq jelas membutuhkan anggaran militer yang besar (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 32).

Ketiga, Zia ul-Haq-Khan Junejo berselisih dalam soal penarikan pasukan Soviet dari Afganistan. Khan Junejo menuntut penarikan pasukan Uni Soviet dengan memberikan kelonggaran beberapa syarat pada Uni Soviet. Zia ul-Haq justru berniat menarik garis keras menuntut mundurnya pasukan Soviet tanpa syarat apapun. Khan Junejo sudah lebih dahulu menempuh langkah-langkah lugas dengan mengundang tokoh-tokoh oposisi Pakistan guna mencari jalan untuk mendekati Najibullah. Melalui kebijakan langkah diplomatis, Khan Junejo bermaksud mencari jalan terbaik untuk segera mengosongkan Pakistan dari sekitar lima juta pengungsi Afganistan yang menjadi beban bagi sosial, ekonomi, dan keamanan Pakistan.

Keempat, meskipun sebulan setelah meledaknya gudang senjata di Islamabad dan Rawalpindi, tanggal 10 April 1988 dengan korban 104 tewas, Khan Junejo membentuk tim pencari fakta namun sebelumnya Khan Junejo telah menyatakan bahwa "Kepala Staf Angkatan Bersenjata (Jend. Akhtar Abd. Rahman) serta Kepala Dinas Rahasia yang baru (Jend. Hamid Gull) sebagai pihak yang harus bertanggung jawab karena telah menempatkan gudang senjata di dekat pemukiman penduduk". Zia ul-Haq tidak suka atas pernyataan Khan Junejo ini terutama setelah terdengar kekecewaan dikalangan militer.

Bersumber dari berbagai kesalahan Khan Junejo, Zia ul-Haq memecat orang yang telah dipromosikannya menjadi Perdana Menteri tersebut. Pemecatan Khan Junejo dan pembubaran parlemen berakibat pada suhu politik Pakistan yang semakin memanas karena munculnya berbagai reaksi dari masyarakat. Pemerintahan sipil Khan Junejo telah tumbuh tidak teratur sementara kekuatan oposisi semakin terintegrasi. Hal ini mempertebal ketidakpercayaan Zia ul-Haq pada kepemimpinan Khan Junejo. Khan Junejo menilai Zia ul-Haq sewenang-wenang serta menuntut Zia ul-Haq menepati janji untuk melaksanakan pemilu dalam tempo 90 hari setelah pemecatan Khan Junejo. Khan



Junejo yakin bahwa partai yang dipimpinnya *Pakistan Muslim League* (PML) akan mampu berkuasa kembali (Dhuroruddin Mashad, 1996: 32-33).

Tokoh oposisi, Mairaj Mohammad Khan (MRD) menuduh Zia ul-Haq semakin menjerumuskan Pakistan ke dalam lubang gelap dengan pemecatan terhadap P.M. Khan Junejo beserta pembubaran Parlemen. Benazir Bhutto dan Ali Zardari (mertua Benazir Bhutto) yang menjadi tokoh *Awami National Party* (ANP) menyambut baik langkah Zia ul-Haq atas Khan Junejo yang dianggap in-kompeten dan korup oleh Benazir Bhutto. Menurut Benazir Bhutto : “Khan Junejo telah gagal menjawab tuntutan untuk menyelenggarakan pemilu segera mungkin. Dan sudah tiba saatnya untuk melaksanakan pemilu yang bebas, jujur dan netral dengan diikuti oleh semua partai politik”. Benazir Bhutto menuntut agar pemilu yang dijanjikan hendaknya diawasi oleh suatu badan pengawasan yang netral dan bukan oleh pemerintahan Zia ul-Haq (*Kompas*, 24 September 1988: 8).

Para pengamat politik Pakistan menilai tindakan Zia ul-Haq atas Khan Junejo sebagai kudeta terhadap konstitusi, suatu langkah ulang atas penggulingan Zulfikar Ali Bhutto pada juni 1977, yang juga dengan janji yang sama yakni menyelenggarakan pemilu dalam tempo 90 hari. Tahun 1985 pemilu baru dilaksanakan dan itupun dengan calon-calon independen yang terlebih dahulu telah mendapat restu dari Zia ul-Haq. Mengingat pada apa yang telah terjadi sebelumnya, maka meskipun Benazir Bhutto menyambut baik pembubaran pemerintahan Khan Junejo, bahkan segera menyatukan seluruh kekuatan oposisi dipihaknya namun Benazir Bhutto tetap tidak yakin pada ketulusan janji Zia ul-Haq.

Semakin hari tumbuh pesimisme atas kemungkinan terselenggaranya pemilu. Oleh karena itu, setelah pemecatan Khan Junejo, persekutuan sembilan partai oposisi yang tergabung dalam *Movement for Restore of Democracy* (MRD) melangsungkan konferensi di Islamabad. Selaku ketua *Movement for Restore of Democracy* (MRD), Benazir Bhutto mengajak Khan Junejo untuk bergabung menentang rejim Zia ul-Haq. Himbuan Benazir Bhutto disambut Khan Junejo disertai sejumlah sekte keagamaan. Meskipun Benazir Bhutto secara terang-terangan mendukung pembubaran pemerintahan Khan Junejo, Khan Junejo menyatakan untuk tidak berkompromi terhadap Zia ul-Haq yang pernah mengorbitkannya ke jabatan Perdana Menteri. Tindakan Khan Junejo

didasarkan atas besarnya pengaruh dan kekuatan politik yang dimiliki oleh Benazir Bhutto (*Tempo*, 27 Agustus 1988).

Sikap Khan Junejo menyulitkan posisi Zia ul-Haq mengingat Khan Junejo adalah ketua *Pakistan Muslim League* (PML), partai yang didirikan Zia ul-Haq untuk mengimbangi kekuatan oposisi. Dalam *Pakistan Muslim League* (PML), Zia ul-Haq tidak kalah populer dibanding Khan Junejo. Seandainya menghendaki, Zia ul-Haq dapat dengan mudah menggantikan posisi Khan Junejo sebagai ketua *Pakistan Muslim League* (PML). Namun langkah tersebut tidak mungkin dilakukan Zia ul-Haq karena menurut konstitusi Pakistan, persyaratannya Zia ul-Haq harus berhenti dari militer. Zia ul-Haq menerapkan dua langkah termungkin untuk menghadapi oposisi dan pembelotan Khan Junejo yakni:

- a. Membentuk opini umum dengan menyebut para politikus oposisi sebagai “ingin menyontek demokrasi model Barat” yang tidak sesuai dengan Islam.
- b. Akan diberlakukan sistem pemilu nonpartai, seperti pemilu tahun 1985. Hal ini berarti semua calon adalah independen dan tidak ada satu partai pun berhak mengklaim kemenangan dalam pemilu. (Dhuroruddin Mashad, 1996: 34-35).

Keputusan Zia ul-Haq akhirnya mengundang gelombang protes. Sebagaimana biasa, Zia ul-Haq tidak menanggapi aksi protes rakyat tersebut. Dengan tegas Zia ul-Haq menyatakan “Tak ada partai politik di Pakistan, yang ada cuma *Pressure Groups* yang mewakili kepentingan-kepentingan tertentu, bukan kepentingan rakyat. Karena itu partai politik tidak layak ikut pemilu” (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 32). Seandainya partai-partai politik akhirnya diperkenankan terlibat dalam pemilu, menurut Zia ul-Haq itu masih dengan syarat harus mendaftarkan diri sebelum pemilu dilaksanakan.

Benazir Bhutto menilai keputusan Zia ul-Haq sebagai inkonstitusional, sehingga mengajukan persoalan tersebut ke meja pengadilan. Keluhan Benazir Bhutto dimenangkan Mahkamah Agung (MA). Sebagai politisi cerdas, Zia ul-Haq tidak kekurangan akal. Terbukti, setelah pengadilan memenangkan kubu Benazir Bhutto, Zia ul-Haq menurunkan kebijakan *Islamic Legal Code* pada tanggal 15 Juni 1988 sebagai hukum tertinggi di Pakistan. Dengan kebijakan ini berarti semua pembuatan hukum di Pakistan selanjutnya baik untuk tingkat federal maupun propinsi harus sesuai dengan *Islamic Legal Code*. Artinya Syariah yang berorientasi pada Al-Qur’an dan Al-Hadits

merupakan sumber dari segala sumber hukum, sebagai norma dasar dan penuntun bagi semua pembuatan kebijakan negara (*Angkatan Bersenjata*, 23 Maret 1989: 4).

Melalui *Islamic Legal Code*, Zia ul-Haq membangun kredibilitasnya sebagai seorang pahlawan Islam sebelum pemilu dilaksanakan. Dengan *Islamic Legal Code*, Zia ul-Haq berupaya mencegah Benazir Bhutto memenangkan pemilu mendatang. Zia ul-Haq segera mengeluarkan perintah kepada Mahkamah Agung agar meninjau kembali semua ketentuan hukum yang berlaku di Pakistan, termasuk yang menyangkut pemilu dan konstitusi untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Sasaran perintah jelas untuk membendung peluang wanita menjadi kepala pemerintahan, kesempatan yang sedang terbuka bagi Benazir Bhutto.

Sesuai dengan interpretasi umumnya ulama Pakistan, bahwa Islam melarang wanita menjadi pemimpin pemerintahan. Jelaslah, berbeda dengan Iran yang dipimpin oleh Khomeini seorang ideologi keagamaan murni, Zia ul-Haq adalah seorang militer sekaligus politikus. Orientasi Islamisasi Zia ul-Haq bukan semata-mata didasarkan pada motif *religious-fundamentalism*, melainkan juga pada segi-segi politis. Anggapan bahwa *Islamic Legal Code* diturunkan hanya untuk mempertahankan kekuasaan didasarkan pada, bahwa keputusan Mahkamah Agung untuk menerapkan syariah tentunya belum akan efektif hanya dalam waktu tiga bulan. Benazir Bhutto diperkirakan akan melahirkan sekitar bulan November atau Desember, atas dasar itu Zia ul-Haq serta merta mengundur pelaksanaan pemilu yang semula dijanjikan 90 hari setelah pemecatan Khan Junejo yaitu pada bulan Agustus menjadi 16 November 1988.

Dengan pengunduran pemilihan umum, Zia ul-Haq berharap akan memperoleh minimal dua keuntungan yaitu:

- a. Benazir Bhutto sedang hamil tua sehingga tidak akan dapat aktif berkampanye pemilu. Hal ini diharapkan akan berpengaruh bagi kemampuan oposisi dalam merebut simpati massa, mengingat Benazir Bhutto adalah tokoh terpopuler dan sangat berwibawa dikalangan rakyat.
- b. Dengan mundurnya pelaksanaan pemilu akan memberi kesempatan pada Zia ul-Haq untuk mengorganisir *Pakistan Muslim League* (PML) kembali yang terpecah menjadi dua faksi menyusul pemecatan Khan Junejo (pimpinan PML) dari kursi Perdana Menteri.

Pada kenyataannya, beberapa sekte dan organisasi keagamaan justru tidak suka pada *Islamic Legal Code* ala Zia ul-Haq, yang dianggap hanya sebagai kosmetik bagi pemerintahan Zia ul-Haq. Artinya, kebijakan *Islamic Legal Code* dipandang hanya dimanfaatkan untuk tujuan politis dan bukan murni motif religius. Para sekte dan organisasi keagamaan menganggap Islamisasi oleh Zia ul-Haq lebih dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian rakyat dari isu pemilu dan atau sekedar untuk memperkokoh posisi Zia ul-Haq sebagai orang nomor satu Pakistan. Akhirnya para pimpinan sekte dan organisasi agama menarik dukungannya atas rejim Zia ul-Haq. Diluar dugaan, *Jamaat Islami* (JI) yang sejak masa Maududi menjadi pendukung utama pemerintah akhirnya meninggalkan Zia ul-Haq bahkan bekerjasama dengan *Pakistan People's Party* (PPP) untuk menentang pemerintahan Zia ul-Haq (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 32).

Zia ul-Haq adalah orang yang taat beragama, sehingga *Jamaat Islami* (JI) mendukung dan menerima keputusan Zia ul-Haq untuk megundur pelaksanaan pemilu yang dijanjikan. *Jamaat Islami* (JI) pada waktu kebijakan *Islamic Legal Code* diturunkan, dipimpin oleh Mian Taufail Mohammad, yang juga seorang Arain dari Julundur dengan latar belakang pribadi yang sama dengan Zia ul-Haq, sehingga jelas kenapa *Jamaat Islami* (JI) mendukung Zia ul-Haq. Ditariknya dukungan *Jamaat Islami* (JI) terhadap pemerintah merupakan kejadian pertama dalam sejarah Pakistan. Setelah Taufail diganti Qozi Hasan sebagai pimpinan, partai *Jamaat Islami* (JI) menjadi bekerjasama dengan *Pakistan People's Party* (PPP) (Shahed Javed Burki, 1991). Mian Taufail sebenarnya pernah mengkritik pemerintah karena kecewa terhadap Islamisasi Zia ul-Haq pada tanggal 25 Juli 1982 di Lahore. Begitu juga tokoh *Jamaat Islami* (JI) lain, Prof. Gafoor Ahmad yang berpengaruh terhadap organisasi mahasiswa militan, *Islami Jamiati Tulaba* juga mengkritik Zia ul-Haq pada tanggal 24 Juli 1982 di Hyderabad. *Jamaat Islami* (JI) berusaha bebas dari tuduhan sebagai partai pendukung pemerintah sebagaimana *Pakistan Muslim League* (PML) pimpinan Pir Pagoro.

Peristiwa penarikan dukungan *Jamaat Islami* (JI) terhadap pemerintah, menjadi pukulan terberat bagi kredibilitas Zia ul-Haq dengan program Islamisasinya. Apalagi setelah kelompok agama tersebut (JI) mempersoalkan beberapa kelemahan Islamisasi ala Zia ul-Haq yang diangkat sebagai salah satu isu sentral yang dikaitkan dengan tuntutan demokratisasi. *Jamaat Islami* (JI) percaya pada sinyalemen yang menyebut pemerintahan

Zia ul-Haq (melalui badan intelejennya, ISI) telah menjalin kerjasama bukan hanya dengan CIA melainkan dengan *Israeli Defence Force* (IDF) yang dalam hal ini diketuai oleh Ben Menashe. Kerjasama tersebut terutama untuk menyalurkan persenjataan ke Mujahiddin Afganistan (khususnya *Hezbi Islami*) dan juga ke Iran. Sebagai seorang militer, politikus, dan tokoh fundamentalis, Zia ul-Haq melihat kerjasama tersebut hanya dimaksudkan untuk kepentingan politis. Mengingat politik itu memang tipu daya, namun kelompok agama terutama *Jamaat Islami* (JI) menentangnya dan lebih tertarik jika perjuangan Islam dilaksanakan secara benar bukan saja dalam tujuan melainkan juga metodenya.

Golongan Syiah sejak awal tidak berminat pada program Islamisasi Zia ul-Haq (yang Sunni). Golongan Syiah menyebut manuver Zia ul-Haq lewat *Islamic Legal Code* sebagai harus bertanggung jawab terhadap penempatan minoritas Sunni pada maistrem berlawanan. Seorang tokoh Syiah Maulana Syed Arif Ai-Husaini menyebut kebijakan Zia ul-Haq tidak lengkap, mendua, dan tidak bisa diterima oleh 18 juta dari 20 juta masyarakat Syiah di Pakistan. Hal ini disebabkan karena Islamisasi Zia ul-Haq lebih ditekankan pada ajaran aliran Sunni.

Gelombang protes terhadap *Islamic Legal Code* juga muncul dari organisasi-organisasi wanita. Sekitar 400 wanita berdemonstrasi di Lahore menentang pelaksanaan kebijakan Zia ul-Haq. *The Women's Action Forum* menyebut ordonansi Hukum Islam itu sebagai tindakan kontroversial, sebagai perubahan reaksioner berbahaya serta akan memberi kesempatan lebih besar pada perceraian dan poligami. *The Women's Action Forum* juga menentang terhadap bobot hukum kesaksian bagi wanita yang hanya separo dari bobot kesaksian kaum pria (*Tempo*, 26 November 1988: 76).

Berbagai kekecewaan rakyat Pakistan yang muncul akhirnya dimanfaatkan Benazir Bhutto untuk menyudutkan posisi Zia ul-Haq. Dengan modal kemampuan orasinya Benazir Bhutto berhasil mengeksploitasi isu Islamisasi dari Zia ul-Haq sebagai upaya mempertahankan kekuasaan belaka. Benazir Bhutto mampu mempengaruhi kaum fundamentalis yang kecewa pada Zia ul-Haq untuk sejenak melupakan perbedaan pandangan guna bersama menentang pemerintahan Zia ul-Haq. Berbekal pada fakta perpecahan Zia ul-Haq-kaum fundamentalis (khususnya JI), Benazir Bhutto berhasil mendiskreditkan pemerintah Zia ul-Haq dimata masyarakat desa. Benazir Bhutto



menyatakan ditariknya dukungan *Jamaat Islami* (JI) terhadap Zia ul-Haq telah membuktikan betapa Islamisasi yang dilaksanakan Zia ul-Haq sebenarnya tidak lebih hanya sebagai upaya mempertahankan kedudukan, dan bukan sebagai idealisme keagamaan.

Penerapan *Islamic Legal Code* pada sektor ekonomi membawa dampak negatif pada kredibilitas Zia ul-Haq. Dengan menerapkan *Islamic Legal Code* pada ekonomi dapat dimaksudkan untuk menghapus sistem bunga serta lebih berpihak pada kalangan miskin (dhu'afa). Dalam hal ini Zia ul-Haq menyatakan:

“Ekonomi negara tidak dapat dicampuradukkan dengan tendensi politik. Namun nampaknya hal ini jelas dilakukan oleh pemerintahan Khan Junejo untuk memenangkan dukungan politik dari orang-orang kaya secara tidak jujur. Orang-orang mendapat bantuan berjuta-juta rupee tetapi tidak dikembalikan lagi untuk kepentingan umum dalam wujud pajak dan wakaf. Oleh karena itu setiap sen dari dana bantuan pemerintah akan ditarik kembali dari tangan mereka. Sehubungan dengan usaha itu pemerintah akan menerapkan perubahan-perubahan revolusioner di Pakistan terhadap hukum-hukum perpajakan, khususnya untuk memperkuat kelemahan yang selama ini dimanfaatkan oleh kalangan penunggak (yang enggan membayar) pajak, yang lebih buruk daripada pembunuh” (*Tempo*, 27 Agustus 1988).

Menurut Zia ul-Haq, prinsip-prinsip Islam menuntut keadilan ekonomi, menentang konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang. Islam memberikan hak kepada penguasa untuk membantu dan meringankan penderitaan kaum miskin dan tidak berdaya, para janda dan orang cacat, dan memberi naungan orang-orang yang tidak punya rumah, serta menjamin pelayanan pada orang-orang sakit. Dalam Islam, menurut Zia ul-Haq, pemerintah adalah patron bagi setiap orang yang tidak punya pelindung.

Meskipun kebijakan *Islamic Legal Code* dibidang ekonomi menarik bagi golongan miskin, namun mengecewakan kelompok pengusaha yang selama ini justru menjadi pendukung setia Zia ul-Haq. Akibatnya para pengusaha memalingkan dukungan dari Zia ul-Haq. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Benazir Bhutto yang berjanji akan mendukung tuntutan kelompok pengusaha agar pemerintah mengendorkan kebijakan perpajakan. Ancaman penjara bagi pengusaha yang tidak mampu melunasi pajak oleh Benazir Bhutto disebut sebagai tidak adil, terutama mengingat kelompok pengusaha telah ikut membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui amal dan proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja.



Pada kondisi suara oposisi yang semakin vokal dan terintegrasi, Benazir Bhutto berupaya memasukkan faktor Amerika Serikat (AS) dalam persoalan Pakistan, dengan cara melancarkan kritik pada Washington. Benazir Bhutto menyebut, kesewenang-wenangan dan tiadanya sistem yang demokratis di Pakistan tidak terlepas dari tanggung jawab pendukung pemerintahan Zia ul-Haq, yakni Amerika Serikat. Karena selama hampir satu dekade, bantuan militer dan ekonomi AS kepada Pakistan guna memperkuat gerilyawan Afganistan melawan rejim Najibullah dukungan Soviet, pada kenyataan sekaligus ikut menopang keamanan kediktatoran Zia ul-Haq dan telah turut mencabut sebagian besar perlindungan fundamental rakyat dalam konstitusi, yang merupakan pelanggaran hak-hak asasi.

Presiden AS, Ronald Reagan pernah menyatakan akan tetap mendukung pemerintah Zia ul-Haq dan tidak akan mengadakan tekanan agar menyelenggarakan pemilu dengan segera, ataupun memulihkan hak-hak asasi manusia selama Pakistan dapat memelihara keamanan dalam negeri pada tingkat yang sekarang. Hampir 10 tahun pemerintahan militer Zia ul-Haq menggunakan isu Afganistan untuk mendapatkan bantuan dari Washington. Sehingga cukup beralasan jika bantuan AS oleh Benazir Bhutto dituduh sebagai sikap mentolerir bagi tumbuhnya *autokrasi* Zia ul-Haq. Untuk itu Benazir Bhutto menuntut pertanggung jawaban AS dan meminta pemerintah Washington ikut bertindak mengatasi krisis konstitusi akibat pemecatan Khan Junejo. AS mengabaikan permintaan Benazir Bhutto dengan mengekspresikan ketidaksukaannya atas kesewenang-wenangan rejim Zia ul-Haq (Dhuroruddin Mashad, 1996: 40-41).

Hasil dari manuver politik Zia ul-Haq ternyata meleset dari yang diharapkan. Kekuatan oposisi justru semakin besar dan terintegrasi. Gelombang protes menjadi semakin berani menuntut pemerintahan yang demokratis. Sejak tahun 1981 oposisi telah cukup terintegrasi dalam wadah tunggal *Movement for Restore of Democracy* (MRD). Namun pamor *Movement for Restore of Democracy* (MRD) semakin terlihat terutama setelah Benazir Bhutto kembali dari pengasingan di London tahun 1986. Setelah Benazir Bhutto menikah dengan Asif anak Ali Zardari, seorang hakim yang juga tokoh oposisi dari *Awami National Party* (ANP), secara politis dan psikologis memperkuat integrasi kelompok oposisi. Kekuatan oposisi mencapai puncak menyusul pemecatan Khan Junejo serta diberlakukannya *Islamic Legal Code*, dengan bergabungnya Khan Junejo dengan

partai PMLnya dan *Jamaat Islami* (JI) pada kubu Benazir Bhutto (*Tempo*, 27 Agustus 1988).

*Islamic Legal Code*, pada akhirnya justru menurunkan kredibilitas Zia ul-Haq. Banyak kelompok yang mulanya mendukung Zia ul-Haq akhirnya berbalik menjadi penentang. Sebaliknya kredibilitas oposisi, semakin mantap dan isu yang dilontarkan semakin menajam. Oposisi memperoleh kesempatan yang tepat untuk menaikkan pamor, sekaligus membenamkan kredibilitas pemerintahan Zia ul-Haq. Manuver politik Zia ul-Haq dihadapkan pada kenyataan pahit, kredibilitas merosot serta dipaksa menghadapi problem baru yang rumit, yakni menghadapi oposisi yang terintegratif dalam pemilu 16 November 1988. Selain problem yang sudah ada sebelumnya yaitu:

- a. Masa transisi di Afganistan yang sedikit banyak akan mempengaruhi *bargaining position* Amerika kepada Pakistan. Apalagi kecenderungan Gorbachev yang bisa diajak kerjasama oleh AS.
- b. Militer India musuh bebuyutan Pakistan.

*Jamaat Islami* (JI) yang awalnya bersekutu dan mendukung Islamisasi akhirnya membelot. *Jamaat Islami* (JI) menganggap isu Islamisasi oleh Zia ul-Haq untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari tuntutan pemilu, serta sekedar untuk memecah belah kekuatan oposisi dengan memberi sedikit keleluasaan pada partai-partai agama. *Jamaat Islami* (JI) yang akhirnya diikuti tokoh terkenal *Pakistan Muslim League* (PML) mantan anggota kabinet Khan Junejo, Yusuf Raza Ghilani bergabung dengan *Pakistan People's Party* (PPP) menentang pemerintahan Zia ul-Haq. Persahabatan JI-PPP di luar dugaan pengamat pemerintahan di Islamabad. Kedua partai tersebut sudah lama menjadi musuh bebuyutan. Tetap berseteru dengan *Pakistan People's Party* (PPP) pada akhirnya diyakini *Jamaat Islami* (JI) tidak menguntungkan karena meskipun *Jamaat Islami* (JI) termasuk partai Islam papan atas, namun anggotanya cuma ribuan orang (Dhuroruddin Mashad, 1990: 37).

Akhirnya Benazir Bhutto mampu menyatukan kekuatan politik di Pakistan di bawah pimpinannya untuk menentang rezim Zia ul-Haq. Terbentuklah persatuan oposisi *Movement for Restore of Democracy* (MRD) di bawah pimpinan Benazir Bhutto.

#### **D. Hambatan Dan Keberhasilan**

### 1. Keretakan Persatuan Oposisi Dan Munculnya Ziaisme

Kematian Zia ul-Haq beserta putra-putra terbaik Pakistan dan ditolaknyaa tuntutan Khan Junejo untuk berkuasa kembali oleh Mahkamah Agung, tidak lantas menjadikan mulus jalan Benazir Bhutto untuk memegang kekuasaan. Memang faktor Zia ul-Haq sudah tidak ada lagi, namun berbagai kendala baru bermunculan, antara lain:

Pertama, guna memantapkan strategi mempertahankan kekuasaan tidak mustahil militer akan memperpanjang masa darurat yang telah diberlakukan sejak kematian Zia ul-Haq. Pejabat Presiden sudah menjanjikan pemilu tepat pada waktunya namun keputusan akhir tetap pada Jenderal–Jenderal senior, mengingat militer memang sangat dominan dalam sejarah politik Pakistan. Militer dapat menentukan apakah Pakistan akan menerapkan demokrasi yang lebih baik atau justru kembali ke bentuk pemerintahan militer (*Kompas*, 15 Oktober 1988).

Kedua, meskipun banyak yang menaruh harapan pada figur Benazir Bhutto, namun sebenarnya tidak sedikit pula yang cemas mempercayakan masa depan Pakistan kepada Benazir Bhutto. Kelompok terakhir menilai bahwa Benazir Bhutto terkatrol ke puncak pimpinan *Pakistan People's Party* (PPP) terutama oleh peristiwa penggantungan ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto. Benazir Bhutto dianggap cenderung tidak realistis dan anti kritik. Benazir Bhutto tidak terlalu suka bila orang–orang membicarakan kelemahan–kelemahan mendiang Zulfikar Ali Bhutto. Bagi Benazir Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto bersih dari dosa. Wajar jika sementara orang tidak begitu tertarik pada figur Benazir Bhutto.

Disebagian anggota *Pakistan People's Party* (PPP) sendiri, ada yang tidak suka pada gaya kepemimpinan Benazir Bhutto yang cenderung memberi teman–temannya berbagai posisi dalam partai yang disebut sebagai otoriter, tidak demokratis, dan kekanak–kanakkan oleh para politisi lainnya. Akibat ketidaksukaan terhadap Benazir Bhutto, Ghulam Mustafa Jatoi bekas seorang menteri dalam kabinet terakhir Zulfikar Ali Bhutto akhirnya keluar dari *Pakistan People's Party* (PPP) dan atau *Movement for Restore of Democracy* (MRD) serta membuat *National People's Party* (NPP) di Lahore pada akhir Agustus 1986 sehingga terjadi perpecahan pada tubuh *Pakistan People's Party* (*Tempo*, 14 Agustus 1987: 49).

Ketiga, Benazir Bhutto tidak mempunyai pendukung kelas menengah, kelompok agama dan militer. Padahal peran ketiga kelompok tersebut selama ini justru sangat menentukan dalam hal kekuasaan di Pakistan. Kelas menengah takut terhadap doktrin *Bhuttoisme* yang selama kampanye selalu diulang-ulang dalam pidato Benazir Bhutto. Kelas menengah (pengusaha) teringat pada pengalaman kelabu ketika Zulfikar Ali Bhutto membongkar kekuasaan militer dan birokrat, mengganti sebagian besar pegawai pemerintah dengan orang-orang kepercayaannya serta menasionalisasikan banyak perusahaan, industri dan bank pada masa pemerintahan Zulfikar Ali Bhutto.

Isu *Bhuttoisme* tidak disukai oleh tokoh-tokoh agama, karena *sosialisme* yang dijadikan dasar *Bhuttoisme* dipandang tidak Islamis. Apalagi latar belakang keluarga Benazir Bhutto cenderung sekuler, serta sikap Benazir Bhutto yang tidak simpatik kepada tokoh-tokoh agama. Benazir Bhutto pernah menyebut para Mullah Pakistan cuma bisa mendekte “apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang”. Sehingga dapat dipahami bila kelompok agama menjadi sedemikian benci kepada Benazir Bhutto (Dhuroruddin Mashad, 1996: 60).

Keempat, oposisi cenderung terpecah belah sebelum turun ke gelanggang pemilu. Semakin menjulangnya nama Benazir Bhutto ternyata justru membuat sekutu-sekutunya di *Movement for Restore of Democracy* (MRD) semakin cemas. Sekutu-sekutu Benazir Bhutto menganggap Benazir Bhutto telah memanfaatkan kepopulerannya dan dominasi *Pakistan People's Party* (PPP) untuk mengangkangi partai-partai politik lainnya lewat *Movement for Restore of Democracy* (MRD). Diperkirakan 70 % suara untuk *Movement for Restore of Democracy* (MRD) memang berasal dari pendukung *Pakistan People's Party* (PPP). Benazir Bhutto selalu menveto semua usul yang dianggap tidak sesuai dengan garis *Pakistan People's Party* (PPP), termasuk rencana mobilisasi massa untuk memojokkan rejim Zia ul-Haq. Benazir Bhutto juga selalu menolak tuntutan partai-partai sekutunya untuk mendapatkan jatah 40 % kursi yang nantinya diraih *Movement for Restore of Democracy* (MRD) dalam pemilu. Akibatnya anggota *Movement for Restore of Democracy* (MRD) yang kecewa keluar dan bergabung dengan *National People's Party* (Mustafa Jatoi) membentuk persekutuan APC (*All Parties Conference*).

Benazir Bhutto berupaya mengeliminir perpecahan baik dalam lingkungan *Pakistan People's Party* (PPP) sendiri maupun dalam *Movement for Restore of Democracy* (MRD). Benazir Bhutto berusaha menghapus kekhawatiran kader-kader *Pakistan People's Party* atas kemungkinan tergesernya jatah kursi kader-kader *Pakistan People's Party* oleh para pendatang baru, yakni para pengusaha dan kaum feodal yang direkrut Benazir Bhutto. Benazir Bhutto berjanji akan tetap mengutamakan orang lama, apalagi mengingat para pendatang baru itu sebenarnya ada yang sekedar mencari aman. Terbukti sebagian dari mereka sebenarnya orang-orang lama bahkan ada yang pernah tampil sebagai kandidat *Pakistan People's Party* (PPP) dalam pemilu 1977 ketika Zulfikar Ali Bhutto berkuasa. Kaum hipokrit ini oleh Benazir Bhutto hanya akan dimanfaatkan guna memobilisir dana dan atau pengaruhnya untuk upaya meraih kekuasaan (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 37).

Hal kelima sekaligus paling dikhawatirkan oleh Benazir Bhutto adalah para pengikut mending Zia ul-Haq dalam *Pakistan Muslim League* (PML) yang diperkirakan akan menjadi saingan terberat *Pakistan People's Party* (PPP) dalam pemilu. Memang *Pakistan Muslim League* (PML) harus bekerja ekstra keras untuk bersaing melawan Benazir Bhutto dan *Pakistan People's Party* (PPP), mengingat *Pakistan Muslim League* (PML) tidak cukup mengakar dalam hati rakyat akibat kelahirannya yang tidak wajar. *Pakistan Muslim League* (PML) didirikan secara mendadak hanya beberapa hari setelah Zia ul-Haq mencabut keadaan darurat tahun 1985. Tujuan didirikannya *Pakistan Muslim League* (PML) adalah agar parlemen yang terpilih dalam pemilu nonpartai mempunyai payung kekuatan sendiri sehingga bisa diandalkan untuk mengimbangi partai-partai oposisi. Apalagi tokoh-tokoh yang tergabung dalam *Pakistan Muslim League* (PML) berasal dari latar belakang politik yang berbeda-beda. Sehingga bukan suatu hal aneh jika partai yang disponsori Zia ul-Haq ini menjadi terpecah belah ke dalam berbagai faksi (*Kompas*, 19 Oktober 1988: 7).

Kondisi partai *Pakistan Muslim League* (PML) yang telah terpecah menjadi dua kubu, tetap dianggap kendala terbesar oleh Benazir Bhutto mengingat *Pakistan Muslim League* (PML) memperoleh dukungan militer. Sejak Khan Junejo dipecat dari jabatannya, Zia ul-Haq secara diam-diam telah memanfaatkan *Pakistan Muslim League* (PML) sebagai tempat penampungan para pensiunan Jenderal, sehingga sangat mungkin



militer akan melindungi kepentingan *Pakistan Muslim League* (PML) dalam pemilu pada bulan November 1988. Sempat muncul sinyalemen bahwa badan intelijen Pakistan (ISI) berencana merancang hasil pemilu dengan maksimal 40 % kursi bagi *Pakistan People's Party* (PPP). Akhirnya militer menjamin bahwa pergantian kepemimpinan akan terlaksana secara damai lewat pemilu tepat pada waktu yang ditentukan (*Kompas*, 15 Oktober 1988).

Benazir Bhutto tetap waspada atas kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi meskipun telah ada jaminan dari pihak militer. Apalagi untuk pelaksanaan pemilu, pemerintah mewajibkan semua pemilih memiliki kartu identitas khusus agar tidak bisa memberikan lebih dari satu suara. Pemerintah bermaksud baik, namun peraturan itu oleh Benazir Bhutto dianggap merugikan *Movement for Restore of Democracy* (MRD) mengingat tiga perempat dari seluruh pemilih adalah buta huruf.

Dalam praktek untuk mengurus kartu pemilu, masyarakat Pakistan yang sebagian besar masih buta huruf mungkin akan mengalami kesulitan. Benazir Bhutto mengajukan protes kepada pemerintah atas keputusan tersebut. Namun sampai pemilu berlangsung, gugatan Benazir Bhutto belum mendapatkan jawaban pasti. Sebenarnya *Provincial Court* telah memutuskan bahwa pemerintah tidak dapat memaksa rakyat untuk menunjukkan kartu identitas dalam pemilu. Namun *Pakistan's Supreme Court* memberlakukan kembali peraturan tersebut (*Tempo*, 26 November 1988: 68-69).

Dalam menyongsong pemilu 16 November 1988, *Liga Muslim Pakistan* (PML) maupun *Pakistan People's Party* (PPP) masing-masing merekrut partai-partai kecil dalam suatu koalisi. *Pakistan Muslim League* (PML) mempunyai 11 partai konservatif sebagai sekutu dalam IDA yang berorientasi untuk meneruskan program program Zia ul-Haq yakni "Ziaisme" (*Kompas*, 19 Oktober 1988: 7). Sedangkan *Pakistan People's Party* (PPP) bersekutu dengan 8 partai kecil dalam *Movement for Restore of Democracy* (MRD) dengan berkiblat pada *Bhuttoisme* (populisme). Dalam koalisi *Movement for Restore of Democracy*, Benazir Bhutto menjanjikan jika *Pakistan People's Party* (PPP) menang, pemerintahan akan berbentuk koalisi dengan menegakkan demokrasi.

## 2. Kemenangan Benazir Bhutto



Kematian Zia ul-Haq, turut mengubur ketakutan orang-orang partai. Partai politik tidak lagi dihantui oleh sistem pemilu non partai seperti yang selama ini diterapkan pemerintahan Zia ul-Haq. Penjabat Presiden telah berjanji akan mematuhi konstitusi dan hal ini akan diberlakukan pada pemilu untuk anggota Parlemen Pusat dan Daerah. Pemilu tanggal 16 November 1988 akan berlangsung atas dasar partai. Mahkamah Agung Pakistan membatalkan keputusan Zia ul-Haq dengan memperbolehkan kandidat dalam pemilu November 1988 di bawah naungan partai. Keputusan ini dikeluarkan setelah adanya protes dari Benazir Bhutto terhadap kebijakan mendiang Zia ul-Haq yang menyatakan bahwa kandidat pemilu harus maju secara individual, tidak boleh berafiliasi dengan partai (*Tempo*, 27 Agustus 1988: 32).

Bagi Benazir Bhutto, kematian Zia ul-Haq telah memberi arti khusus berupa kesempatan untuk merebut kursi kekuasaan yang sebelumnya pernah diduduki mendiang Zulfikar Ali Bhutto. Benazir Bhutto menyatakan partai oposisinya dapat menang jika pemilu pada bulan November 1988 dilaksanakan secara jujur. Benazir Bhutto menghimbau para politisi agar menghindari bentrokan dengan militer. Peluang Benazir Bhutto untuk menduduki kursi Perdana Menteri semakin terbuka setelah Mahkamah Agung menolak tuntutan Khan Junejo untuk kembali menjadi Perdana Menteri karena beranggapan bahwa pemecatan dirinya oleh almarhum Zia ul-Haq sebenarnya tidak sah (Dhuroruddin Mashad, 1996: 59).

Setelah Zia ul-Haq meninggal, Khan Junejo mengajukan petisi kepada pengadilan tinggi Lahore bahwa pembubaran pemerintahannya oleh Zia ul-Haq pada tanggal 29 Mei 1988 adalah tidak sah. Pengadilan tinggi Lahore yang sebagian besar anggota parlemen yang merupakan pendukung faksi Khan Junejo dalam partai *Liga Muslim Pakistan* menerima petisi dan disusul dengan kampanye untuk memanggil kembali seluruh anggota Majelis Nasional yang sudah dibubarkan. Ghulam Ishaq Khan sebagai pengikut Zia ul-Haq, secara terang-terangan menolak keputusan pengadilan tinggi Lahore. Akhirnya setelah ditangani oleh Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, yang dimonopoli oleh para pengikut setia Zia ul-Haq, diputuskan bahwa keputusan Zia ul-Haq adalah sah (*Kompas*, 1 Oktober 1988: 1).

Berbagai hambatan telah mengganjal untuk meraih kekuasaan, tetapi keburuntungan ternyata tetap berpihak pada Benazir Bhutto. Terbukti Benazir Bhutto

akhirnya meraih kemenangan gemilang dalam pemilu 16 November 1988, dengan meraih 92 kursi dari total 205 kursi yang diperebutkan (Shahid Javed Burki, 1991: 97). Benazir Bhutto pribadi berhasil mengumpulkan tiga kursi sekaligus di Distrik Larkana, Lahore dan Karachi. Hal ini memang absah karena konstitusi Pakistan tidak melarang seorang calon maju di beberapa daerah pemilihan sekaligus. Sementara itu, lawan utamanya yang tergabung dalam *Islamic Democratic Alliance (IDA) / Ittehad Jomhoori Islami (IJI)* mengumpulkan 54 kursi.

Partai oposisi Pakistan pimpinan Benazir Bhutto muncul dari pemilu dengan suara terbesar dalam parlemen. Benazir Bhutto berada dalam posisi kuat untuk menjadi pimpinan negara, yang baru pertama kali (lebih dari satu dekade) pemerintahan diangkat secara demokratis. Benazir Bhutto akhirnya membuktikan keunggulan kembali dalam pemilihan Majelis Propinsi dimana seluruhnya, Benazir Bhutto memperoleh 184 kursi sedangkan *Islamic Democratic Alliance (IDA)* memperoleh 145 kursi dan sisanya untuk partai-partai kecil (Shahid Javed Burki, 1991: 97). *Pakistan People's Party (PPP)* menang mutlak di propinsi Sind, sedangkan *Islamic Democratic Alliance (IDA)* menang tipis di propinsi Punjab. Sisanya terbagi diantara delapan partai kecil lainnya serta 30 politisi independen. Tokoh IDA / IJI yang berhasil hanya Nawaz Sharif, pengikut fanatik mendiang Zia ul-Haq sekaligus Menteri Besar dari Punjab. Tokoh-tokoh lainnya termasuk Khan Junejo dan Mustafa Jatoi gagal mendapatkan kemenangan (*Tempo*, 26 November 1988: 67-68).

Ada beberapa faktor penting yang cukup mendukung kemenangan Benazir Bhutto dan atau *Pakistan People's Party (PPP)* ini antara lain:

Pertama, rakyat nampaknya telah bosan menyaksikan gaya pemerintahan Zia ul-Haq yang cenderung represif. Betapa jujurnya pribadi Zia ul-Haq, penancangan Islamisasi dianggap tidak akan mampu merubah keadaan, termasuk menurunkan jumlah korupsi serta untuk merubah gaya hidup mewah orang-orang dekat Zia ul-Haq. Hal ini semakin menumbuhkan ketidaksukaan kaum Syiah dan pengikut partai yang tergabung dalam *All Parties Conference (APC)* yang memang tidak suka pada Islamisasi, terutama ketika negara mengatur soal zakat.

*Jamaat Islami (JI)* yang mulanya bersekutu dan atau mendukung Islamisasi akhirnya juga membelot. *Jamaat Islami (JI)* menganggap isu Islamisasi oleh Zia ul-Haq

hanya dipakai untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari tuntutan pemilu, serta sekedar untuk memecah belah kekuatan oposisi dengan memberi sedikit keleluasaan pada partai-partai agama. Akibatnya *Jamaat Islami* (JI) yang akhirnya diikuti tokoh terkenal *Pakistan Muslim League* (PML) mantan anggota kabinet Khan Junejo, Yusuf Raza Ghilani bergabung dengan *Pakistan People's Party* (PPP) menentang pemerintahan Zia ul-Haq. Persahabatan JI-PPP ini jelas diluar dugaan pengamat Islamabad. Karena kedua partai itu sudah lama menjadi musuh bebuyutan. Tetap berseteru dengan *Pakistan People's Party* (PPP) memang tidak menguntungkan bagi *Jamaat Islami* (JI) karena meskipun *Jamaat Islami* (JI) termasuk partai Islam papan atas, namun anggotanya cuma ribuan orang (Dhurotuddin Mashad, 1996: 64).

Kedua, IDA / IJI terpecah ke dalam faksi Khan Junejo dan faksi Nawaz Sharif yang sama-sama berambisi merebut kursi Perdana Menteri. Khan Junejo tetap belum bisa menerima kenyataan atas pemecatannya sebagai Perdana Menteri sedangkan Nawaz Sharif justru mendukung Zia ul-Haq mentor politiknya. Terbukti selama berkampanye Nawaz Sharif selalu menampilkan diri sebagai penerus cita-cita Zia ul-Haq "Ziaisme". Akibat pertentangan ini penampilan *Islamic Democratic Alliance* (IDA) menjadi tidak mengesankan sebagai satu kekuatan yang utuh (*Tempo*, 26 November 1988: 70).

Ketiga, Benazir Bhutto berhasil meredam isu yang menuduh *Pakistan People's Party* (PPP) sebagai penebar sekulerisme dan atau kolaborator musuh (Soviet dan India). Dengan keahlian orasinya Benazir Bhutto berhasil meyakinkan rakyat bahwa *Pakistan People's Party* (PPP), sebagaimana *Islamic Democratic Alliance* (IDA) akan meneruskan Islamisasi dan kebijakan luar negeri pemerintah sebelumnya meskipun dengan isi dan cara berbeda. Pakistan akan menjalin hubungan erat dengan Soviet hanya bila unsur-unsur pasukan Soviet telah ditarik dari Afganistan, dan rakyat Afganistan bebas membentuk pemerintahannya sendiri.

Dalam soal India, Benazir Bhutto cukup cerdas untuk tidak menyinggungnya mengingat besarnya resiko yang bakal muncul, akibat India masih menguasai tanah Kasmir yang selama ini diklaim sebagai wilayah Pakistan. Apalagi kaum Muhajir Muslim India yang mengungsi ke Pakistan pada pemisahan India-Pakistan 1947, kedudukannya kuat dalam spektrum politik Pakistan. Dalam pemilu November 1988, kaum Muhajir Muslim India mampu meraih 13 kursi yang berarti menduduki peringkat

ketiga setelah *Pakistan People's Party* (PPP) dan *Islamic Democratic Alliance* (IDA). Dengan tidak menyentuh isu India, Benazir Bhutto berhasil terhindar dari rasa ketidaksukaan kaum Muhajir.

Benazir Bhutto berhasil menghalau serangan bahwa *Pakistan People's Party* (PPP) yang berpaham sosialis dan atau *Bhuttoisme* akan mempraktekkan pengambilalihan industri-industri hulu seperti pernah dilakukan mendiang Zulfikar Ali Bhutto. Benazir Bhutto memberi prioritas pencalonan para jutawan dan bangsawan (terutama berasal dari Punjab) dalam pemilu. Punjab adalah propinsi yang paling menentukan dalam setiap pemilu. Dalam pemilu November 1988, Punjab mendapat jatah 115 kursi parlemen (lebih dari separo kursi yang diperebutkan) sesuai dengan prosentase penduduk yang bermukim di Punjab. Benazir Bhutto menyatakan pesan-pesan *Pakistan People's Party* (PPP) telah didasarkan pada keadilan sosial-ekonomi sehingga wanita, kaum minoritas dan kelas pekerja telah berpaling kepada *Pakistan People's Party* (PPP).

Benazir Bhutto mencoba menjembatani *traditional constituents* dan kelas menengah. Model kapitalisme barat adalah kunci untuk membangun Pakistan. Benazir Bhutto mengatakan *Pakistan People's Party* (PPP) akan bekerja untuk menarik investasi asing dan berjanji menghapus nasionalisasi. Langkah ini cukup ampuh mengeliminir kekhawatiran para pengusaha atas kemungkinan pengambilalihan bisnis oleh pemerintah. *Pakistan People's Party* (PPP) berhasil merekrut kaum feodal (tuan tanah) Punjab secara mengagumkan. Dukungan mereka jelas sangat menguntungkan bukan saja dapat membantu keuangan *Pakistan People's Party* (PPP) melainkan juga dalam merekrut pendukung, mengingat pengaruh kaum feodal memang besar.

Bagi kaum feodal, daya tarik *Pakistan People's Party* (PPP) nampaknya lebih banyak terkait dengan soal pajak. Benazir Bhutto pernah berjanji mendukung tuntutan kaum feodal agar pemerintah mengendurkan kebijakan perpajakan. Dan memang Benazir Bhutto pernah melontarkan kritik bahwa penjara bagi yang tidak mampu melunasi pajak adalah kebijakan tidak adil, mengingat mereka sudah banyak membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat lewat proyek-proyek yang menyerap tenaga kerja (*Tempo*, 26 November 1988: 70-72).

Keempat, *Pakistan People's Party* (PPP) berhasil mengeksploitasi nama besar mendiang Ali Bhutto untuk merebut simpati rakyat dengan selalu mengangkat peristiwa

penggantungan Zulfikar Ali Bhutto oleh rejim Zia ul-Haq. *Pakistan People's Party* (PPP) mengibaratkan Zia ul-Haq sebagai pembunuh demokrasi dan sumber ketidakadilan. Sebaliknya keluarga Bhutto disebut sebagai penegak demokrasi. Berdasar isu tersebut, maka gambar panah yang dipakai simbol *Pakistan People's Party* (PPP) pada kertas suara dijadikan sumber tema yang paling disukai oleh para juru kampanye *Pakistan People's Party* (PPP), untuk memilih panah yang langsung mengarah pada jantung ketidakadilan.

Isu-isu yang dilontarkan Benazir Bhutto berhasil menarik simpati massa. Hanya golongan tertentu (seperti militer dan birokrat) yang tidak tertarik dengan kampanye Benazir Bhutto akibat mereka selalu ingat bahwa Zulfikar Ali Bhutto sebenarnya juga seorang tiran yang sangat keras menghancurkan lawan-lawan politiknya. Sedangkan bagi berjuta-juta rakyat miskin Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto justru dianggap penyelamat yang ingin mengarahkan dan memimpin mereka keluar dari kemiskinan dan penindasan. Nama besar Zulfikar Ali Bhutto memang tidak dapat diabaikan. Terbukti para pendukung *Pakistan People's Party* (PPP) selalu mengarak poster Zulfikar Ali Bhutto dalam setiap kampanye. Benazir Bhutto menyebut politiknya sebagai *Bhuttoisme* untuk meneruskan ide Zulfikar Ali Bhutto, maka wajar jika setiap kali Benazir Bhutto berpidato mengucapkan ide baru maupun ide basi, massa selalu menyambut dengan antusias (*Tempo*, 26 November 1988: 70).

Kelima, oleh sementara pendukungnya Benazir Bhutto memang patut didukung, karena gambaran Benazir Bhutto sebagai matang karbit terkatrol dari nama besar mendiang ayahnya Zulfikar Ali Bhutto tidak sepenuhnya benar. Bagi *Pakistan People's Party* (PPP) Benazir Bhutto adalah sosok wanita yang berpengalaman politik (termasuk penderitaan di dalam penjara) dan juga kaya ilmu (seperti: politik, hubungan internasional, ekonomi maupun filsafat). Sehingga cukup alasan bila rakyat percaya bahwa Benazir Bhutto telah tertempa menjadi politisi wanita tangguh, sabar, ulet, serta cerdas dalam membuat keputusan politis (Dhuroruddin Mashad, 1996: 67).

Benazir Bhutto pernah mengecoh Zia ul-Haq ketika mengumumkan bahwa puteranya akan lahir antara Desember 1988-Januari 1989. Diduga akibat pengumuman Benazir Bhutto tersebut, Zia ul-Haq menunda pelaksanaan pemilu (dari Agustus 1988 menjadi November 1988) dengan harapan agar Benazir Bhutto tidak terlalu aktif terlibat



kampanye karena hamil tua. Tanpa Benazir Bhutto hampir dapat dipastikan kursi mayoritas yang diincar *Pakistan People's Party* (PPP) tidak bakal kesampaian, meskipun calon yang diajukan mencapai 5000 nama. Kenyataannya anak Benazir Bhutto (yang diberi nama Bilawal) lahir 21 September 1988. Atas kejadian ini Benazir Bhutto melontarkan ledakan: "Kami berhasil mengecohnya (Zia ul-Haq), bayiku lahir lebih awal dan aku ikut kampanye" (*Kompas*, 22 September 1988: 1).

Keenam, Benazir Bhutto berhasil mengeliminir perpecahan baik dalam lingkungan *Pakistan People's Party* (PPP) sendiri maupun dalam *Movement for Restore of Democracy* MRD. Benazir Bhutto mampu menghapus kekhawatiran kader-kader *Pakistan People's Party* (PPP) atas kemungkinan tergesernya jatah kursi kader-kader *Pakistan People's Party* (PPP) oleh para pendatang baru, yakni para pengusaha dan kaum feodal yang direkrut Benazir Bhutto. Benazir Bhutto berjanji akan tetap mengutamakan orang lama, apalagi mengingat para pendatang baru itu sebenarnya ada yang sekedar mencari aman. Terbukti sebagian dari mereka sebenarnya orang-orang lama bahkan ada yang pernah tampil sebagai kandidat *Pakistan People's Party* (PPP) dalam pemilu 1977 ketika Zulfikar Ali Bhutto berkuasa. Kaum hipokrit ini oleh Benazir Bhutto hanya akan dimanfaatkan guna memobilisir dana dan atau pengaruhnya untuk upaya meraih kekuasaan.

Sementara di lingkungan *Movement for Restore of Democracy* (MRD) Benazir Bhutto berhasil memberi argumen rasional. Penolakan usulan *Movement for Restore of Democracy* (MRD) untuk memobilisir massa menentang Zia ul-Haq terpaksa diambil, terutama demi mencegah terjadinya bentrokan melawan aparat keamanan. Bentrokan dengan aparat, akan memancing amarah penguasa serta berakibat pada penundaan pemilu atau bahkan pemberlakuan UU Darurat. Sedangkan penolakan terhadap tuntutan *Movement for Restore of Democracy* (MRD) agar 40 % kursi hasil pemilu hendaknya diberikan kepada sekutu non PPP terutama didasarkan pada pertimbangan agar *Pakistan People's Party* (PPP) tidak kehilangan kursi mayoritas di parlemen. Apalagi mengingat 70 % pendukung *Movement for Restore of Democracy* (MRD) memang berasal dari *Pakistan People's Party* (PPP), sehingga tuntutan semacam itu memang tidak realistis (Dhuroruddin Mashad, 1996: 68).



Ketujuh, mayoritas wanita cenderung optimis bahwa Benazir Bhutto akan membebaskan wanita dari belenggu dominasi pria. Seorang aktifis wanita, Shamin Kazmi menyebut Benazir Bhutto sebagai tokoh yang menunjukkan bahwa wanita dapat keluar dari dinding rumah. Kepercayaan kaum wanita tersebut, cukup membantu mengeliminir isu yang bermaksud menghalangi wanita menjadi pemimpin. Benazir Bhutto selalu melontarkan pendapat tentang tiadanya ayat Al-Qur'an yang secara pasti melarang wanita menjadi pimpinan pemerintahan. Justru sebaliknya, ayat Al-Qur'an ada menggambarkan keberhasilan Ratu Bilkis (semasa nabi Sulaiman) yang berhasil memimpin negara Saba' secara arif, adil dan bijaksana (Fatima Mernissi, 1994). Menurut Benazir:

Pria dan wanita dihadapan Tuhan punya kedudukan sama. Saya bangga menjadi wanita Islam. Isu (dalam pemerintahan Pakistan) bukanlah lelaki melawan wanita, tetapi diktator melawan demokrasi. Adalah interpretasi salah dari kaum pria atas ajaran Islam, dan bukan ajaran itu sendiri yang membatasi kesempatan kaum wanita untuk memerintah. Sejarah Islam sebenarnya penuh dengan para wanita yang memainkan peran penting dalam masyarakat serta memerintah dengan kecakapan yang tidak kalah dibanding pria.

Dalam sejarah tercatat adanya sejumlah penguasa dalam pemerintahan Islam diberbagai tempat di dunia. Masa Turki Usmani tercatat "150 tahun pemerintahan wanita". Di Mesir selama dinasti Fatimiyah, abad 10 dikenal dua pemerintahan wanita yaitu Ratu Asma dan Arwa. Di India juga pernah ada penguasa wanita yaitu Razia Sultana (Moghul abad 13) dan Ratu Chad Bibi (di sebuah kesultanan kecil) pra kemerdekaan (*Tempo*, 26 November 1988). Selain itu rakyat Pakistan awam agama juga menjadi bingung karena Maududi pernah mendukung Fatimah Jinnah bersaing melawan Ayub Khan pada tahun 1960. Argumentasi demikian ternyata cukup ampuh mempengaruhi rakyat termasuk khususnya kaum wanita untuk menerimanya menjadi pemimpin mereka.

Pemilu 16 November 1988 telah memberi bukti bahwa rakyat akhirnya lebih percaya dipimpin Benazir Bhutto dibanding tokoh politik lainnya. Fakta ini belum menjamin Benazir Bhutto dapat menduduki kursi Perdana Menteri. Masih sangat disangsikan apakah Penjabat Presiden Ghulam Ishaq Khan akan rela memberikan kursi Perdana Menteri kepada Benazir Bhutto. Selama kampanye Benazir Bhutto berjanji untuk menyingkirkan para pengikut mendiang Zia ul-Haq, padahal Ishaq Khan adalah pendukung mendiang Zia ul-Haq yang justru sedang menjabat Presiden, suatu posisi

sentral yang oleh konstitusi Pakistan diberi hak penuh untuk mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri dan bahkan termasuk membubarkan Parlemen hasil pemilu.

Ghulam Ishaq Khan harus berunding dahulu dengan militer agar tidak salah ambil keputusan. Para Jenderal tidak mau melihat demokrasi justru akan mengacaukan stabilitas Pakistan. Militer menghendaki konsensi dari Benazir Bhutto, sebelum Benazir Bhutto diangkat menjadi Perdana Menteri. Peraturan konstitusi Pakistan, bahwa seorang calon kepala pemerintahan harus mendapat suara mayoritas mutlak dalam parlemen. Sesuai undang-undang yang berlaku, Benazir Bhutto harus mampu membentuk pemerintahan dengan memenangkan mosi kepercayaan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah Ishaq Khan menunjuk dirinya sebagai Perdana Menteri.

*Pakistan People's Party* (PPP) memperoleh suara terbanyak, namun masih membutuhkan 17 kursi lagi untuk dapat membentuk pemerintahan. Mengumpulkan tambahan pendukung sebesar itu tidaklah mudah. Untuk itu Benazir Bhutto mengadakan pembicaraan dengan *Muhajirin National Movement* untuk membentuk pemerintahan koalisi. Perlu diketahui bahwa badan pembuat undang-undang selengkapnyanya terdiri dari 237 kursi: 207 untuk muslim, 10 untuk non muslim dan 20 khusus disediakan untuk kaum wanita. Majelislah yang akan memilih para wakil dari golongan wanita. *Pakistan People's Party* (PPP) harus memperoleh tambahan suara 26 lagi untuk mayoritas tunggal (kalau cuma mayoritas mutlak suara muslim tinggal 17 kursi lagi) sedangkan kelompok Nawaz Sharif perlu mendapatkan dukungan tambahan 64 suara lagi (M. Riza Sihbudi, M. Hamdan Basyar dan Happy Bone Zulkarnaen, 1993: 196-197).

Sementara Benazir Bhutto belum mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan, *Islamic Democratic Alliance* (IDA) telah mengancam untuk berusaha dengan cara apapun agar seorang wanita seperti Benazir Bhutto tidak menjadi pemimpin Pakistan. Terbukti selama beberapa hari, pimpinan IDA Mian Nawaz Sharif melakukan perjalanan ke berbagai tempat termasuk mengadakan perundingan dengan para pejabat militer dan Presiden di Islamabad agar memperoleh dukungan partai-partai lainnya guna membentuk koalisi mayoritas. Langkah Nawaz Sharif sempat mencemaskan Benazir Bhutto, mengingat terdapat indikasi kuat bahwa kemenangan Nawaz Sharif di Punjab

akan memberinya pengaruh lebih besar untuk menekan partai-partai lain agar bergabung dengan Nawaz Sharif.

Punjab merupakan propinsi terbesar di Pakistan dengan jumlah anggota parlemen terbesar. Kekuasaan pemerintahan propinsi acap kali dapat mengganggu kelancaran kebijakan pemerintah pusat jika terdapat ketidaksesuaian. Benazir Bhutto menuduh lawan-lawan politiknya menyuap dan mengintimidasi legislator untuk mencegah dirinya menjadi Perdana Menteri. Benazir Bhutto mengatakan, tindakan Ghulam Ishaq Khan menunda-nunda mengangkat dirinya menjadi Perdana Menteri adalah tidak konstitusional dan menyebabkan instabilitas di Negara Pakistan yang sedang mencoba demokrasi.

Dewi keberuntungan berpihak pada Benazir Bhutto. Betapapun kerasnya perjuangan Nawaz Sharif untuk menjegal Benazir Bhutto, ternyata tidak membawa hasil memuaskan. Pada 1 Desember 1988 Benazir Bhutto mampu berlega hati tatkala secara resmi memperoleh mosi kepercayaan dari Majelis Nasional dengan memperoleh dukungan 148 suara, berbanding 55 suara untuk *Islamic Democratic Alliance* (IDA). Mayoritas *Pakistan People's Party* (PPP) semakin mutlak, setelah *Pakistan People's Party* (PPP) memenangkan sebagian besar dukungan dari ke-20 kursi yang disediakan bagi kaum wanita yang dipilih oleh para deput yang telah terpilih langsung serta beberapa partai kecil dan kelompok independen (Dhuroruddin Mashad, 1996: 71).

Benazir Bhutto akhirnya mengukir sejarah baru dengan menjadi Perdana Menteri wanita pertama disebuah Negara Islam pada abad modern. Wajah Negara Pakistan seolah-olah berubah dalam waktu semalam saja. Hukum Darurat Militer pemerintahan militer semu selama 11 tahun terakhir digantikan oleh demokrasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Benazir Bhutto adalah putri P.M Zulfikar Ali Bhutto, lahir pada tanggal 21 Juni 1953, di Larkana, Sind, Pakistan bagian Selatan. Benazir Bhutto dipersiapkan Zulfikar Ali Bhutto untuk terjun ke dunia politik. Benazir Bhutto dikirim ke *Radcliffe College (Harvard University)* untuk mempelajari ilmu Politik, Ekonomi, Filsafat dan lulus dengan predikat *Cum Laude*. Kemudian melanjutkan kuliah ke *Oxford University*, untuk mempelajari ilmu Hubungan Internasional. Benazir Bhutto dikenal sebagai orator ulung dengan menjadi ketua forum perdebatan *Oxford (Oxford Union)*.

Tahun 1977 terjadi kudeta oleh Jend. Zia ul-Haq terhadap P.M Zulfikar Ali Bhutto yang berujung pada kematian Zulfikar Ali Bhutto di tiang gantungan. Kematian Zulfikar Ali Bhutto, dijadikan fundamen bagi titik balik (*turning point*) kehidupan Benazir Bhutto untuk mulai terjun dalam dunia politik, dengan meneruskan cita-cita politik Zulfikar Ali Bhutto "*Bhuttoisme*". Paham *Bhuttoisme* gabungan dari Demokrasi, Sosialisme dan Islam, untuk mengarahkan, memimpin dan menolong kaum miskin keluar dari kemiskinan dan penindasan. Benazir Bhutto menjadi lambang demokrasi Pakistan, karena usahanya memperjuangkan hak-hak sipil dan partai-partai politik dalam pemilihan umum. Langkah politis Benazir Bhutto berpegang pada komitmen untuk menghindari cara-cara kekerasan.

Pemerintahan Zia ul-Haq didasarkan pada undang-undang darurat militer dan menerapkan Islamic Orde yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Melalui referendum nasional, Zia ul-Haq mendapat legitimasi rakyat untuk memimpin Pakistan sampai tahun 1990. Pada Maret 1985 Zia ul-Haq membentuk pemerintahan sipil, dengan Mohammad Khan Junejo sebagai Perdana Menteri. Dewan Keamanan Nasional pimpinan Zia ul-Haq memegang hak penuh menunjuk serta memecat Perdana Menteri, para Menteri dan Gubernur serta membubarkan Dewan Nasional dan Dewan Propinsi. Masa Zia ul-Haq, banyak politisi dijebloskan dalam penjara oleh pengadilan-pengadilan hukum darurat militer. Terjadi pembelengguan terhadap media massa, dan organisasi-organisasi. Konflik antar etnis dan aliran agama sering terjadi dengan banyak memakan korban karena kemudahan mendapatkan senjata yang berasal dari medan perang Afganistan.

Rabu 17 Agustus 1988, Jend. Zia ul-Haq tewas bersama 20 tokoh utama militer Pakistan, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Pakistan, Arnold Raphel dan penasihat militer AS untuk Pakistan sekaligus penanggung jawab penyaluran bantuan senjata untuk Mujahiddin Afganistan, Brigjend. Herbert Wassom karena pesawat yang ditumpanginya meledak. Hasil penyelidikan ahli Pakistan dan AS memastikan ledakan pesawat merupakan ulah sabotase. Undang-undang darurat diterapkan untuk menjaga kemungkinan meledaknya dendam para penentang Zia ul-Haq. Kematian Zia ul-Haq bersama 20 orang dekatnya telah membawa kekosongan kekuasaan di Pakistan, yang membuka peluang bagi Benazir Bhutto untuk masuk gerbang kekuasaan.

Pada 10 April 1986, Benazir Bhutto menjawab kerinduan massa yang menyambut kedatangannya dari Inggris. Penyambutan segera menjadi aksi unjuk rasa anti pemerintah. Inilah aksi protes terbesar pertama sejak tahun 1977. Benazir Bhutto berkeliling ke 15 kota guna menggalang kekuatan massa. Bagi pendukungnya, Benazir Bhutto tidak lagi dipandang sebagai individu tersendiri tetapi telah diidentikkan dengan Zulfikar Ali Bhutto. Benazir Bhutto merancang suatu protes terbesar pada tanggal 14 Agustus 1986 yang bertepatan dengan hari kemerdekaan Pakistan. Rencana ini berakibat pada ditangkapnya Benazir Bhutto. Penangkapan tersebut dimanfaatkan Benazir Bhutto untuk membangkitkan emosi massa. Akibat provokasi dari Benazir Bhutto, jaringan aksi

melanda berbagai kota, sehingga terjadi konfrontasi antara rakyat melawan aparat keamanan yang banyak menimbulkan korban.

Pada 29 Maret 1988, Zia ul-Haq memecat P.M. Khan Junejo karena dianggap korup dan in-kompeten. Pemecatan Khan Junejo berakibat pada bersatunya Khan Junejo pada kubu Benazir Bhutto. Zia ul-Haq menurunkan kebijakan *Islamic Legal Code* untuk menaikkan kembali kredibilitasnya dimata rakyat. Kebijakan baru ini akhirnya justru menimbulkan ketidaksenangan dari berbagai pihak yakni kaum fundamentalis terutama *Jamaat Islami (JI)*, para pengusaha, elit feodal dan golongan wanita. Kekecewaan yang muncul dari berbagai kalangan ini dimanfaatkan Benazir Bhutto untuk semakin memperkuat diri dan mempengaruhi berbagai kalangan tersebut bergabung dengan pihak oposisi pimpinan Benazir Bhutto. Terbentuklah persatuan oposisi di bawah pimpinan Benazir Bhutto.

Kematian Zia ul-Haq pada bulan Agustus 1988 tidak begitu saja mempermudah jalan Benazir Bhutto untuk memegang kekuasaan di Pakistan. Muncul beberapa masalah diantaranya masalah internal oposisi, yakni terjadinya keretakan akibat kecemburuan atas sikap Benazir Bhutto yang menggalang kekuatan baru masuk dalam persatuan oposisi sehingga muncul kekhawatiran bahwa orang-orang lama akan tersingkir. Juga muncul pesaing baru yakni para pendukung setia Zia ul-Haq yang tergabung dalam IDA, IJI, dan PML yang menyatakan meneruskan perjuangan politik Zia ul-Haq “Ziaisme” di bawah pimpinan Nawaz Sharif.

Persatuan oposisi akhirnya mampu mengantarkan Benazir Bhutto memenangkan pemilu pada bulan November 1988. Perjuangan Nawaz Sharif dengan *Ziaismenya* gagal menghadang Benazir Bhutto untuk memegang kekuasaan di Pakistan. Pada 1 Desember 1988 Benazir Bhutto secara resmi memperoleh mosi kepercayaan dari Majelis Nasional untuk menduduki kursi Perdana Menteri.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, muncul implikasi bahwa untuk dapat masuk dalam birokrasi pemerintahan dan memegang kekuasaan tertinggi negara dibutuhkan suatu latar belakang politik baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu juga harus mampu menggalang kekuatan massa dengan daya dukung yang luas serta



loyalitas tinggi. Dan yang paling penting mempunyai suatu isu sentral yang diperjuangkan yang juga merupakan hal diinginkan rakyat atau berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam usaha menduduki kursi Perdana Menteri, Benazir Bhutto mempunyai latar belakang pendidikan Politik, Filsafat, Ekonomi dan Hubungan Internasional yang mendukung dalam kegiatan politik praktis. Benazir Bhutto telah mantap dalam dunia politik secara praktis dengan pengalaman menjadi oposan bagi pemerintahan Zia ul-Haq selama 11 tahun. Massa pendukung yang dimiliki oleh Benazir Bhutto meluas mulai dari pengusaha, elit feodal, politikus hingga kalangan bawah yang kesemuanya loyal terhadap perjuangan Benazir Bhutto dalam usahanya menduduki kursi Perdana Menteri. Perjuangan Benazir Bhutto menekankan pada pelaksanaan demokrasi dan paham *Bhuttoisme*, dimana keduanya merupakan perjuangan yang berpihak dan mengutamakan kepentingan rakyat Pakistan.

Penelitian mengenai politik Benazir Bhutto dalam percaturan politik di Pakistan dapat dipergunakan mahasiswa sebagai acuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai perkembangan politik di kawasan Asia Selatan khususnya Pakistan, terutama dalam mempelajari Sejarah Asia Selatan dan Sejarah Politik. Penelitian ini diharapkan dapat menambah tulisan-tulisan ilmiah yang telah ada mengenai perkembangan politik di Pakistan. Nilai-nilai kependidikan yang dapat diambil dengan mempelajari politik Benazir Bhutto adalah bahwa hidup ini tidaklah mudah, cita-cita yang ingin diraih memerlukan suatu pengorbanan dan kemauan untuk terus belajar baik dari pengalaman maupun pendidikan formal.

### **C. Saran**

#### **1. Bagi Pemerhati Politik**

Tulisan yang membahas mengenai perkembangan politik di kawasan Asia Selatan khususnya Pakistan sampai saat ini masih sangat sedikit, hendaknya wujud perhatian juga dituangkan dalam bentuk artikel-artikel dan karangan buku. Dengan demikian masyarakat dunia akan dapat dengan cepat mengetahui informasi-informasi mengenai perkembangan politik di Pakistan.

## 2. Bagi Generasi Muda Indonesia

Bagi generasi muda Indonesia yang berminat dalam dunia politik hendaknya dapat mempersiapkan diri sejak dini, dengan membekali diri dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan pemerintahan dan mulai terjun secara langsung pada dunia politik dimulai dari lingkup yang kecil, misalnya; Universitas. Dengan persiapan yang matang baik secara teori maupun praktis, akan dapat mempermudah jalan untuk memasuki gerbang politik.

## 3. Bagi Peneliti Masalah Pakistan Selanjutnya

Diharapkan mampu meneruskan penelitian dari penelitian yang telah ada, permasalahan politik di Pakistan masih banyak yang sangat menarik untuk dikaji. Permasalahan Pakistan yang menarik untuk dikaji antara lain yaitu Kebijakan politik P.M. Zulfikar Ali Bhutto "*Bhuttoisme*", Eksistensi Pemerintahan Darurat Militer Jend. Zia ul-Haq, Jatuhnya pemerintahan 20 bulan P.M. Benazir Bhutto, dan masih banyak lagi. Dan semoga penelitian-penelitian selanjutnya dapat lebih baik dengan pembahasan yang lebih tajam dan berisi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Ahmadi. 1975. **Pengantar Sosiologi**. Semarang: Ramadhani.
- Abu Daud Busroh. 1990. **Sistem Pemerintahan Republik Indonesia**. Jakarta: Bina Aksara.
- Achmad Fedyani Sayfuddin. 1986. **Konflik dan Integrasi**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Almond, Gabriel.A. dan Sidney Verba. 1990. **Budaya Politik**. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara.
- Apter, David.E. 1987. **Politik Modernisasi**. Terjemahan Hermawan Sulistyono dan Wardah Hafidz. Jakarta: Gramedia.
- Ariyono Suyono. 1985. **Kamus Antropologi**. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bouman, P.J. 1976. **Sosiologi; Pengertian-Pengertian dan Masalah-Masalah**. Yogyakarta: Kanisius.
- Burki, Shahid Javed. 1991. **Pakistan: The Continuing Search for Nationhood**. Karachi: Profiles / Nations of Contemporary Asia.
- Dahl, Robert. 1985. **Analisa Politik Modern**. Terjemahan Sahat Simandra. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dahlan Nasution. 1989. **Politik Internasional; Konsep dan Teori**. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dhuroruddin Mashad. 1996. **Benazir Bhutto; Profil Politisi Wanita di Dunia Islam**. Jakarta: Cidesindo.
- Dudung Abdurrahman. 1999. **Metode Penelitian Sejarah**. Jakarta: Logos.
- Fatima Mernissi. 1994. **Ratu-Ratu Islam; yang terlupakan**. Bandung: Mizan.
- Gottschalk, Louis. 1975. **Mengerti Sejarah**. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hendropuspito.O.C, D. 1989. **Sosiologi Sistematis**. Yogyakarta: Kanisius.

- Helius Sjamsuddin. 1996. **Metodologi Sejarah**. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Helius Sjamsuddin dan Ismaun. 1996. **Pengantar Ilmu Sejarah**. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hetty Siregar. 1990. **Menuju Dunia Baru; Komunikasi, Media dan Gender**. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Holsti, K.J. 1992. **Politik Internasional; Kerangka Untuk Analisis jilid 2**. Terjemahan Tahir Azhary. Jakarta: Erlangga.
- Huntington, Samuel.P. 2004. **Tertib Politik; Pada Masyarakat yang Sedang Berubah**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husaini. Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. **Metodologi Penelitian Sosial**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hutauruk, M. 1983. **Azas-Azas Ilmu Negara**. Jakarta: Erlangga.
- Ibrahim Alfian. 1994. **Tentang Metodologi Sejarah**. Yogyakarta: Gama Press.
- Isjwara, F. 1982. **Pengantar Ilmu Politik**. Bandung: Angkasa.
- Iver, MC. 1983. **Jaring–Jaring Pemerintahan**. Terjemahan Laila Hasyim. Jakarta: Aksara Baru.
- Johnson, Doyle Paul. 1988. **Teori Sosiologi Klasik dan Modern**. Terjemahan Robert, M.Z. Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Kansil, C.S.T. 1981. **Sistem Pemerintahan Indonesia**. Jakarta: Aksara Baru.
- Kartini Kartono. 1990. **Pengantar Metodologi Reset Sosial**. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. 1986. **Metode-Metode Penelitian Masyarakat**. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat et al . 1988. **Masyarakat dan Kebudayaan; kumpulan karangan untuk Prof. Dr. Selo Soemardjan**. Jakarta: Djambatan.
- Koentjoro Purbopranoto. 1975. **Beberapa Catatan Hukum Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara**. Bandung: Alumni.
- Kuntowijoyo. 1995. **Pengantar Ilmu Sejarah**. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Mawasdi Rauf. 2000. **Konsensus Politik**. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Mayor Polak, J.B.A.F. 1974. **Sosiologi**. Jakarta: Ichtiar.
- Miriam Budiardjo. 1982. **Dasar-Dasar Ilmu Politik**. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1998. **Partisipasi Dan Partai Politik**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mohtar Mas'oe'd dan Colin MacAndrews. 1993. **Perbandingan Sistem Politik**. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nasikun. 2001. **Sistem Sosial Indonesia**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho Notosusanto. 1978. **Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer**. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Pamudji, S. 1994. **Perbandingan Pemerintahan**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Plano, Jack.C, Robert E.Riggs dan Helenan S.Robin. 1989. **Kamus Analisa Politik**. Jakarta: Rajawali.
- Priyanto Wibowo. 2003. **Antara Mao dan Liu Shauqi**. Jakarta: Wedatama Widyasastra.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachmat Bratamidjaja. 1990. **Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi**. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rahman Zanuddin.A. 1992. **Kekuasaan dan Negara; Pemikiran Politik Ibnu Khaldun**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Renier, G.J. 1997. **Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah**. Terjemahan Muin Umar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riza Sihbudi. M, M.Hamdani Basyar dan Happy Bone Zulkarnain. 1993. **Konflik dan Diplomasi di Timur Tengah**. Bandung: Eresco.
- Rusadi Kantaprawira. 1980. **Sistem Politik Indonesia**. Bandung: Sinar Baru.
- Sartono Kartodirdjo. 1982. **Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia**. Jakarta: Gramedia.

- \_\_\_\_\_. 1993. **Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Schermerhorn, R.A. 1987. **Masyarakat dan Kekuasaan**. Terjemahan Soerjono Soekanto dan Agus Brotosusilo. Jakarta: Rajawali.
- Soerdjono Soekanto. 1983. **Memperkenalkan Sosiologi**. Jakarta: Rajawali.
- \_\_\_\_\_. 2002. **Teori Sosiologi; tentang Pribadi dalam Masyarakat**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2002. **Sosiologi: Suatu Pengantar**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo.S Honggowongso. 1990. **Perjuangan Wanita Sejangat Menuntut Hak Politik**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Soleman B. Taneko. 1984. **Struktur dan Proses Sosial**. Jakarta: Rajawali.
- Sudijono Sastroatmodjo. 1995. **Perilaku Politik**. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sukarna. 1981. **Sistem Politik**. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 1990. **Perbandingan Sistem Politik**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumadi Suryabrata. 2002. **Metodologi Penelitian**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrial Syarbaini, A. Rahman dan Monang Djihado. 2005. **Sosiologi dan Politik**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- The Liang Gie. 1984. **Ilmu Politik**. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Veeger, K.J. 1990. **Realitas Sosial**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Veithzal Rivai. 2004. **Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahya Muhaimin dan Colin MacAndrews. 1982. **Masalah-Masalah Pembangunan Politik**. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

### **SURAT KABAR dan MAJALAH**

“Pakistan Sekarang”. 1989. 23 Maret. *Angkatan Bersenjata*. 4.

“Benazir Melahirkan dengan Operasi Caesar”. 1988. 22 September. *Kompas*.1.



- “Putra Zia Segera Bentuk Gerakan Politik”. 1988. 22 September. *Kompas*. 7.
- “Wawancara ‘Kompas’ dengan Benazir Bhutto”. 1988. 24 September. *Kompas*. 1&8.
- “MA Pakistan Tunda Kepastian Pengadilan Tinggi Lahore”. 1988. 1 Oktober. *Kompas*. 7.
- “Killing Field di Pakistan, 175 Orang Tewas”. 1988. 2 Oktober. *Kompas*. 1.
- “Karachi dan Hyderabad Bagaikan Kota Hantu”. 1988. 3 & 4 Oktober. *Kompas*. 1 & 4.
- “Pangab Pakistan Bicara Soal Pemilu”. 1988. 15 Oktober. *Kompas*.
- “Kekerasan Fisik Mulai Membayangi Pemilu Pakistan”. 1988. 17 Oktober. *Kompas*.
- “Hasil Penelitian Ungkapkan Pesawat Zia ul-Haq Disabotase”. 1988. 18 Oktober. *Kompas*. 1.
- “Pertarungan Fisik Pendukung PPP dan PML Pertanda Jelek”. 1988. 18 Oktober. *Kompas*. 4.
- “Liga Muslim Gagal Galang Persatuan Hadapi Partai Rakyat Pakistan”. 1988. 19 Oktober. *Kompas*. 7.
- “Politik Islam Pakistan Pasca Zia ul-Haq”. 1988. 24 Oktober. *Kompas*. 4.
- “Benazir Jadi Menlu, Bila PPP Menang”. 1988. 28 Oktober. *Kompas*. 7.
- “Sesudah Bhutto, Tak Licin Jalan Bagi Zia”. 1979. 14 April. *Tempo*. 10-14.
- “Pernikahan Menjelang Pemilu”. 1987. 15 Agustus. *Tempo*. 41-44.
- “Rabu Hitam di Bahawalpur”. 1988. 27 Agustus. *Tempo*. 30-40.
- “Apakah Ia Hanya Seorang Betina Dari Larkana ?”. 1988. 26 November. *Tempo*. 67-77.
- “Tragedi Sebuah Dinasti”. 1996. 5 Oktober. *Sinar*. 64.